



**DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

RENCANA KERJA (RENJA) 2022



KATA PENGANTAR

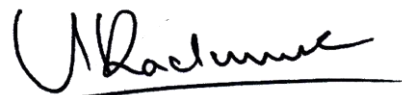
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana Kerja (Renja) ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran program kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang sedang berjalan, sehingga memberikan acuan untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Provinsi, Perencanaan Pembangunan Nasional yang diawali dengan Rapat Perencanaan Program Prioritas Tahun 2022 dan Forum Perangkat Daerah Tingkat Provinsi melibatkan Bappeda/PD Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi seluruh pelaksana kegiatan serta pihak terkait lainnya dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur.

Samarinda, 2021

Kepala Dinas,



Ir. UJANG RACHMAD, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19690120 199403 1 014

Daftar Isi

	<i>Halaman</i>
KATAPENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	I-1
I.2. Landasan Hukum	I-3
I.3. Maksud dan Tujuan	I-4
I.4. Sistematika Penulisan	I-4
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu PD	II-1
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	II-18
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	II-21
II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Perkebunan Kaltim	II-35
II.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II-38
II.6. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat	II-38
III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-1
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	III-6
III.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	III-9
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
IV.1. Pagu Indikatif Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022	IV-1
IV.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Disesuaikan.....	IV-2
V. PENUTUP.....	V-1
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

<i>Nomor</i>	<i>Halaman</i>
1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2019	II-3
2. Produksi Komoditas Perkebunan tahun 2020.....	II-4
3. Produktivitas Komoditas Perkebunan Tahun 2020.....	II-5
4. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Rehabilitasi Lada 160 Ha.....	II-6
5. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kelapa Sawit 100 Ha	II-7
6. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Lada 125 Ha.....	II-7
7. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kakao 80 Ha.....	II-8
8. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Karet 135 Ha.....	II-8
9. Rekapitulasi Luas lahan NKT per Kabupaten.....	II-10
10. Rekapitulasi Sertifikasi Benih Tahun 2020.....	II-13
11. Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	II-18
12. Distribusi PDRB ADHB Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (2012-2020)	II-19
13. Pemanfaatan Lahan dan Realisasi Tanam Tahun 2020	II-23
14. Produktivitas Perkebunan Rakyat Tahun 2013-2020	II-25
15. Tabel T.C.29 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD s/d Tahun 2021.....	

Bab I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis, ekologis dan sosial budaya memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, dimana yang dimaksud dengan Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

Penyelenggaraan Perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa Negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari serta meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan. Sub sektor perkebunan juga merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dimana upaya pemerintah dalam menurunkan jumlah pengangguran dan kemiskinan wilayah Kalimantan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 5% cukup sulit untuk dicapai apabila tidak ada upaya nyata untuk mengembangkan sektor riil, salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui pengembangan pada sektor perkebunan.

Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, hal ini sesuai dengan surat keputusan Gubernur nomor 09 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Rencana Kerja (Renja) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan, dimana dalam penyusunannya mengacu pada RENSTRA.

Dalam pelaksanaannya pembangunan perkebunan ke depan dihadapkan kepada berbagai tantangan seperti terjadinya berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan serta berbagai persoalan mendasar seperti pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, terbatasnya sumber daya lahan, air dan energi, terjadinya perubahan iklim global, kecilnya kepemilikan dan status lahan milik petani, terbatasnya kemampuan sistem perbenihan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh serta kurangnya koordinasi kerja antar sub sektor yang terkait pembangunan perkebunan.

Salah satu prioritas program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023 pada sub sektor perkebunan adalah :

1. Program Peningkatan produksi perkebunan;
2. Program Mitigasi emisi gas rumah kaca sektor perkebunan;
3. Program Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan;
4. Program Peningkatan mutu dan pemasaran hasil perkebunan;
5. Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian;
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
7. Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
8. Program perizinan Usaha Pertanian; dan
9. Program Penyuluhan Pertanian.

Untuk mencapai sasaran program seperti tersebut di atas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Perkebunan 2019 – 2023. Renstra ini diwujudkan setiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) PD yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan, dimana pelaksanaannya, berapa dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Renja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 disusun secara selaras dengan tema RKPD tahun 2022 yaitu ***“Penguatan Daya Saing Daerah dalam Rangka Menyambut IKN”*** dan mengakomodasikan Renja Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan lainnya seperti Perguruan Tinggi, Forum Masyarakat Pertanian, Kelompok Tani dan lain-lain.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa perundangan-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan penyusunan renja PD tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah ini adalah untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022.

Tujuan yang diharapkan dari Renja ini adalah :

1. Terjabarkannya Renstra Perangkat Daerah berdasarkan RKPD tahun 2022;
2. Tersedianya gambaran yang jelas tentang program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2022;
3. Tersedianya acuan dan arahan dalam pencapaian sasaran Renja Perangkat Daerah tahun 2022; dan
4. Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah pada tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan RKPD dan penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat ringkasan singkat dari rencana kerja dan pendanaaan Daerah

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan selama 1 (satu) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

II. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Pada tahun 2020 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan program dan kegiatan mengacu kepada RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksana kegiatan adalah Dinas Perkebunan dan 3 (Tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu:

- 1) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan Benih Perkebunan (UPTD PBP);
- 3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (UPTD P2TP); dan
- 4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Produsen Benih Tanaman Perkebunan (UPTD PBTP).

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan ditahun 2020 oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur baik untuk program rutin maupun teknis pembangunan adalah sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** realisasi keuangan Dinas dan 3 UPTD sebesar Rp. 4.172.838.743,- dari pagu 4.577.109.718,- dengan capaian keuangan 91,16% dan untuk capaian indikator kinerja (K) sebesar 106%. Program ini memiliki output tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD dengan capaian 88% dari target 83%. Adapun Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu *Pelaksanaan Administrasi Perkantoran* dengan 16 (enam belas) sub kegiatan yakni :
 - a) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan;
 - b) Honorarium pengelolaan keuangan ;
 - c) Belanja Alat Tulis Kantor;

- d) Belanja Alat Listrik dan Elektronik;
- e) Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya;
- f) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas;
- g) Belanja Telepon;
- h) Belanja Air;
- i) Belanja Listrik;
- j) Belanja Surat Kabar/Majalah;
- k) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit;
- l) Belanja Jasa Tenaga Teknis/Non Teknis;
- m) Belanja Jasa KIR;
- n) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan;
- o) Belanja Cetak; dan
- p) Belanja Penggandaan/Fotocopy/Penjilidan.

Dimana output dari kegiatan tersebut atas adalah jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran dari target 12 bulan tercapai 12 bulan (100%).

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** realisasi keuangan Dinas dan 3 UPTD sebesar Rp. 3.760.976.823,- dari pagu Rp. 3.809.052.900,- dengan capaian keuangan sebesar 98,72% dan capaian kinerja (K) sebesar 100% (tercapai 5 unit dari target 5 unit). Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari 2 kegiatan, yakni:
 - a. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan pagu Rp 1.683.219.000,- dan realisasi Rp 1.664.934.423,- (98,91%). Kegiatan ini memiliki output jumlah peralatan dan kelengkapan kantor dengan capaian 16 unit dari target 15 unit (107%).
 - b. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan pagu 2.082.240.900,- dengan realisasi Rp 2.052.449.400,- (98,56%). Kegiatan ini memiliki output jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana dengan capaian 12 bulan dari target 12 bulan (100%).
3. **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah** realisasi keuangan Dinas dan 3 UPTD sebesar Rp. 1.861.299.016,- dari pagu Rp. 2.017.070.500,- dengan capaian keuangan sebesar 92,27% dan capaian indikator kinerja (K) sebesar

100%. Dari target kinerja yaitu persentase ASN yang memiliki standar kompetensi sebesar 20% tercapai 20%. Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah terdiri dari 2 kegiatan, yakni:

- a. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan pagu Rp 1.447.883.000,- dan realisasi Rp 1.357.190.146 (93,74%). Kegiatan ini memiliki output sebagai berikut:
 - 1) Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan capaian kinerja 4 kegiatan dari target 4 kegiatan.
 - 2) Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dengan capaian kinerja 4 kegiatan dari target 4 kegiatan.
 - 3) Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman dengan capaian kinerja 12 bulan dari target 12 bulan.
- b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan pagu Rp 14.000.000,- dengan realisasi Rp 12.500.000,- (89,29%). Kegiatan ini memiliki output jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek dengan capaian 4 orang dari target 50 orang. Tidak tercapainya target dikarenakan kegiatan ini mengalami rasionalisasi akibat pandemi covid-19.

4. **Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan** realisasi keuangan sebesar Rp. 1.066.364.262,- dari pagu dana Rp. 1.097.060.000,- dengan capaian keuangan sebesar 97,20% dan capaian indikator kinerja (K) sebesar 103%. Dari target kinerja nilai akuntansi kinerja PD sebesar 68% tercapai 69,93 % sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2019

No.	Komponen Yang Nilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30%	27,25
b.	Pengukuran Kinerja	25%	15,31
c.	Pelaporan Kinerja	15%	12,22
d.	Evaluasi Internal	10%	5,73
e.	Capaian Kinerja	20%	9,42
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	69,93

Program ini memiliki 2 kegiatan, yakni:

- a. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran dari pagu sebesar Rp 723.120.000,- terealisasi Rp 720.959.300 (99,70%). Kegiatan ini memiliki output jumlah dokumen perencanaan dan anggaran dengan capaian 10 dokumen dari target 10 dokumen (100%) yang terdiri dari: 1) Dokumen Renja 2021, 2) Perubahan Renja 2020, 3) DPA, 4) RKA, 5) DPPA, 6) RKAP, 7) RKT, 8) Evaluasi Renja, 9) Standarisasi Harga, dan 10) Pedoman Umum.
 - b. Kegiatan penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dari pagu sebesar Rp 373.940.000,- terealisasi Rp 345.404.962,- (92,37%). Kegiatan ini memiliki output jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan capaian 4 dokumen dari target 4 dokumen (100%) yang terdiri dari: 1) Laporan Tahunan, 2) LPPD, 3) LkjIP, dan 4) Statistik.
5. **Program Peningkatan Produksi Perkebunan** terealisasi sebesar Rp. 8.602.374.400,- dari pagu dana Rp. 10.387.335.000,- dengan capaian kinerja keuangan 82,82% dan capaian indikator kinerja (K) sebesar 99,98%. Capaian keuangan tidak mencapai 100% dikarenakan silpa positif. Program ini memiliki output peningkatan produksi komoditas perkebunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.2. Produksi Komoditas Perkebunan Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	(%)	Ket
Produksi komoditas perkebunan (Ton)	16.812.938	16.809.560	99,98	Angka sementara Tahun 2020 (Sumber Dinas Perkebunan)
a) Kelapa Sawit (Ton TBS)	16.717.254	16.717.254	100	
b) Karet (Ton)	74.060	70.682	95,44	
c) Kelapa (Ton)	12.468	12.468	100	
d) Kakao (Ton)	3.307	3.307	100	
e) Lada (Ton)	5.849	5.849	100	

Program ini terdiri dari 3 kegiatan, yakni:

- a. Kegiatan peningkatan produktivitas perkebunan dari pagu Rp 3.299.585.000,- terealisasi Rp. 2.757.128.900,- (83,56%). Kegiatan ini memiliki output peningkatan produktivitas komoditas perkebunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.3. Produktivitas Komoditas Perkebunan Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	(%)	Ket
Produktivitas komoditas perkebunan (Ton/Ha)				Angka sementara Tahun 2020 (Sumber Dinas Perkebunan)
a. Kelapa Sawit (Ton/Ha)	19,5	20,70	106	
b. Karet (Ton/Ha)	1,35	1,44	107	
c. Kelapa (Ton/Ha)	0,80	0,75	94	
d. Kakao (Ton/Ha)	0,70	0,74	106	
e. Lada (Ton/Ha)	1,15	0,92	80	

Upaya Dinas Perkebunan dalam meningkatkan produktivitas 5 komoditi di atas pada tahun 2020 dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Peremajaan Kakao seluas 50 Ha

Kegiatan peremajaan kakao tercapai 50 Ha dari target 50 Ha. Kelompok tani penerima kegiatan ini adalah kelompok tani Lalut Nanga di Desa Rantau Sentosa Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur seluas 50 Ha dan jumlah KK 30.

- 2) Rehabilitasi Kebun Lada 160 Ha

Kegiatan rehabilitasi lada tercapai 160 Ha dari target 160 Ha. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Berau 70 seluas Ha, Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 75 Ha dan di Kota Samarinda seluas 15 Ha. Dengan daftar kelompok tani penerima sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.4. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Rehabilitasi Lada 160 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	KK	Lokasi
1.	Malonan Jaya	70	36	Kamp. Merancang Ilir Kec. Gunung Tabur Kab. Berau
2.	Bunga Buana	10	10	Ds. Salo Cela Kec. Muara Badak Kab. Kukar
3.	Taruna	10	14	Ds. Tani Harapan Kec. Loa Janan Kab, Kukar
4.	Etam	5	10	Ds. Tani Harapan Kec. Loa Janan Kab, Kukar
5.	Peduli Lingkungan	3	6	Ds. Tani Harapan Kec. Loa Janan Kab, Kukar
6.	Mitra Sejati I	3	9	Ds. Tani Harapan Kec. Loa Janan Kab, Kukar
7.	Mitra Lada	2	9	Ds. Tani Harapan Kec. Loa Janan Kab, Kukar
8.	Mandiri	4	8	Ds. Tani Harapan Kec. Loa Janan Kab, Kukar
9.	Mitra Sejati II	7	11	Ds. Tani Harapan Kec. Loa Janan Kab, Kukar
10.	Pada Idi	5	12	Ds. Tani Harapan Kec. Loa Janan Kab, Kukar
11.	Mandiri Bersaudara	4	8	Ds. Tani Harapan Kec. Loa Janan Kab, Kukar
12.	Mega Buana	8	19	Ds. Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kukar
13.	Karya Tani	6	11	Ds. Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kukar
14.	Setia Bersama	8	13	Ds. Tani Bakti Kec. Samboja Kab. Kukar
15.	Tunas Baru	6	7	Kamp. Bayur Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda
16.	Sepakat	5	6	Ds. Muang Dalam Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda
17.	Maju Muang	2	1	Ds. Muang Dalam Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda
18.	Karya Mandiri	2	1	Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda
TOTAL		160	133	

- b. Kegiatan perluasan komoditas perkebunan dari pagu Rp. 6.729.502.500,- terealisasi Rp. 5.500.215.500,- (81,73%). Kegiatan ini memiliki output peningkatan luas kebun (Ha) dengan realisasi 460 Ha dari target 460 Ha (100%). Output tersebut dicapai dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1) Perluasan Areal Kelapa Sawit 100 Ha

Kegiatan perluasan areal kelapa sawit tercapai 100 Ha dari target 100 Ha. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur seluas 50 Ha dan Kabupaten Kutai Barat seluas 50 Ha. Dengan daftar kelompok tani penerima sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.5. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kelapa Sawit 100 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	KK	Lokasi
1.	Mekar Jaya	50	35	Ds. Bukit Permata Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur
2.	Mekar Jaya	25	25	Kmp. Tanjung Sari Kec. Bongan Kab. Kutai Barat
3.	Cipta Karya	25	25	Kmp. Bukit Harapan Kec. Bongan Kab. Kutai Barat
TOTAL		100	85	

2) Perluasan Areal Kelapa 20 Ha

Kegiatan perluasan areal kelapa tercapai 20 Ha dari target 20 Ha. Kelompok tani penerima kegiatan ini adalah kelompok tani Sumber Ilahi di Desa Santan Tengah Kec. Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 20 Ha dengan jumlah KK 10.

3) Perluasan Areal Lada 125 Ha

Kegiatan perluasan areal lada tercapai 125 Ha dari target 125 Ha (100%). Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Berau seluas 25 Ha, Kabupaten Kutai Barat seluas 75 Ha dan Kabupaten Kutai Timur seluas 25 Ha. Dengan daftar kelompok tani penerima sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.6. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Lada 125 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	KK	Lokasi
1.	Surya Tani	25	23	Kmp. Bukit Makmur Jaya Kec. Biatan Kab. Berau
2.	Harapan Baru	28	28	Kmp. Linggang Melapeh Baru Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat
3.	Harapan Kita	16	16	Kmp. Ongko Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	KK	Lokasi
4.	Bina Karya	12	12	Kmp. Balok Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat
5.	Lada Lestari	19	19	Kmp. Juaq Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat
6.	Agribisnis	25	20	Ds. Long Poq Kec. Muara Ancalong Kab. Kutai Timur
TOTAL		125	118	

4) Perluasan Areal Kakao 80 Ha

Kegiatan perluasan areal kakao tercapai 80 Ha dari target 80 Ha (100%). Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur seluas 80 Ha. Dengan daftar kelompok tani penerima sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.7. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kakao 80 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	KK	Lokasi
1.	Gapoktan Mitra Tani	30	18	Ds. Mata Air Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur
2.	Sumber Rejeki	20	20	Ds. Mata Air Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur
3.	Sumber Makmur	30	40	Ds. Mata Air Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur
TOTAL		80	118	

5) Perluasan Areal Karet 135 Ha

Kegiatan perluasan karet tercapai 135 Ha dari target 135 Ha (100%). Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Kutai Barat seluas 95 Ha dan Kota Samarinda seluas 40 Ha. Dengan daftar kelompok tani penerima sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.8. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Karet 135 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	KK	Lokasi
1.	Karya Tani 2	25	21	Kmp. Balok Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat
2.	Karya Tani 3	25	21	Kmp. Balok Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	KK	Lokasi
3.	Lestari	29	27	Kmp. Pepas Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat
4.	Sinar Tani IV	16	16	Kamp. Mencimai Kec. Barong Tongkok Kab. Kubar
5.	Tani Maju	13	11	Bentuas Kec. Palaran Kota Samarinda
6.	Subur Makmur	5	4	Bentuas Kec. Palaran Kota Samarinda
7.	Mekar Jaya	7	9	Bentuas Kec. Palaran Kota Samarinda
8.	Pada Elo	15	12	Bentuas Kec. Palaran Kota Samarinda
TOTAL		135	100	

- c. Kegiatan pengembangan kelembagaan perkebunan dengan pagu 358.247.500,- dengan realisasi Rp 345.030.000,- (96,31%). Target kinerja pada kegiatan ini yaitu jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk sebanyak 20 unit dan capaian 20 unit di Kabupaten Kutai Barat (Komoditi Karet, Lada dan Kelapa Sawit), Samarinda (Komoditi Karet), Kabupaten Kutai Timur (Komoditi Kakao, Lada dan Kelapa Sawit) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Komoditi Kelapa).
6. **Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan** realisasi keuangan sebesar Rp. 464.349.800,- dari pagu dana Rp 491.400.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 94,50% dan untuk capaian indikator kinerja (K) 140%. Output program ini adalah menurunnya emisi sektor perkebunan dengan capaian sebesar 2,916 juta ton CO₂eq dari target 4,080 Juta ton CO₂eq. program ini terdiri dari 3 kegiatan, yakni:
- a. Kegiatan Pengembangan EBT pada sektor perkebunan dengan pagu Rp 165.600.000,- terealisasi sebesar Rp 153.952.300,- (92,97). Target kinerja pada kegiatan ini yaitu jumlah perusahaan yang mengembangkan bio energi (PMS) mengalami rasionalisasi akibat pandemi covid-19 dari 2 PMS menjadi 1 PMS dengan capaian 1 PMS (100%) yaitu PT. Dharma Satya Nusantara Tbk di Kabupaten Kutai Timur.
- b. Kegiatan Perlindungan Lahan Konservasi di Areal Perkebunan dengan pagu sebesar Rp 123.100.000 dan realisasi sebesar Rp 123.011.600,- (99,93%). Target kinerja pada kegiatan ini yaitu luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi (ha) seluas 101.500 ha dan capaian pada kegiatan ini yaitu 106.000 ha (104%). Rekapitulasi luas lahan NKT per Kabupaten sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.9. Rekapitulasi Luas Lahan NKT per Kabupaten

Kabupaten	Jumlah PBS	Luas NKT (Ha)
Berau	9	8.700
Kutai Barat	12	5.600
Mahakam Ulu	2	1.900
Penajam Paser Utara	4	2.500
Paser	10	4.000
Kutai Kartanegara	29	39.000
Kutai Timur	55	44.300
Jumlah	121	106.000

c. Kegiatan Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan dengan pagu sebesar Rp 202.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp 187.385.900,- (92,44%). Target kinerja pada kegiatan ini yaitu jumlah Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina sebanyak 5 KTPA, dan capaian kinerja nya sebanyak 6 KTPA (120%) (3 di Kabupaten Paser dan 3 di Kabupaten Kutai Barat).

7. **Program Pembinaan dan Pengawasan usaha Perkebunan** realisasi keuangannya sebesar Rp. 472.311.200,- dari pagu dana Rp. 475.065.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,42%, untuk capaian indikator kinerja (K) 51%. Program ini memiliki output meningkatnya jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) dari target 35 Perusahaan tercapai sebanyak 18 perusahaan, terdiri dari 12 perusahaan di Kabupaten Kutai Timur (PT Subur Abadi Wana Agung, PT Hamparan Perkasa Mandiri, PT Kresna Duta Agroindo, PT Tapian Nadenggan, PT DSN Group, PT Dewata Sawit Nusantara, PT Dharma Inti Sawit Nugraha, PT Karyanusa Eka Daya I/II dan PT Subur Abadi Plantation), 2 Perusahaan di Kabupaten Berau (PT Mulia Inti Perkasa dan PT Dwiwira Lestari Jaya), dan 4 Perusahaan di Kabupaten Kutai Kartanegara (PT Enggang Alam Sawita, PT Hamparan Sentosa, PT Sawit Unggul Agro Niaga dan PT Mula Persada Raya). Tidak tercapainya target 35 Perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) dikarenakan adanya pemotongan anggaran di Provinsi maupun di Kabupaten akibat pandemi covid-19 dan sesuai dengan SOP perusahaan untuk tidak memperkenalkan pihak luar untuk masuk ke daerah perusahaan pada saat pandemi covid-19. Pada program ini terdapat kegiatan:

- a. Peningkatan Kemitraan Usaha Perkebunan dari pagu Rp 158.390.000,- dan realisasi sebesar Rp 156.808.500,- (99,00%) dengan capaian target kinerja 25 koperasi (jumlah lembaga pekebun yang dimitrakan) dari target 25 koperasi (100%). Terdapat penambahan 5 koperasi yang dimitrakan, yaitu Koperasi Nusa Udip Tiga, KSU Putra Harapan, KSU Pet Sot Sang Wehe, Koperasi Lintas Benua Abadi, dan Koperasi One berkat Solidaritas.
 - b. Penanganan Konflik Usaha Perkebunan dari pagu Rp. 120.300.000,- terealisasi sebesar Rp. 119.241.100,- (99,12). Capaian kinerja pada kegiatan ini yaitu jumlah konflik perkebunan yang terselesaikan sebanyak 6 konflik dari target 5 konflik (120%). 6 konflik tersebut antara lain:
 - 1) Konflik antara PT Maju Kalimantan Hadapan, PT Cahaya Anugerah Plantation dan Koperasi Sawit Sendowan;
 - 2) Konflik antara PT Enggang Alam Sawita dengan PT Beringin Alam Raya (Pertambangan);
 - 3) Konflik antara Pemkab Paser, PT Anugerah Abadi Multi Usaha dan Masyarakat Desa Luan Kec. Muara Samu;
 - 4) Konflik antara PT Gunta Samba Jaya dengan LPPMTI;
 - 5) Konflik antara PT Dwiwira Lestari Jaya dengan Koperasi Biatan Bersama dan Koperasi Sawit Sejahtera; dan
 - 6) Konflik antara PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation dengan Koperasi Cahaya Rungkap.
 - c. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan dari pagu Rp. 196.375.000,- terealisasi sebesar Rp. 196.261.600,- (99,94%). Capaian kinerja pada kegiatan ini yaitu jumlah pelaku usaha yang dibina sebanyak 21 perusahaan dari target 20 perusahaan (105%) terdiri dari: 8 Perusahaan di Kabupaten Kutai Timur, 7 Perusahaan di Kabupaten Kutai Kartanegara, 3 Perusahaan di Kabupaten Paser, 1 Perusahaan di Kabupaten Penajam Paser Utara, dan 2 Perusahaan di Kabupaten Berau.
8. **Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan** terealisasi sebesar 830.746.200,- dari pagu sebesar 844.330.000,- dengan capaian kinerja keuangan 98,39% dan capaian indikator kinerja 50%. Target indikator pada program ini yaitu

jumlah produk perkebunan yang bersertifikat SNI sebanyak 2 produk dan capaiannya sebanyak 1 produk, yaitu uji biji kakao dalam kemasan plastik untuk 4 kelompok tani di Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur. Tidak tercapainya target program akibat rasionalisasi akibat pandemi covid-19. Pada program ini terdapat kegiatan:

- a. Pembinaan Pasca Panen Perkebunan dari total pagu sebesar Rp331.792.500,- dengan realisasi Rp 328.556.600,- (99,03%). Target kinerja pada kegiatan ini adalah jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI (kelompok Tani) sebanyak 3 KT dan capaian kinerjanya sampai dengan akhir tahun anggaran sebanyak 4 Kelompok Tani (133%). Kelompok tani tersebut antara lain:
 - 1) Bunga Mawar A;
 - 2) Karya Tani A;
 - 3) Karya Etam Lestari; dan
 - 4) Subur Raya II.
 - b. Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan dengan nilai pagu Rp. 381.765.000,- terealisasi sebesar Rp. 373.013.100,- (97,71%). Target kinerja pada kegiatan ini yaitu jumlah jenis olahan hasil perkebunan sebanyak 2 produk. Capaian kinerja pada kegiatan ini sebanyak 2 produk, yaitu komoditi kelapa di Kota Balikpapan dengan hasil olahan kelapa klapertart dan es krim kelapa , dan komoditi kakao di Kabupaten Kutai Timur dengan hasil olahan bolu kukus, sirup cokelat dan selai cokelat (100%).
 - c. Promosi Produksi Perkebunan dengan pagu sebesar Rp 130.772.500,- dengan realisasi sebesar 129.166.500,- (98,77%). Target kinerja pada kegiatan ini yaitu jumlah promosi yang diikuti 1 event. Realisasi target sebanyak 1 event tidak bisa tercapai dikarenakan tidak diperbolehkan mengadakan acara seperti expo/ pameran pada masa pandemi covid-19. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan hanya fasilitasi pemasaran karet dan lada di Penajam paser Utara.
9. **Program Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih** terealisasi sebesar Rp. 339.673.600,- dari pagu sebesar Rp. 341.960.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,33% dan untuk capaian indikator kinerja 232%. Indikator kinerja program ini yaitu jumlah benih yang beredar 2.905.176 benih dan realisasinya sebanyak 6.749.812 benih yang terdiri dari benih kelapa sawit sebanyak 4.759.327 benih, karet sebanyak

265.000 benih, lada sebanyak 1.092.500 benih, Aren sebanyak 188.850 benih, Kakao sebanyak 386.500 benih, Kopi sebanyak 27.335 benih dan Kelapa Dalam sebanyak 30.300 benih. Pada program ini terdapat 2 kegiatan:

- a. Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Benih dari pagu Rp 234.450.000,- terealisasi sebesar Rp 233.962.650,- (99,79%). Output dari kegiatan ini adalah persentase peredaran benih yang illegitim. Pada tahun 2018 terdapat benih illegitim sebanyak 85.000 benih kelapa sawit dan 2019 sebanyak 95.000 benih kelapa sawit, sehingga terjadi penurunan kasus benih illegitim sebesar 3,07 persen dari target 3,08 persen atau sebesar 102%.
- b. Pengujian dan Sertifikasi Benih dari nilai pagu 107.510.000,- terealisasi Rp 105.710.950,- (98,83%). Output dari kegiatan ini adalah jumlah benih yang disertifikasi sebanyak 2.000.000 benih dan untuk capaian pada kegiatan ini sebanyak 3.034.162 benih yang disertifikasi atau sebesar 152%. Berikut data sertifikasi yang telah dilakukan selama tahun 2020:

Tabel II.10. Rekapitulasi Sertifikasi Benih Tahun 2020

No	Komoditas	Jumlah			Ket
		Surat Permohonan	Sertifikat yang diterbitkan	Benih	
1	Kelapa Sawit				
	- Kecambah	54	54	528.609	SKHP2KKS SMB
	- Benih	27	27	660.602	
2	Aren				
	- Kecambah	5	5	55.100	SMB
	- Benih	9	9	126.200	SMB
3	Lada				
	- Stek	11	11	402.200	SMB
	- Benih	16	16	673.240	SMB
4	Karet				
	- Benih	4	4	255.400	SMB
5	Kelapa Dalam				
	- Benih	4	4	28.961	SMB
6	Kakao				
	- Benih	8	8	303.850	SMB
	Jumlah	138	138	3.034.162	

Pelaksanaan sertifikasi pada tahun 2020 dilakukan pada 5 (lima) Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Samarinda sebanyak 975.711 benih terdiri dari 296.400 benih kakao, 64.100 benih lada dan 615.211 benih kelapa sawit, Kutai Kartanegara sebanyak 1.045.405 benih terdiri dari 707.600 benih lada, 5.300 benih kelapa dalam, 265.000 benih Karet, 10.500 benih kakao dan 57.005 benih kelapa sawit, Kutai Timur sebanyak 326.650 benih terdiri dari 191.550 benih aren, 25.000 benih kelapa dalam dan 110.100 benih kelapa sawit, Kutai Barat sebanyak 37.500 benih kakao, Paser sebanyak 433.216 benih kelapa sawit dan 1 Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 376.700 benih terdiri dari 346.000 benih lada dan 30.700 benih kelapa sawit.

10. **Program Penyediaan Bahan Tanaman** terealisasi Rp. 1.388.963.500,- dari pagu Rp 1.435.142.168,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96,78%. Indikator kinerja program yaitu persentase pemenuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat sebesar 85% atau sebesar 100%. Pada program ini terdapat 2 kegiatan yaitu:
 - a. Penyediaan Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar dari pagu Rp 800.805.868,- terealisasi Rp 794.541.700,- (99,22%). Output dari kegiatan ini yaitu jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar yang terdiri dari kelapa sawit 15.000 benih, karet 25.000 benih dan aren 10.000 benih. Dengan capaian output sebesar 100% terdiri dari kelapa sawit 15.000 benih, karet 25.000 benih dan aren 10.000 benih.
 - b. Penyediaan Benih Tanaman Semusim dan Rempah dengan pagu Rp 634.336.300,- dengan realisasi Rp 594.421.800,- (93,71%). Output pada kegiatan ini adalah jumlah benih tanaman semusim dan rempah yang terdiri dari komoditi lada 25.000 benih, pala 40.000 benih dan sereh wangi 10.000 benih. Dengan capaian output 69% yakni untuk tanaman lada sebanyak 13.723 benih (untuk penyediaan awal tanaman lada sebanyak 25.000, seiring berjalannya waktu dan dikarenakan faktor cuaca maka ada sebanyak 11.277 benih yang mati), untuk tanaman sereh wangi penyediaan awal sebanyak 10.000 benih, sama halnya dengan tanaman lada ada benih yang mati sebanyak 2.500 benih, jadi tanaman sereh wangi yang hidup sebanyak 7.500 dan untuk tanaman pala sebanyak 10.000 benih telah terpenuhi.
11. **Program Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan** dari nilai pagu sebesar Rp. 734.305.000,- terealisasi sebesar Rp. 668.396.892,- dengan capaian kinerja

keuangan sebesar 91,02%. Indikator kinerja pada program ini yaitu Jumlah taksasi kerugian akibat serangan OPT Rp 1.087.534.440,-. Capaian kinerja pada program ini Rp 996.352.513,- atau sebesar 109%. Pada program ini terdapat 2 kegiatan yaitu:

- a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dari nilai pagu sebesar Rp. 454.245.000,- terealisasi sebesar Rp. 399.140.837,- (87,87%). Output pada kegiatan ini yaitu luas lahan yang dikendalikan dengan target 220 ha, dan capaian kinerja pada akhir tahun 2020 seluas 209,80 ha lahan yang dikendalikan atau sebesar 105%.
- b. Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH) dan Bio Pestisida (BP) dari pagu Rp 280.060.000,- terealisasi Rp 269.256.055,- atau sebesar 96,14%. Output pada kegiatan ini adalah jumlah produk Agens Pengendali Hayati (APH) sebanyak 5.000 kg APH padat dan 500 Liter APH cair. Untuk APH cair telah dibuat sebanyak 500 Liter (100%). APH padat tidak dianggarkan untuk dibuat pada tahun 2020 dikarenakan stok APH padat pada tahun sebelumnya masih ada sebanyak 13.882 kg.

Tahun 2020 Dinas Perkebunan melaksanakan 11 (Sebelas) program pembangunan dan rutin dengan total anggaran sebesar **Rp. 26.209.830.285,50,-** dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 23.628.294.436,-** atau **90,15%** realisasi keuangan dan realisasi fisik **100%**.

Pada tahun 2021 Dinas Perkebunan melaksanakan 5 (Lima) Program pembangunan dan 1 (Satu) Program rutin dengan total anggaran sebesar **Rp. 54.524.471.000,-** dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan III mencapai **Rp.26.358.127.199,-** atau **62,65%**. Dengan estimasi realisasi sampai dengan Desember 2021 mencapai **Rp. 47.455.584.703,-** atau **87,03%**. Hal ini dikarenakan terdapat silpa positif yang berasal dari sisa pengadaan dan gaji pegawai.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan ditahun 2021 oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur baik untuk program rutin maupun teknis pembangunan adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** dari nilai pagu sebesar Rp. 25.609.668.880,- sampai dengan triwulan III terealisasi sebesar Rp. 15.708.171.190,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 61,33%. Indikator kinerja pada program ini yaitu Skor kepuasan masyarakat terhadap pelayanan urusan bidang perkebunan dengan target 86%. Capaian kinerja pada program ini 84,83%,- atau 98,64%. Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian** dari nilai pagu sebesar Rp. 10.009.000.800,- sampai dengan triwulan III terealisasi sebesar Rp. 6.411.961.196,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 64,06%. Indikator kinerja pada program ini yaitu:
 - a. Produksi komoditas perkebunan dengan target 17.136.849,15 Ton. Capaian kinerja pada indikator ini yakni 17.792.792 Ton atau 106,78%.
 - b. Jumlah benih beredar dengan target 6.000.000 benih. Capaian kinerja pada indikator ini yakni 5.627.144 benih atau 93,79%.
 - c. Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat dengan target 75%. Capaian kinerja pada indikator ini 0%. Hal ini dikarenakan capaian program dapat dihitung pada triwulan IV.Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
 - b) Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
3. **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian** dari nilai pagu sebesar Rp. 7.961.308.880,- sampai dengan triwulan III terealisasi sebesar Rp. 6.376.885.223,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 80,10%. Indikator kinerja pada program ini yaitu:

- a. Luas kebun yang dibangun dengan target 1.425.580 Ha. Capaian kinerja pada indikator ini yakni 1.540.488 Ha atau 108,06%.
- b. Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan dengan target 30 kelompok tani. Capaian kinerja pada indikator ini yakni 34 kelompok tani atau 113,33%.

Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- a) Penataan Prasarana Pertanian

4. **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian** dari nilai pagu sebesar Rp. 2.438.000.000,- sampai dengan triwulan III terealisasi sebesar Rp. 1.334.288.026,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 54,73%. Indikator kinerja pada program ini yaitu:

- a. Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan dengan target 4,079 Juta Ton CO₂Eq. Capaian kinerja pada indikator ini yakni 6,02 Juta Ton CO₂Eq atau 109,46%.
- b. Jumlah taksasi kerugian akibat serangan OPT dengan target Rp. 1.047.138.860,-. Capaian kinerja pada indikator ini yakni Rp. 942.424.900 atau 50,42%.

Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- a) Penataan Prasarana Pertanian

5. **Program Perizinan Usaha Pertanian Pertanian** dari nilai pagu sebesar Rp. 784.000.000,- sampai dengan triwulan III terealisasi sebesar Rp. 498.065.600,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 63,53%. Indikator kinerja pada program ini adalah Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP) dengan target 35 Perusahaan. Capaian kinerja pada indikator ini yakni 10 Perusahaan atau 28,57%.

Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- a) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

6. **Program Penyuluhan Pertanian** dari nilai pagu sebesar Rp. 3.850.000.000,- sampai dengan triwulan III terealisasi sebesar Rp. 2.005.699.421,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 52,10%. Indikator kinerja pada program ini adalah jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk dengan target 1 lembaga. Capaian

kinerja pada indikator ini yakni 0 lembaga atau 0%. Hal ini dikarenakan capaian program dapat dihitung pada triwulan IV.

Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
- b) Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
- c) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Tabel II.11. Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
			(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah	5,4	5,0	5,2	5,3	4,94*	5,0	5,2	5,3
	Nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan (miliar rupiah, atas dasar angka konstan)		18.773	19.087	20.493	21.997	17.288*	19.087	20.493	21.997
2.	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikasi ISPO	Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	48	53	58	63	72	62	58	63

No	Indikator	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
			(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Perusahaan)									
3.	NTP pekebun (%)	Meningkatnya kesejahteraan pekebun	92	108	110	112	124,59	145,79 **	100	100

*) Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur (Angka Sementara Tahun 2020)

**) Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur (September 2021)

Uraian Pencapaian Kinerja

1. Kontribusi Lapangan Usaha Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB

Tabel II.12 Distribusi PDRB ADHB Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (2012-2020)

Sektor/Lapangan Usaha			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 *	2020 **
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		5,65	7,00	7,72	8,22	7,98	7,89	7,91	8,77
	1	Pertanian, Peternakan dan Jasa Pertanian	3,36	4,55	5,35	5,35	5,36	5,25	5,26	5,97
	a	Tanaman Pangan	0,22	0,19	0,22	0,20	0,20	0,21	0,21	0,24
	b	Tanaman Hortikultura	0,26	0,33	0,34	0,36	0,33	0,34	0,35	0,39
	c	Tanaman Perkebunan	2,59	4,49	4,33	4,43	4,50	4,34	4,33	4,94
	d	Peternakan	0,25	0,26	0,31	0,32	0,30	0,31	0,33	0,36
	e	Jasa Pertanian dan Perburuan	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,05
	2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	1,11	1,16	1,33	1,34	1,16	1,17	1,12	1,13
	3	Perikanan	1,18	1,30	1,50	1,54	1,45	1,48	1,52	1,67

*Data sementara (Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur)

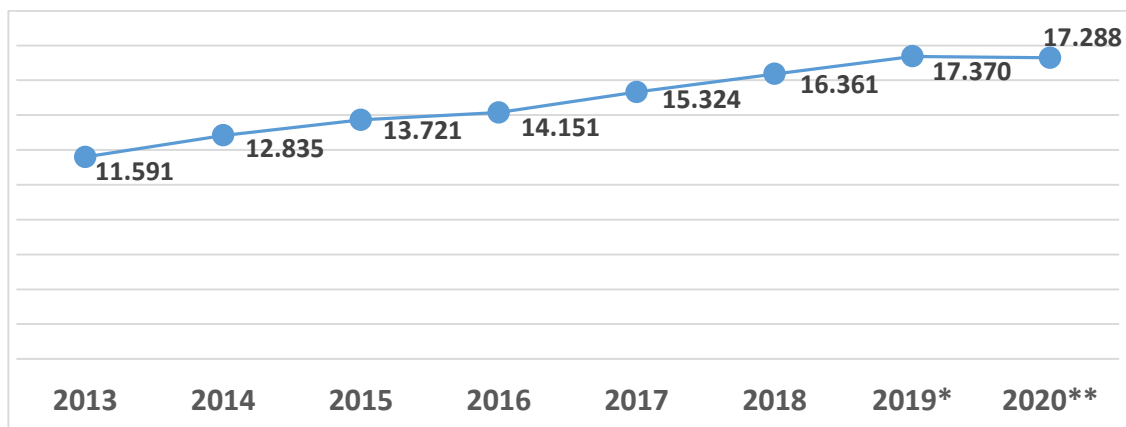
**Data sangat sementara (Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur)

Struktur perekonomian pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam 5 tahun terakhir didominasi oleh sub sektor perkebunan yang selalu mengalami peningkatan.

Angka sementara tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 4,94% atau 56,33% dari PDRB sektor pertanian dalam arti luas.

2. Nilai Produk Lapangan Usaha Sub Sektor Perkebunan

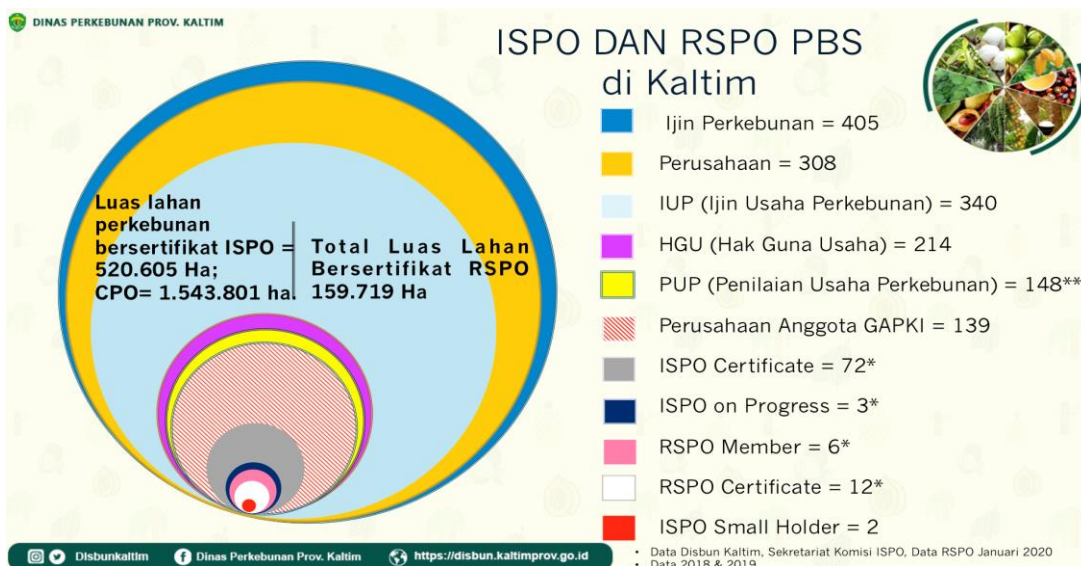
Nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 selalu mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,67% yang diakibatkan penurunan produksi di masa pandemi Covid-19. Berikut perkembangan nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan pada tahun 2013 sampai dengan 2020:



Gambar II.1

Nilai Produk Lapangan Usaha Sub Sektor Perkebunan Tahun 2013-2020

3. Sertifikasi Penilaian Usaha bagi Perusahaan Perkebunan



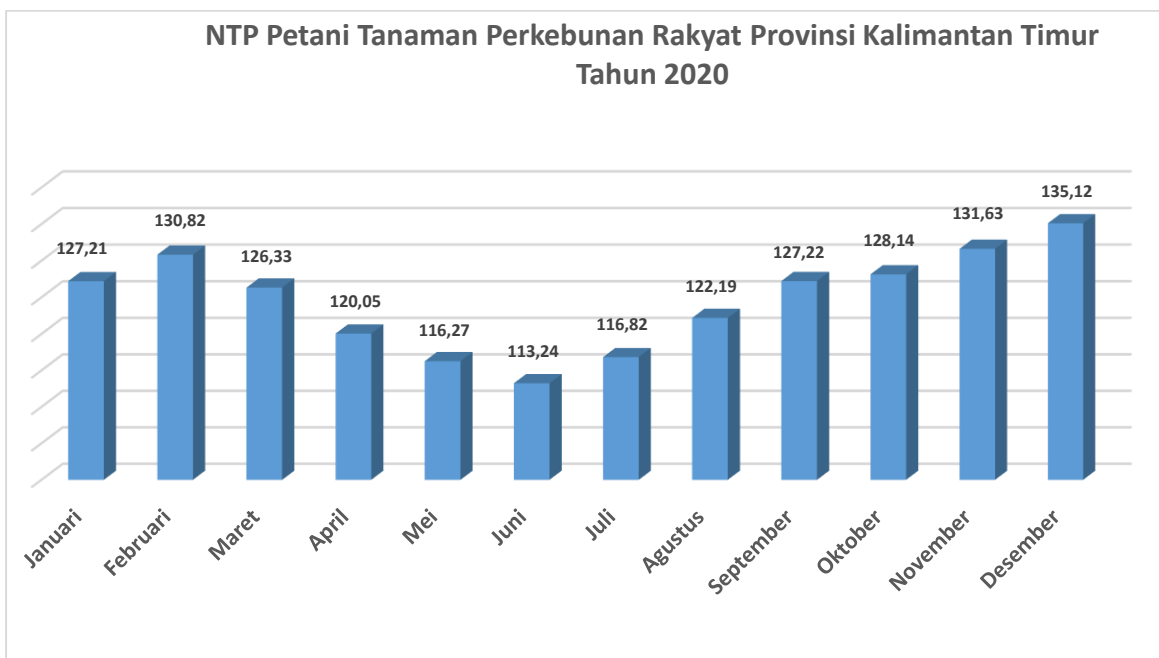
Gambar II.2

ISPO dan RSPO PBS di Kalimantan Timur Tahun 2020

Berdasarkan gambar II.2, pada tahun 2020 dari 308 Perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 72 Perusahaan telah mendapat sertifikat ISPO dengan luas 520.605 HA atau sekitar 42,38% dari total luas perkebunan sawit di Kalimantan Timur.

4. NTP Pekebun

Jika dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP), selama tahun 2020 rata-rata NTP sektor perkebunan sebesar 124,59%. NTP subsektor perkebunan rakyat terlihat cenderung mengalami peningkatan pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Perkembangan nilai NTP Petani Tanaman Perkebunan Rakyat dari Januari sampai dengan Desember 2020 sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar II.3
NTP Sektor Perkebunan Januari-Desember 2020

II. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan sejalan dengan amanat RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023.

Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur serta Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan dan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi berupa peluang dan ancaman juga kekuatan dan kelemahan yang ada terkait dengan dinamika lingkungan strategis, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Lambatnya realisasi pembangunan perkebunan yang menyebabkan rendahnya efisiensi pemanfaatan lahan pada pola ruang perkebunan

Dilihat dari berbagai aspek seperti potensi sumberdaya yang dimiliki, arah kebijakan pembangunan, potensi pasar domestik dan internasional produk-produk perkebunan, Kalimantan Timur memiliki potensi untuk mengembangkan sektor perkebunan.

Ruang wilayah Kalimantan Timur mengalami konflik ruang yang semakin meningkat, dimana terdapat 4,86 juta Ha tumpang tindih lahan perijinan antara kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Kesemrawutan pemanfaatan ruang wilayah Kalimantan Timur telah menyebabkan ketidakstabilan kondisi sosial dan ekonomi. Kehutanan, perkebunan dan pertambangan telah menguasai $\pm 88,47\%$ lahan di Kalimantan Timur, namun ketiga sektor tersebut membentuk struktur ekonomi daerah yang kurang kokoh, dan sangat rentan terhadap pengaruh perekonomian global.

Tingginya intensitas penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan perizinan di Kalimantan Timur pada akhirnya juga menyebabkan tumpang tindih perizinan antar sektor, baik izin pertambangan batubara dengan izin kehutanan, izin perkebunan dengan izin pertambangan batubara, maupun tumpang tindih perizinan lainnya.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan investasi di Kalimantan Timur adalah terkait dengan optimalisasi pemanfaatan lahan. Di sektor perkebunan, dari seluas $\pm 2,88$ Juta Ha total luas seluruh izin perkebunan di

Kalimantan Timur, baru sekitar $\pm 1,54$ Juta Ha atau 53,47% yang telah terdapat tanam tumbuh, berarti masih ada $\pm 46,53$ % luas wilayah izin perkebunan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Hasil analisis data bahwa hingga Akhir 2020, jumlah ijin lokasi perkebunan yang telah diterbitkan oleh Bupati di Kalimantan Timur mencapai 405 ijin seluas 2.888.609 hektar dari alokasi ruang untuk perkebunan berdasarkan RTRW Kaltim seluas 3.269.561 hektar, dari jumlah dan luas ijin lokasi tersebut yang telah memperoleh IUP sebanyak 340 IUP dengan luas 2.524.537 hektar. Sementara total luas kebun sawit hingga 2020 adalah 1.378.136 hektar termasuk didalamnya kebun Perusahaan Besar Negara (PBN), plasma dan swadaya. Data diatas menunjukan bawa terdapat 1,14 juta Ha IUP yang diberikan belum direalisasikan menjadi kebun kelapa sawit.

Tabel II.13 Pemanfaatan Lahan dan Realisasi Tanam Tahun 2020
Oleh Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Perkebunan

No.	Kabupaten/Kota	PEMANFAATAN LAHAN			
		Luas yang Telah Dibebani Ijin Perkebunan (Ha)	IUP (Ha)	HGU (Ha)	Realisasi Tanam Kebun Inti (ha)
1	2	3	4	5	6
1	Berau	281,725	204,725	127,918	100.891
2	Kutai Timur	814,128	745,307	384,100	357,059
3	Kutai Kertanegara	633,647	633,237	262,377	190.324
4	Kutai Barat	562,355	473,050	257,269	139.888
5	Mahakam Ulu	150,573	138,760	42,667	21.640
6	Penajam Paser Utara	82,552	82,639	29,258	27.992
7	Paser	363,629	246,819	154,214	101.116
8	Samarinda	-	-	-	-
9	Balikpapan	-	-	-	-
10	Bontang	-	-	-	20
	Jumlah	2,888,609	2,524,537	1,257,804	938.930

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2021)

Dari data diatas kita dapat menyimpulkan bahwa terjadi ketidak efisienan dalam pemanfaatan lahan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti tidak *clear* dan *clean* nya ijin yang diberikan kemudian menyebabkan permasalahan konflik lahan dan sesama perusahaan dan masyarakat yang menghambat laju penanaman. Atau juga terdapat praktek *landbanking* yang dilakukan perusahaan. Keadaan seperti ini meyebabkan iklim usaha yang tidak kondusif karena tertutupnya investasi baru dan kesulitan masyarakat dalam mengakses lahan karena lahan telah dibebani ijin.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan **“Lambatnya realisasi pembangunan perkebunan yang menyebabkan rendahnya efisiensi pemanfaatan lahan pada pola ruang perkebunan”** oleh pelaku usaha dipicu oleh beberapa akar masalah yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagian perijinan di sektor perkebunan belum clear dan clean;
- b. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban yang tertuang dalam IUP dan HGU belum optimal;
- c. Ijin Lokasi, IUP dan HGU yang tidak diusahakan belum ada upaya pencabutan;
- d. Pengawasan melalui sistem Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) kebun masa pembangunan dan operasional belum dilakukan sebagaimana mestinya;
- e. Masih banyak terjadi konflik usaha perkebunan;
- f. Koordinasi penerbitan ijin usaha perkebunan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap Pemerintah Provinsi belum terlaksana dengan baik;
- g. Belum seluruh Kabupaten/Kota menerapkan sistem evaluasi, pengawasan dan pelaporan yang modern berbasiskan IT dan spasial; dan
- h. Belum dilakukannya pencabutan izin atau pencabutan hak atas tanah pada perusahaan perkebunan yang tidak merealisasikan penanamannya.

2. Rendahnya produktivitas kebun rakyat

Sebagaimana dijelaskan di dalam RPJMD, keterbatasan lapangan usaha masyarakat berimplikasi pada fluktuasi pengangguran terbuka menjadi salah satu penyebab kesenjangan pendapatan masyarakat. Pengembangan usaha perkebunan

sawit yang menjadi unggulan daerah belum mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat sekitarnya. Pembangunan yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat masih belum berhasil mengentaskan kemiskinan atau hidup pra-sejahtera.

Kalimantan Timur mempunyai areal perkebunan yang cukup luas. Sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Timur di dominasi oleh subsektor perkebunan dengan komoditas utama tanaman kelapa sawit. Berdasarkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Sektor Perkebunan mendominasi sektor Pertanian dalam arti luas sebesar 56,33% (4,94% dari total PDRB Kaltim). Nilai ini masih dapat terus ditingkatkan dengan upaya meningkatkan produksi. Kendala yang dihadapi untuk meningkatkan produksi adalah rendahnya produktivitas perkebunan rakyat yang sebagian besar tanamannya sudah tua dan rusak, serta tidak diikuti dengan peremajaan dan pemeliharaan yang baik. Rincian produktivitas komoditi perkebunan rakyat tahun 2013-2020 pada tabel berikut:

Tabel II. 14 Produktivitas Perkebunan Rakyat Tahun 2013-2020

Komoditi	Produktivitas (Ton/Ha)								Potensi berdasar-kan PDKP
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kelapa Sawit	15.23	14.76	17.39	14.95	16.69	16.60	20.77	17.37	20.00
Karet	1.38	1.38	1.30	1.30	1.28	1.22	1.08	1.07	1.67
Kakao	0.90	0.71	0.77	0.55	0.50	0.55	0.57	0.61	1.00
Kelapa Dalam	0.65	0.56	0.68	0.63	0.80	0.75	0.67	0.47	1.50
Lada	1.05	1.03	1.06	0.72	0.99	1.05	0.91	0.59	1.20
Kopi	0.29	0.23	0.22	0.24	0.26	0.24	0.21	0.23	1.30

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa produktivitas perkebunan rakyat di Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki potensi untuk ditingkatkan, yaitu melalui intensifikasi, rehabilitasi maupun peremajaan.

Permasalahan “**Rendahnya produktivitas kebun rakyat**” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan permodalan;
- b. Infrastruktur jalan di areal perkebunan yang tidak memadai;
- c. Kesulitan dalam mendapatkan saprodi;
- d. Masih banyak pekebun yang belum bermitra dengan PBS;
- e. Penggunaan benih yang ilegal;
- f. Praktek budidaya yang tidak tepat; dan
- g. Kurangnya pendampingan dari tenaga penyuluh untuk mendampingi pekebun.

3. Pengembangan komoditas perkebunan non sawit belum optimal

Luas areal komoditi non sawit di Provinsi Kalimantan Timur seluas 161.316 Ha pada tahun 2019 dan 162.592 Ha pada tahun 2020. Berdasarkan data tersebut, areal komoditi non sawit mengalami kenaikan hingga mencapai 0,79%. Masih rendahnya pertumbuhan komoditi non sawit disebabkan oleh rendahnya minat petani terhadap komoditi non sawit, terbatasnya lahan pengembangan, ketersediaan benih, dan sulitnya pemasaran.

Permasalahan “**Pengembangan komoditas perkebunan non sawit belum optimal**” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Harga komoditas non sawit fluktuatif;
- b. Kerentanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit;
- c. Alih fungsi lahan ke komoditi lainnya;
- d. Rantai pemasaran komoditas non sawit belum berpihak kepada petani;
- e. Berkurangnya tenaga kerja pekebun; dan
- f. Terbatasnya lahan karena didominasi oleh perijinan usaha kelapa sawit.

4. Permasalahan pemasaran dan lambatnya pembangunan industri hilir komoditas perkebunan

Selama ini banyak permasalahan yang terjadi di tingkat pelaku utama karena tidak mampu memasarkan hasil produksinya serta keluhan harga ditingkat petani yang rendah. Pendekatan pembangunan perkebunan harus terintegrasi antara hulu hilir untuk memastikan keberlanjutan produksi yang menguntungkan. Pada saat pengembangan dan perluasan komoditas perkebunan hendaknya di barengi dengan penyiapan akses pasar dan lebih jauh mempersiapkan industri hilirnya untuk meningkatkan nilai tambah yang diterima petani. Pendekatan pasar dalam pengembangan perkebunan harus dilakukan, apabila pasar untuk komoditas perkebunan tersedia dan memberikan harga yang menguntungkan bagi pekebun maka dengan sendirinya masyarakat akan secara mandiri dan swadaya mengembangkan komoditas tersebut.

Sulitnya pemasaran ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur, kondisi ini terjadi karena para petani belum mengerti secara jelas mengenai upaya yang dapat dilakukannya khususnya pemasaran terhadap hasil-hasil produksinya, sehingga komoditi pertanian dapat terserap dipasaran dengan harga yang memadai. Masih banyak petani di desa-desa yang menjual hasil pertaniannya kepada "tengkulak". Padahal, pembelian dari pihak tengkulak ini dengan harga yang jauh dibawah harga yang menguntungkan bagi para petani. Karenanya, kemitraan yang dibangun para petani selaku pelaku utama dengan pelaku usaha yang baik tentunya akan memberikan patokan harga yang baik pula untuk hasil komoditinya bahkan menguntungkan, selain terhindar dari permainan harga yang dilakukan para tengkulak.

Petani pekebun selaku pelaku utama di sektor perkebunan belum dapat menjalin kemitraan yang baik dengan pelaku usaha. Padahal, hal ini penting dilakukan sebagai langkah untuk memudahkan pemasaran hasil komoditi kebunnya. Kemitraan ini perlu dibangun, karena pasar hasil komoditi pertanian akan semakin terbuka apabila para petani memiliki mitra atau pembeli (pihak yang memasarkan hasil pertanian) yang baik sehingga hasil komoditi pertanian terjamin pemasarannya.

Secara teori, inovasi berorientasi pasar dalam memanfaatkan sumberdaya dalam hal ini komoditas perkebunan merupakan persyaratan untuk kemajuan

ekonomi Kalimantan Timur berbasis ekonomi hijau. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah Industri perkebunan Kalimantan Timur masih minim inovasi pada pengembangan produk hilir. Hal itu salah satunya terjadi lantaran kurangnya akses ke petani swadaya, sehingga dalam mengolah produksi kelapa sawit masih menggunakan cara tradisional sehingga hasilnya menjadi kurang optimal. Kesulitan mengakses petani perkebunan berdampak pada terhambatnya inovasi dalam produktivitas industri hilir. Karenanya, sebagai salah satu cara mendorong inovasi adalah mendorong agar pemerintah bisa menyusun kebijakan yang mengarah pada pemberian insentif industri perkebunan hilir.

Industri hilir pertanian dalam arti luas belum banyak bertumbuh di Kalimantan Timur. Saat ini hasil perkebunan, sebagian besar dipasarkan sebagai komoditi primer. Sebagian produk perkebunan, utamanya sawit, telah diolah menjadi *Crude Palm Oil* (CPO), kakao masih dalam bentuk glondongan dan karet masih dalam bentuk *crumb rubber*, walaupun untuk *Palm Kernel Oil* (PKO) masih belum optimal diproduksi.

Permasalahan Pemasaran dan Lambatnya pembangunan industri Hilir Komoditas Perkebunan” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Sistem promosi yang belum berinovasi dan modern berbasis IT;
- b. Tidak kontinyu dan tidak padunya proses fasilitasi dan pendampingan kegiatan hulu hilir usaha perkebunan;
- c. Rendahnya kualitas olahan hasil perkebunan dan produk olahan yang dihasilkan tidak berorientasi pasar;
- d. Belum terpenuhinya alat dan mesin pengolahan hasil perkebunan sehingga dalam mengolah hasil perkebunan masih menggunakan alat dan mesin manual/ sederhana;
- e. Kurangnya sosialisasi dan pengenalan produk-produk olahan dan pemasaran komoditi perkebunan kepada petani pekebun yang ada di Kabupaten/ Kota;
- f. Terjadinya ekonomi dualistik antara perkebunan rakyat dengan perkebunan besar, maupun antara hulu dan hilir yang sering menimbulkan konflik;
- g. Rantai pemasaran produk perkebunan yang panjang;
- h. Tidak adanya jaminan harga yang adil bagi petani; dan

- i. Kawasan agro industri dan infrastruktur pendukungnya belum dikembangkan dengan baik.

5. Meningkatnya tuntutan pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan

Tutupan lahan bervegetasi semakin berkurang disebabkan oleh perluasan areal perkebunan dianggap salah satu faktor meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan menurunnya keanekaragaman hayati (biodiversiti). Namun, informasi yang memadai untuk menghitung tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan peringkatnya dari seluruh sektor untuk seluruh provinsi belum dimiliki, tetapi hanya tersedia tingkat emisi dari perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut tahun 2001-2012 di mana Kalimantan Timur menduduki peringkat keenam dibanding provinsi lain se-Indonesia (KLHK, 2015). Emisi GRK Kalimantan Timur pada periode tahun 2012-2015 cenderung fluktuatif dengan kecenderungan menurun.

Sebagaimana disebutkan dalam RPJMD Kalimantan Timur tahun 2019-2023, penurunan terutama terjadi karena terjadi emisi negatif (sekuistrasi bersih) pada sektor perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut pada tahun 2014 serta kecenderungan menurunnya emisi dari sektor energi. Pengikatan karbon (sekuistrasi) bersih sebesar 23 juta ton CO₂ pada tahun 2014 pada sektor lahan terutama terjadi karena tingginya kebun yang dibangun di atas lahan semak belukar dan lahan terbuka. Sekuistrasi bersih tersebut berhasil menutup seluruh emisi GRK pada tahun 2014 dan membuat emisi akumulatif pada periode 2012-2015 dari perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut hanya sekitar 50 juta ton CO₂ atau sekitar 12,5 juta ton CO₂ per tahun.

Pemanasan global (*global warming*), isu deforestasi dan ancaman perkebunan terhadap kehidupan flora fauna dilindungi menjadi isu lingkungan utama pada sektor perkebunan, isu ini di hembuskan baik seara lokal, regional, nasional dan global.

Pembangunan perkebunan berhubungan erat dengan isu-isu lingkungan hidup. Dengan luasan lahan yang tidak sedikit, keberhasilan maupun kegagalan dalam pengelolaan kebun berdampak luas terhadap kualitas lingkungan hidup di

Kalimantan Timur. Untuk itu, pembangunan perkebunan juga harus dikaitkan dengan upaya-upaya untuk meminimalisir kerusakan ekosistem. Ancaman kerusakan lingkungan hidup tidak hanya muncul terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perkebunan yang dapat diusahakan saja, akan tetapi tertuju pula pada kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai konservasi.

Oleh karenanya, dalam pengelolaan lingkungan pada sektor perkebunan harus mengikuti kaidah-kaidah pembangunan ramah lingkungan yang berkelanjutan.

Permasalahan **“Meningkatnya tuntutan pengelolaan perkebunan yang ramah lingkungan”** dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Adanya kampanye negatif terhadap kelapa sawit;
- b. Belum semua pihak memahami makna perkebunan yang berkelanjutan;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan lahan kritis di pola ruang perkebunan yang diperuntukkan bagi pembangunan perkebunan;
- d. Masih ada aktivitas pembangunan kebun rakyat di kawasan hutan;
- e. *Supply Chain* produksi kelapa sawit masih belum tertata dengan baik;
- f. Pengawasan dan penerapan Sanksi oleh penerbit izin usaha belum dilakukan sesuai peraturan yang berlaku;
- g. Komitmen perusahaan Perkebunan terhadap pengelolaan lingkungan masih beragam;
- h. Pemanfaatan limbah cair untuk pengembangan energi baru terbarukan belum optimal karena belum didukung oleh kebijakan ketenagalistrikan; dan
- i. Pengelolaan kawasan ANKT di kawasan perkebunan belum optimal.

6. Pengelolaan Data sektor Perkebunan masih lemah

Informasi dan data yang akurat merupakan suatu keharusan yang diperlukan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Demikian pula dalam pembangunan Perkebunan membutuhkan sistem pengelolaan data yang akurat untuk digunakan pada proses pemantauan, pengawasan dan evaluasi pembangunan perkebunan. Pengelolaan data ini tidak hanya cukup berisi data tabular variabel

kuantitatif dan waktu, namun harus dilengkapi dengan aspek spasial yang dapat menunjukkan lokasi dan ruang dimana kebun tersebut akan dan telah dibangun.

Padahal, pelaporan merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengetahui kinerja Dinas Perkebunan dan pelaksanaan pembangunan perkebunan. Apabila data-data yang disampaikan tidak akurat, maka masyarakat akan memperoleh informasi yang salah dan tentu saja akan membawa dampak buruk bagi Dinas Perkebunan.

Selain itu, aspek spasial diperlukan untuk melengkapi dan memverifikasi data dan informasi tabular. Selama ini pemanfaatan data spasial di Dinas Perkebunan terbatas pada saat pemberian pertimbangan teknis ijin yang akan diberikan namun pada saat evaluasi, pengawasan dan pembinaan aspek spasial belum banyak di dayagunakan. Untuk mengatasi tersebut diperlukan pengumpulan dan verifikasi dan pengolahan data perkebunan yang baik serta dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mengelola data detail seperti lokasi, luasan, produksi, rencana penanaman, sistem pengangkutan sampai pada data nilai ekonomi komoditas perkebunan.

Pada tahun 2018 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mengembangkan sistem pelaporan dan pelayanan secara online, yaitu : Web Gis Perkebunan, Sistem Informasi Pelaporan Perkebunan (SIP-Kebun) dan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) Online. Melalui sistem informasi tersebut, diharapkan akan menjadi jawaban atas semua permasalahan mengenai data dan informasi yang disediakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama ini belum terkelola dengan baik.

Akar permasalahan **“Pengelolaan Data sektor Perkebunan masih lemah”** dipicu oleh beberapa hal, diantaranya:

- a. Sistem pelayanan dan pelaporan yang masih manual, melalui prosedur yang panjang dan tidak update;
- b. Tingkat kepatuhan perusahaan perkebunan dalam menyampaikan laporan masih rendah;
- c. Mekanisme pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan belum didukung oleh deskripsi data yang rinci dan terintegrasi secara spasial;

- d. Kurangnya dukungan SDM dan infrastruktur dalam pengelolaan data di Kabupaten/ Kota;
- e. Perkebunan rakyat belum terdata dengan baik; dan
- f. Sistem pengelolaan data belum mengarah kepada integrasi pelaksanaan program kegiatan.

7. Masih rendahnya kapasitas institusi dan kelembagaan sektor perkebunan

Salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan. Permasalahan kelembagaan pemerintah masih menghadang meski berbagai upaya perbaikan telah dilakukan. Penataan kelembagaan untuk meningkatkan daya saing sub sektor perkebunan ditentukan oleh kerjasama sinergis (dan pembagian kerja) antar pengampu kepentingan, yaitu pemerintah atau masyarakat politik secara umum (*political society*), dunia usaha atau masyarakat bisnis (*business society*), dan masyarakat madani (*civil society*).

Peran pemerintah sangat strategis terutama dalam menyediakan infrastruktur dan perangkat regulasi agar pelaksanaan pengembangan sub sektor perkebunan benar-benar berjalan secara baik dan efisien. Kondisi ini sangat diperlukan, apalagi dalam menghadapi krisis multi dimensi yang terjadi saat ini. Kelembagaan yang ada masih belum mampu mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat, sekaligus mempertangguh struktur komoditas dan efisiensi dari seluruh rangkaian kegiatan. Kelembagaan petani masih lemah, baik dari aspek sosial maupun ekonomi.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan **“masih rendahnya kapasitas institusi dan kelembagaan sektor perkebunan”** dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya regenerasi SDM di sektor Perkebunan;
- b. Perangkat Daerah (PD) yang menangani Perkebunan di Kabupaten/Kota bergabung dengan sub sektor lain;
- c. Mutasi dan rotasi pegawai pada Dinas yang menangani Perkebunan di Kabupaten/ Kota menyebabkan kurang efektifnya koordinasi pelaksanaan pembangunan perkebunan;

- d. Masih lemahnya keberpihakan Lembaga keuangan untuk pengembangan komoditas Perkebunan;
- e. Perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan perkebunan belum optimal;
- f. Belum optimalnya dukungan SDM dan sarana prasarana;
- g. Belum terbentuknya lembaga korporasi pekebun; dan
- h. Kurangnya fasilitasi dan pendampingan kelembagaan pekebun.

8. Terdampaknya usaha perkebunan akibat pandemi Covid-19

Pada bulan Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia mengumumkan masuknya kasus Covid-19 di Indonesia. Penyebaran virus corona atau Covid-19 di dunia, termasuk ke Indonesia berdampak ke sejumlah sektor usaha di Tanah Air. Mulai dari pariwisata hingga perdagangan, termasuk sektor pertanian. Namun demikian sektor perkebunan mampu bertahan dan dapat tumbuh positif serta menjadi penggerak dan pemulih ekonomi di masa Covid-19. Sub sektor perkebunan memiliki nilai ekonomi yang dapat membuat Kalimantan Timur bertahan dari kontraksi ekonomi. Hal tersebut karena sektor perkebunan memproduksi kebutuhan primer yang selalu menjadi kebutuhan sehari-hari. Namun demikian dampak covid-19 menyebabkan terganggunya usaha perkebunan baik secara langsung maupun tidak langsung. Terutama dari terjadinya perubahan supply dan demand yang mempengaruhi harga komoditas perkebunan ditingkat petani.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan “**Terdampaknya usaha perkebunan akibat Covid-19**” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

a. Fluktuasi Harga Pasar

Ketika melihat meningkatnya tingkat kepedulian, rekomendasi untuk “Jarak Sosial,” mengurangi perjalanan, menghindari keramaian, penutupan dan praktik perlindungan lainnya untuk memperlambat penyebaran Covid-19, konsumen akan membuat pilihan sulit tentang makanan, makan jauh dari rumah, dan tidak normalnya pengeluaran. Tentu situasi ini akan menciptakan

pasar dan transaksi tidak normal, sehingga akan mempengaruhi stabilitas *supply* dan *demand* barang dan jasa serta harga yang dimungkinkan meningkat.

b. Rantai Pasokan Melambat dan Kekurangan

Karena logistik terganggu dan upaya-upaya memperlambat penyebaran virus, seperti penurunan *supply* dan *demand* CPO yang berakibat pula pada penurunan ekspor CPO ke sejumlah negara tujuan ekspor yang menerapkan *lockdown*.

c. Kesehatan Petani

Petani adalah populasi yang relatif lebih tua, dibandingkan dengan populasi pekerja umum. Sensus pada pelaku agri tahun 2017 menunjukkan usia rata-rata operator pertanian hampir 58 tahun usianya, setidaknya sepuluh tahun lebih tua dari pekerja di sebagian besar sektor lainnya. Tidak seperti pekerja industri lainnya, operator pertanian, 26% berusia 65 tahun ke atas. 11,7% penuh dari operator pertanian utama berusia 75 tahun ke atas. Jika Covid-19 ini tidak terbendung hingga menembus petani dampaknya dan menimbulkan kepanikan aktivitas akan menambah keterpurukan produksi pangan. Data dari negara lain yang telah melakukan pengujian yang lebih luas menunjukkan bahwa Covid-19 memiliki tingkat keparahan yang jauh lebih tinggi bagi mereka yang berusia 60-an dan lebih tua, yang berarti bahwa rekomendasi pencegahan dan perlindungan harus menjadi perhatian serius pemerintah serta kesadaran masyarakat untuk waspada.

d. Meningkatnya PHK dan Pengangguran

Terjadinya penurunan jumlah pekerja di beberapa usaha perkebunan akibat diterapkannya protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

9. Belum siapnya industri hilir untuk mendukung ketersediaan pangan dan energi hijau untuk IKN

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang didalamnya juga menyangkut atau bersamaan dengan keputusan pemerintah untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Hal ini merupakan peluang bagi Kalimantan Timur untuk mempersiapkan diri menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Dalam hal ini peluang terbesar adalah penyediaan pangan dan

energi hijau berbasis kelapa sawit seperti yang tertuang dalam RPJMN dan RKP tahun 2022.

Kalimantan Timur memiliki keunggulan komparatif dari produksi CPO kelapa sawit sampai dengan tahun 2020 sebanyak 3,89 juta Ton. Namun demikian masih ditemui kendala dalam hal mengoptimalkan pengolahan menjadi produk olahan pangan dan energi terbarukan *green fuel* berbasis kelapa sawit. Sementara itu, untuk komoditas lainnya seperti: kakao, aren, lada, dan kelapa dalam dirasa belum mencukupi dalam aspek produksi dan pengolahannya untuk memenuhi kebutuhan pangan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan **“Belum siapnya industri hilir untuk mendukung ketersediaan pangan dan energi hijau IKN”** dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:

- a. Produksi komoditas non sawit masih belum tercukupi luas dan produktivitasnya;
- b. Minat investasi masih didominasi oleh usaha pembangunan kebun dan sangat sedikit investasi pada industri pengolahan;
- c. Tingginya biaya produksi yang disebabkan oleh rendahnya fasilitas infrastruktur yang menyebabkan inefisiensi ekonomi yang menghambat minat investor untuk berinvestasi di industri pengolahan subsektor perkebunan; dan
- d. Kebijakan dan regulasi di sektor energi dan listrik menghambat inisiatif perusahaan perkebunan untuk mengembangkan energi berbasis bio massa dan limbah kelapa sawit.

II. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Perkebunan Kalimantan Timur

Meningkatkan pelayanan merupakan suatu tantangan untuk menjadi lebih baik kondisi umum dilihat dari analisis SWOT (*Strenght-Weakness-Oportunity-Treat*) terhadap Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

1. Kekuatan (*Strengths*) yang dimiliki :

- Ketersediaan ruang/lahan yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota untuk

pengembangan subsektor perkebunan;

- Komitmen dan motivasi kerja pegawai cukup kuat;
- Ketersediaan anggaran dan fasilitas penunjang tupoksi yang cukup memadai;
- Kualitas SDM aparatur Dinas Perkebunan cukup memadai;
- Dukungan dari mitra Pembangunan dan LSM dalam pengembangan perkebunan;
- Tersedianya kawasan areal perkebunan yang cukup luas; dan
- Kontribusi subsektor perkebunan terhadap pembangunan daerah cenderung meningkat.

2. Peluang (*Opportunities*) yang dimiliki :

- Kebijakan antara kebijakan pusat dan daerah di bidang perkebunan;
- Strategi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan transformasi ekonomi berbasis pengelolaan SDA terbarukan;
- Potensi sumber daya lahan cukup luas dan didukung partisipasi pelaku usaha perkebunan yang positif;
- Iklim investasi dan peluang pasar terhadap produk perkebunan kondusif;
- Adanya pengaruh globalisasi yang memudahkan jaringan dan akses pemasaran komoditi perkebunan;
- Ketergantungan masyarakat akan komoditi perkebunan cukup tinggi;
- Pemenuhan pangan dan energi hijau untuk pemenuhan Ibu Kota Negara (IKN) baru; dan
- Dukungan kebijakan dan regulasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja.

3. Kelemahan (*Weaknesses*) yang dimiliki :

- Belum lengkap dan akuratnya *database* tentang kondisi dan potensi pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur;
- Koordinasi antar unit kerja internal belum optimal;
- Alih fungsi lahan perkebunan dan tata ruang pembangunan;
- Belum tersusunnya pola karir dan pengembangan pegawai;
- Lemahnya penegakan hukum;
- Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan *stakeholder* belum berjalan baik;

- Perijinan sektor perkebunan banyak yang tidak *clear* dan *clean*;
- Pelaksanaan pembangunan perkebunan belum didukung dengan perencanaan yang akurat;
- Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan masih rendah;
- Lambatnya regenerasi untuk menggantikan pegawai yang memasuki usia pensiun; dan
- Rendahnya produktivitas kebun dan rendahnya nilai tambah hasil perkebunan.

4. Ancaman (*Threats*) yang dimiliki :

- Praktek perijinan usaha perkebunan di masa lalu yang tidak tertib menimbulkan permasalahan tumpang tindih peruntukan lahan dan menyebabkan konflik;
- Kolaborasi pelaksanaan program/kegiatan untuk mendukung usaha perkebunan antar OPD belum optimal;
- Persepsi LSM tentang isu kerusakan lingkungan akibat pembangunan perkebunan;
- Adanya tuntutan global untuk penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor landbase;
- Isu kehilangan keanekaragaman hayati akibat pembukaan lahan untuk perkebunan;
- Infrastruktur jalan pada areal perkebunan masih terbatas;
- Berkurangnya tenaga kerja subsektor perkebunan;
- Fluktuasi harga komoditas perkebunan yang tidak dapat dikendalikan;
- Lambatnya hilirisasi untuk menampung dan mengolah produk hasil perkebunan; dan
- Terhambatnya usaha perkebunan akibat pandemi Covid-19.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi masa depan untuk peningkatan mutu dan kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

- a. Peningkatan komitmen dan motivasi kerja untuk mendukung kebijakan Pusat dan Daerah bidang perkebunan;
- b. Pemberdayaan kualitas dan peningkatan kuantitas SDM Aparatur dalam mengelola potensi sumber daya lahan dan pelaku usaha perkebunan secara optimal;
- c. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar satuan kerja, baik internal maupun eksternal;

- d. Optimalisasi pemanfaatan pola ruang subsektor perkebunan;
- e. Fokus pada pelaksanaan pembangunan kawasan perkebunan berpasis korporasi yang mengintegrasikan aspek hulu hilir;
- f. Penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan program kegiatan yang tepat untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan perkebunan secara berkelanjutan;
- g. Peningkatan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur;
- h. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkret, inovatif, partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi hulu hilir berorientasi hasil untuk menyelesaikan permasalahan yang berdampak langsung kepada masyarakat;
- i. Penguatan kelembagaan yang menangani sub sector perkebunan di Kabupaten/Kota; dan
- j. Tersedia nya anggaran yang memadai untuk pencapaian target indikator Program/Kegiatan yang telah ditetapkan.

II. 5. Review Terhadap Rancangan RKPD

Terlihat bahwa untuk program – program prioritas seperti Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; Program perizinan Usaha Pertanian; dan Program Penyuluhan Pertanian yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan PD telah terakomodasi dalam Rancangan RKPD (Tabel TC. 31).

II. 6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan pemerintah daerah dalam spesifikasi subsektoral perkebunan merupakan upaya Dinas Perkebunan dalam mengatasi permasalahan dan mengantisipasi isu-isu strategi yang berkembang untuk pencapaian tujuan dan sasaran renstra maupun pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur.

Program pembangunan subsektor perkebunan merupakan kristalisasi kebijakan dari strategi Dinas Perkebunan sesuai amanah dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun

2019-2023. Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program maupun kegiatan-kegiatan yang mampu menjawab tantangan pemerintah daerah ke depan sehingga setiap permasalahan dapat di atasi dan isu-isu strategis akan menjadi daya dorong akselerasi pencapaian pembangunan daerah.

Adapun program-program prioritas subsektor perkebunan yang langsung berkaitan dan menjadi program prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam dokumen RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Produksi Perkebunan;
2. Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca;
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan;
4. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
5. Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian;
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
7. Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
8. Program perizinan Usaha Pertanian; dan
9. Program Penyuluhan Pertanian.

Berikut beberapa program dan kegiatan yang akan disinkronkan pada forum perangkat dengan OPD Kabupaten/Kota yang diakomodir dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi			Dukungan PD Terkait	Alasan	Keterangan
			Kabupaten/Kota	Rancangan Provinsi	Usulan Kabupaten/Kota			
Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Produksi komoditas perkebunan (Ton)	18.126.490,20	Semua Kabupaten/Kota	18.126.490,20	11.691.736			
	Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit)	18.020.894		18.020.894	11.653.680			
			Kutai Kartanegara	3.378.872	3.378.872			
			Kutai Timur	7.802.225	7.802.225			
			Kutai Barat	1.101.352				
			Mahakam Hulu	2.330.418				
			Penajam Paser Utara	2.353.958	472.583			
			Paser	917.950				
			Berau	124.872				
			Samarinda	10.456				
			Balikpapan	460				
			Bontang	331				
	Produksi Komoditi Perkebunan (karet)	81.651		81.651	20.521			
			Kutai Kartanegara	15.443	15.443			
			Kutai Timur	1.484	1.484			
			Kutai Barat	43.106				
			Mahakam Hulu	208				
			Penajam Paser Utara	11.484	3.594			
			Paser	4.929				
			Berau	-				
			Samarinda	656				
			Balikpapan	4.341				
			Bontang	-				
	Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa)	12.500		12.500	8.660			
			Kutai Kartanegara	5.496	5.496			
			Kutai Timur	1.064	1.064			
			Kutai Barat	225				
			Mahakam Hulu	1.544				
			Penajam Paser Utara	1.117	2.100			
			Paser	2.296				
			Berau	6				
			Samarinda	199				
			Balikpapan	536				
			Bontang	17				
	Produksi Komoditi Perkebunan (kakao)	4.368		4.368	2.503			
			Kutai Kartanegara	95	95			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi			Dukungan PD Terkait	Alasan	Keterangan
			Kabupaten/Kota	Rancangan Provinsi	Usulan Kabupaten/Kota			
			Kutai Timur	2.404	2.404			
			Kutai Barat	32				
			Mahakam Hulu	1.278				
			Penajam Paser Utara	7	4			
			Paser	6				
			Berau	536				
			Samarinda	7				
			Balikpapan	3				
			Bontang	-				
	Produksi Komoditi Perkebunan (lada)	7.077		7.077	6.372			
			Kutai Kartanegara	4.293	4.293			
			Kutai Timur	134	134			
			Kutai Barat	6				
			Mahakam Hulu	1.297				
			Penajam Paser Utara	16				
			Paser	1.226	1.945			
			Berau	-				
			Samarinda	14				
			Balikpapan	91				
			Bontang	-				
	Produksi Komoditi Perkebunan (pala)	0,20		0,20	-			
			Kutai Kartanegara	-				
			Kutai Timur	-				
			Kutai Barat	-				
			Mahakam Hulu	-				
			Penajam Paser Utara	-				
			Paser	-				
			Berau	0,20				
			Samarinda	-				
			Balikpapan	-				
			Bontang	-				
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	19,3 Ton/Ha	Semua Kabupaten/Kota	19,30				
Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit)	21 Ton/Ha	Semua Kabupaten/Kota	21				
	- Intensifikasi Kelapa Sawit	200 Ha		61	200			
			Kutai Kartanegara	61	150			Usulan Kab. akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan teknis
			Kutai Timur	-				
			Kutai Barat	-				
			Mahakam Hulu	-				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi			Dukungan PD Terkait	Alasan	Keterangan
			Kabupaten/Kota	Rancangan Provinsi	Usulan Kabupaten/Kota			
			Penajam Paser Utara	-	50			Usulan Kab. akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan teknis
			Paser	-				
			Berau	-				
			Samarinda	-				
			Balikpapan	-				
			Bontang	-				
	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1,45 Ton/Ha	Semua Kabupaten/Kota	1,45				
	- Intensifikasi Karet	200 Ha		280	100			
			Kutai Kartanegara	50	50			Usulan Kab. akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan teknis
			Kutai Timur	-				
			Kutai Barat	-				
			Mahakam Hulu	-				
			Penajam Paser Utara	-	50	APBN 200 Ha		Usulan Kab. akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan teknis
			Paser	200		APBN 200 Ha		
			Berau	-				
			Samarinda	30				
			Balikpapan	-				
			Bontang	-				
	- Peremajaan Karet	100 Ha		-	-			
			Kutai Kartanegara					
			Kutai Timur					
			Kutai Barat			APBN 400 Ha		
			Mahakam Hulu					
			Penajam Paser Utara					
			Paser			APBN 200 Ha		
			Berau					
			Samarinda					
			Balikpapan					
			Bontang					
	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0,85 Ton/Ha	Semua Kabupaten/Kota	0,85				
	- Intensifikasi Kelapa	20 Ha		20	40			
			Kutai Kartanegara	-	20			Usulan Kab. akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan teknis
			Kutai Timur	-				
			Kutai Barat	-				
			Mahakam Hulu	-				
			Penajam Paser Utara	20	20			Usulan Kab. akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan teknis
			Paser	-				
			Berau	-				
			Samarinda	-				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi			Dukungan PD Terkait	Alasan	Keterangan
			Kabupaten/Kota	Rancangan Provinsi	Usulan Kabupaten/Kota			
			Balikpapan	-				
			Bontang	-				
	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0,80 Ton/Ha	Semua Kabupaten/Kota	0,80				
	- Intensifikasi Kakao	180 Ha		50	-			
			Kutai Kartanegara	-				
			Kutai Timur	-				
			Kutai Barat	-				
			Mahakam Hulu	-				
			Penajam Paser Utara	-				
			Paser	-				
			Berau	50				
			Samarinda	-				
			Balikpapan	-				
			Bontang	-				
	- Peremajaan Kakao	50 Ha		50	-			
			Kutai Kartanegara	-				
			Kutai Timur	-				
			Kutai Barat	-				
			Mahakam Hulu	-				
			Penajam Paser Utara	-				
			Paser	-				
			Berau	50				
			Samarinda	-				
			Balikpapan	-				
			Bontang	-				
	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1,19 Ton/Ha	Semua Kabupaten/Kota	1,19				
	- Intensifikasi lada	200 Ha		140	100			
			Kutai Kartanegara	40	40			Usulan Kab. akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan teknis
			Kutai Timur	-				
			Kutai Barat	-		APBN 100 Ha		
			Mahakam Hulu	-				
			Penajam Paser Utara	-	60			Usulan Kab. akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan teknis
			Paser	-				
			Berau	100		APBN 100 Ha		
			Samarinda	-				
			Balikpapan	-				
			Bontang	-				
	- Rehabilitasi Lada	50 Ha		-	-			
			Kutai Kartanegara			APBN 100 Ha		
			Kutai Timur					
			Kutai Barat					
			Mahakam Hulu					

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi			Dukungan PD Terkait	Alasan	Keterangan
			Kabupaten/Kota	Rancangan Provinsi	Usulan Kabupaten/Kota			
			Penajam Paser Utara					
			Paser					
			Berau			APBN 100 Ha		
			Samarinda					
			Balikpapan					
			Bontang					
	Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Dokumen	Provinsi	1				
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan (Kelompok Tani)	30		30	13			
			Kutai Kartanegara	6	6			
			Kutai Timur	5	5			
			Kutai Barat	6				
			Mahakam Hulu	-				
			Penajam Paser Utara	2	2			
			Paser	4				
			Berau	5				
			Samarinda	2				
			Balikpapan	-				
			Bontang	-				
	Luas kebun yang dibangun (Ha)	1.462.645		1.462.645	789.625			
			Kutai Kartanegara	280.395	280.395			
			Kutai Timur	509.230	509.230			
			Kutai Barat	204.692				
			Mahakam Hulu	156.070				
			Penajam Paser Utara	211.702				
			Paser	65.291				
			Berau	26.347				
			Samarinda	2.785				
			Balikpapan	5.974				
			Bontang	159				
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang di perluas (Ha)	695 Ha		695				
Perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	200 Ha		150	100			
			Kutai Kartanegara	50	50			Usulan Kab. akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan teknis
			Kutai Timur	-				
			Kutai Barat	-				
			Mahakam Hulu	-				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi			Dukungan PD Terkait	Alasan	Keterangan
			Kabupaten/Kota	Rancangan Provinsi	Usulan Kabupaten/Kota			
			Penajam Paser Utara	50	50			Usulan Kab. akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan teknis
			Paser	50				
			Berau	-				
			Samarinda	-				
			Balikpapan	-				
			Bontang	-				
	Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)	100 Ha		62	100			
			Kutai Kartanegara	62	62			Usulan Kab. akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan teknis
			Kutai Timur	-				
			Kutai Barat	-		APBN 200 Ha		
			Mahakam Hulu	-				
			Penajam Paser Utara	-	38			Usulan Kab. akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan teknis
			Paser	-				
			Berau	-				
			Samarinda	-				
			Balikpapan	-				
			Bontang	-				
	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)	20 Ha		-	20			
			Kutai Kartanegara		20			Usulan Kab. akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan teknis
			Kutai Timur					
			Kutai Barat					
			Mahakam Hulu					
			Penajam Paser Utara					
			Paser					
			Berau					
			Samarinda					
			Balikpapan					
			Bontang					
	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)	100 Ha		51	25			
			Kutai Kartanegara	-				
			Kutai Timur	25	25	APBN 400 Ha		Usulan Kab. akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan teknis
			Kutai Barat	-				
			Mahakam Hulu	-				
			Penajam Paser Utara	-				
			Paser	-				
			Berau	-		APBN 200 Ha		
			Samarinda	26				
			Balikpapan	-				
			Bontang	-				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi			Dukungan PD Terkait	Alasan	Keterangan
			Kabupaten/Kota	Rancangan Provinsi	Usulan Kabupaten/Kota			
	Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet)	200 Ha		195	81			
			Kutai Kartanegara	81	81			Usulan Kab. akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan teknis
			Kutai Timur	-				
			Kutai Barat	100				
			Mahakam Hulu	-				
			Penajam Paser Utara	-				
			Paser	-				
			Berau	-				
			Samarinda	14				
			Balikpapan	-				
			Bontang	-				
	Jumlah luas kebun yang di perluas (Pala)	50 Ha		50	50			
			Kutai Kartanegara	-				
			Kutai Timur	50	50			Usulan Kab. akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan teknis
			Kutai Barat	-				
			Mahakam Hulu	-				
			Penajam Paser Utara	-				
			Paser	-				
			Berau	-		APBN 50 Ha		
			Samarinda	-				
			Balikpapan	-				
			Bontang	-				
	Jumlah luas kebun yang di perluas (Aren)	25 Ha		25	25			
			Kutai Kartanegara	-				
			Kutai Timur	25	25	APBN 50 Ha		Usulan Kab. akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan teknis
			Kutai Barat	-				
			Mahakam Hulu	-				
			Penajam Paser Utara	-				
			Paser	-				
			Berau	-				
			Samarinda	-				
			Balikpapan	-				
			Bontang	-				
Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,067 Ton CO2eq	Semua Kabupaten/Kota	4,067				
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi:	135		135	45			
	a. Mitigasi GRK (pelaku usaha)	130		130	45			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi			Dukungan PD Terkait	Alasan	Keterangan
			Kabupaten/Kota	Rancangan Provinsi	Usulan Kabupaten/Kota			
			<i>Kutai Kartanegara</i>	32	32	<i>Disbun Kab dan mitrakerja</i>		
			<i>Kutai Timur</i>	35	10	<i>Disbun Kab dan mitrakerja</i>		
			<i>Kutai Barat</i>	15		<i>Disbun Kab dan mitrakerja</i>		
			<i>Mahakam Hulu</i>	3		<i>Disbun Kab dan mitrakerja</i>		
			<i>Penajam Paser Utara</i>	3	3	<i>Disbun Kab dan mitrakerja</i>		
			<i>Paser</i>	12		<i>Disbun Kab dan mitrakerja</i>		
			<i>Berau</i>	30		<i>Disbun Kab dan mitrakerja</i>		
			<i>Samarinda</i>	-				
			<i>Balikpapan</i>	-				
			<i>Bontang</i>	-				
	<i>b.Penanganan Konflik usaha perkebunan (pelaku usaha)</i>	5	<i>Semua Kabupaten/Kota</i>	5				
Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Pertanian, Hortikultura, dan perkebunan	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	1 PMS		1	-			
			Kutai Kartanegara	-				
			Kutai Timur	-				
			Kutai Barat	1			PBS yang sudah Study Kelayakan	
			Mahakam Hulu	-				
			Penajam Paser Utara	-				
			Paser	-				
			Berau	-				
			Samarinda	-				
			Balikpapan	-				
			Bontang	-				
	Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi	102.500 Ha		102.500	35.100			
			Kutai Kartanegara	22.700	22.700	Disbun Kab dan mitrakerja		Kawasan ANKT
			Kutai Timur	42.000	10.000	Disbun Kab dan mitrakerja		Kawasan ANKT
			Kutai Barat	8.500		Disbun Kab dan mitrakerja		Kawasan ANKT
			Mahakam Hulu	1.000		Disbun Kab dan mitrakerja		Kawasan ANKT
			Penajam Paser Utara	2.400	2.400	Disbun Kab dan mitrakerja		Kawasan ANKT

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi			Dukungan PD Terkait	Alasan	Keterangan
			Kabupaten/Kota	Rancangan Provinsi	Usulan Kabupaten/Kota			
			Paser	9.100		Disbun Kab dan mitrakerja		Kawasan ANKT
			Berau	16.800		Disbun Kab dan mitrakerja		Kawasan ANKT
			Samarinda	-				
			Balikpapan	-				
			Bontang	-				
Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina	15 KTPA		15	10			
			Kutai Kartanegara	2	2	Disbun Kab dan mitrakerja		Pembentukan dan kemitraan
			Kutai Timur	2	5	Disbun Kab dan mitrakerja		Pembentukan dan kemitraan
			Kutai Barat	2		Disbun Kab dan mitrakerja		Pembentukan dan kemitraan
			Mahakam Hulu	2		Disbun Kab dan mitrakerja		Pembentukan dan kemitraan
			Penajam Paser Utara	2	2	Disbun Kab dan mitrakerja		Pembentukan dan kemitraan
			Paser	2		Disbun Kab dan mitrakerja		Pembentukan dan kemitraan
			Berau	2		Disbun Kab dan mitrakerja		Pembentukan dan kemitraan
			Samarinda	1	1	Disbun Kab dan mitrakerja		Pembentukan dan kemitraan (Lokasi di Berambai)
			Balikpapan	-				
			Bontang	-				
	Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani	5 Konflik	Semua Kabupaten/Kota	5				
Program perizinan Usaha Pertanian	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan		35	20			
			Kutai Kartanegara	5	5			
			Kutai Timur	10	10			
			Kutai Barat	3				
			Mahakam Hulu	-				
			Penajam Paser Utara	5	5			Pelaksanaan PUP 2021 Bulan Juni
			Paser	10				
			Berau	2				
			Samarinda					
			Balikpapan					
			Bontang					

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi			Dukungan PD Terkait	Alasan	Keterangan
			Kabupaten/Kota	Rancangan Provinsi	Usulan Kabupaten/Kota			
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (perusahaan)	97 Perusahaan		97	46			
			Kutai Kartanegara	21	21			
			Kutai Timur	26	15			
			Kutai Barat	10				
			Mahakam Hulu	2				
			Penajam Paser Utara	10	10			
			Paser	16				
			Berau	12				
			Samarinda					
			Balikpapan					
			Bontang					
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan izin usaha pertanian	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan	45 Lembaga Pekebun		45	16			
			Kutai Kartanegara	5	5			
			Kutai Timur	14	5			
			Kutai Barat	5				
			Mahakam Hulu					
			Penajam Paser Utara	6	6			
			Paser	11				
			Berau	4				
			Samarinda					
			Balikpapan					
			Bontang					
	Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina	52 Perusahaan		52	31			
			Kutai Kartanegara	10	10			
			Kutai Timur	16	15			
			Kutai Barat	5				
			Mahakam Hulu	1				
			Penajam Paser Utara	6	6			
			Paser	10				
			Berau	4				
			Samarinda					
			Balikpapan					
			Bontang					
Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (lembaga)	1 Lembaga		1	1			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi			Dukungan PD Terkait	Alasan	Keterangan
			Kabupaten/Kota	Rancangan Provinsi	Usulan Kabupaten/Kota			
			Kutai Kartanegara	1	1			
			Kutai Timur	-				
			Kutai Barat	-				
			Mahakam Hulu	-				
			Penajam Paser Utara	-				
			Paser	-				
			Berau	-				
			Samarinda	-				
			Balikpapan	-				
			Bontang	-				
	Jumlah produk perkebunan yang bersertifikat SNI	1 Produk		1	1	Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota, Kemenkumham		
			Kutai Kartanegara	1	1			
			Kutai Timur	-				
			Kutai Barat	-				
			Mahakam Hulu	-				
			Penajam Paser Utara	-				
			Paser	-				
			Berau	-				
			Samarinda	-				
			Balikpapan	-				
			Bontang	-				
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya (Orang)	25 Orang		25	10			
			Kutai Kartanegara	4	4			
			Kutai Timur	4	4			
			Kutai Barat	2				
			Mahakam Hulu	2				
			Penajam Paser Utara	2	2			
			Paser	3				
			Berau	4				
			Samarinda	3				
			Balikpapan	1				
			Bontang	-				
Pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	1 Kegiatan	Semua Kabupaten Kota	1				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi			Dukungan PD Terkait	Alasan	Keterangan
			Kabupaten/Kota	Rancangan Provinsi	Usulan Kabupaten/Kota			
Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya (kelompok tani)	31 KT		31	14			
			Kutai Kartanegara	7	7			
			Kutai Timur	5	5			
			Kutai Barat	6				
			Mahakam Hulu	-				
			Penajam Paser Utara	2	2			
			Paser	4				
			Berau	5				
			Samarinda	2				
			Balikpapan	-				
			Bontang	-				
	Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan (Unit)	1 Unit		-	-			
			Kutai Kartanegara					
			Kutai Timur					
			Kutai Barat					
			Mahakam Hulu					
			Penajam Paser Utara					
			Paser					
			Berau					
			Samarinda					
			Balikpapan					
			Bontang					
	Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan	5 Unit		-	2			
			Kutai Kartanegara					
			Kutai Timur					
			Kutai Barat					
			Mahakam Hulu					
			Penajam Paser Utara		2			
			Paser					
			Berau					
			Samarinda					
			Balikpapan					
			Bontang					
Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Jumlah jenis olahan produk perkebunan yang teradopsi dan disebarluaskan (produk)	5 produk		5	4	Bappeda, Disbun Kab./kota, Disperindakop dan Koperasi Kab./kota, Diskes Kab./Kota		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi			Dukungan PD Terkait	Alasan	Keterangan
			Kabupaten/Kota	Rancangan Provinsi	Usulan Kabupaten/Kota			
			Kutai Kartanegara	1	1			
			Kutai Timur	1	1			
			Kutai Barat	-				
			Mahakam Hulu	-				
			Penajam Paser Utara	1	2			
			Paser	1				
			Berau	-				
			Samarinda	-				
			Balikpapan	1				
			Bontang	-				
	Jumlah produk olahan unggulan yang dipromosikan dan dipasarkan (Produk)	9 Produk		13		Disperindagkop Prov & Kab/Kota, DPMPTSP Prov & Kab/Kota, Dinas Pariwisata Prov & Kab/Kota, Bappeda Prov & Kab/Kota		gula aren, lada bubuk, kopi jahe, lada jahe, gula semut, air nira, VCO, minyak kelapa, scrub kelapa, air sirup kelapa, es kelapa kopyor, kelapa serut, gula aren jahe merah
			Kutai Kartanegara	5	5			gula aren, lada bubuk, kopi bubuk, gula semut, gula aren jahe merah
			Kutai Timur	2	2			coklat batangan, gula aren
			Kutai Barat	1				gula aren
			Mahakam Hulu					
			Penajam Paser Utara	8	4			lada bubuk, gula aren, kelapa serut, jahe lada, minyak kelapa, VCO, scrub kelapa, sirup air kelapa
			Paser	3				gula aren, kopi bubuk, jahe bubuk
			Berau	3				coklat batang, coklat bubuk, coklat liquor
			Samarinda	7				gula aren, air nira, gula semut, VCO, kopi jahe lada, jahe lada, es kelapa kopyor
			Balikpapan	1				lada bubuk putih
			Bontang	-				
Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani	20 Pertemuan		20	5			
			Kutai Kartanegara	5	5			
			Kutai Timur	4				
			Kutai Barat	4				
			Mahakam Hulu	-				
			Penajam Paser Utara	1				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi			Dukungan PD Terkait	Alasan	Keterangan
			Kabupaten/Kota	Rancangan Provinsi	Usulan Kabupaten/Kota			
			Paser	2				
			Berau	2				
			Samarinda	2				
			Balikpapan	-				
			Bontang	-				
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk (Lembaga)	20 Lembaga		20	4			
			Kutai Kartanegara	4	4			
			Kutai Timur	3				
			Kutai Barat	4				
			Mahakam Hulu	-				
			Penajam Paser Utara	2				
			Paser	3				
			Berau	3				
			Samarinda	1				
			Balikpapan	-				
			Bontang	-				
	Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI (kelompok tani)	4 KT		-	-			
			Kutai Kartanegara					
			Kutai Timur					
			Kutai Barat					
			Mahakam Hulu					
			Penajam Paser Utara					
			Paser					
			Berau					
			Samarinda					
			Balikpapan					
			Bontang					
Pembentukan dan penguatan kelembagaan koorporasi petani	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk	28 Lembaga		20	9			
			Kutai Kartanegara	4	4			
			Kutai Timur	3	3			
			Kutai Barat	4				
			Mahakam Hulu	-				
			Penajam Paser Utara	2	2			
			Paser	3				
			Berau	3				
			Samarinda	1				
			Balikpapan	-				
			Bontang	-				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi			Dukungan PD Terkait	Alasan	Keterangan
			Kabupaten/Kota	Rancangan Provinsi	Usulan Kabupaten/Kota			
Pendampingan manajemen koorporasi petani	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina	5 Unit		5	2	Bappeda, Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota		
			Kutai Kartanegara	-				
			Kutai Timur	4	2			
			Kutai Barat	1				
			Mahakam Hulu	-				
			Penajam Paser Utara	-				
			Paser	-				
			Berau	-				
			Samarinda	-				
			Balikpapan	-				
			Bontang	-				
	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi kemitraan usaha atau jaringan pemasaran produk perkebunannya (pelaku usaha)	5 pelaku usaha		8	3	Disperindagkop Prov & Kab/Kota, DPMPTSP Prov & Kab/Kota, Dinas Pariwisata Prov & Kab/Kota, Bappeda Prov & Kab/Kota		
			Kutai Kartanegara	1	1			
			Kutai Timur	1	1			
			Kutai Barat	1				
			Mahakam Hulu	-				
			Penajam Paser Utara	2	1			
			Paser	1				
			Berau	-				
			Samarinda	2				
			Balikpapan	-				
			Bontang	-				
Penilaian kelayakan dan standarisasi manajemen koorporasi petani	Jumlah pengujian sampel produk hasil perkebunan yang diuji dengan pengujian laboratorium yang berstandar SNI	6 Kali		6	3	Bappeda, Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota		
			Kutai Kartanegara	2	2			
			Kutai Timur	3	1			
			Kutai Barat	-				
			Mahakam Hulu	-				
			Penajam Paser Utara	-				
			Paser	-				
			Berau	1				
			Samarinda	-				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi			Dukungan PD Terkait	Alasan	Keterangan
			Kabupaten/Kota	Rancangan Provinsi	Usulan Kabupaten/Kota			
			Balikpapan	-				
			Bontang	-				
Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani	Jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani	1 Pertemuan		1	2			
			Kutai Kartanegara	-				
			Kutai Timur	-	2			
			Kutai Barat	-				
			Mahakam Hulu	-				
			Penajam Paser Utara	-				
			Paser	-				
			Berau	1				
			Samarinda	-				
			Balikpapan	-				
			Bontang	-				
Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah benih yang beredar	6.000.000 Benih	Semua Kabupaten Kota	6.000.000				
<i>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</i>	<i>Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi</i>	<i>6.000.000 Benih</i>	<i>Semua Kabupaten/Kota</i>	<i>6.000.000</i>		<i>Dinas yang membidangi perkebunan di kab/kota Provinsi Kalimantan Timur, Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi Kalimantan Utara, KORWAS POLDA KALTIM</i>	<i>Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan</i>	<i>adanya laporan dari masyarakat dan draft MOU</i>
Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih	Jumlah Benih yang Disertifikasi	3.000.000 Benih	Semua Kabupaten/Kota	3.000.000		Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan	Draft MOU

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi			Dukungan PD Terkait	Alasan	Keterangan
			Kabupaten/Kota	Rancangan Provinsi	Usulan Kabupaten/Kota			
Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Persentase Peredaran Benih yang Illegitim	2,08%	Semua Kabupaten/Kota	2,08%		Dinas yang membidangi perkebunan di kab/kota Provinsi Kalimantan Timur, KORWAS POLDA KALTIM	Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan	Berdasarkan laporan dari masyarakat, draft MOU
ProgramPengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT	916.648.000	Semua Kabupaten/Kota	916.648.000				
<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</i>	<i>Luas serangan berat OPT yang dikendalikan (Ha)</i>	<i>195 Ha</i>	<i>Semua Kabupaten/Kota</i>	<i>195</i>				
Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah luas serangan OPT yang dikendalikan (Ha)	195 Ha		195	95			
			Kutai Kartanegara	35	35			Usulan penambahan petugas pengamat OPT
			Kutai Timur	15	15			
			Kutai Barat	22				
			Mahakam Hulu	13				
			Penajam Paser Utara	37	45			
			Paser	37				
			Berau	13				
			Samarinda	5				
			Balikpapan	13				
			Bontang	5				
	Jumlah kelembagaan OPT yang dibina (Lembaga)	2 Lembaga		2	2			
			Kutai Kartanegara	-	1			
			Kutai Timur	1	1			
			Kutai Barat	-				
			Mahakam Hulu	-				
			Penajam Paser Utara	1				
			Paser	-				
			Berau	-				
			Samarinda	-				
			Balikpapan	-				
			Bontang	-				
	Jumlah APH yang Diperbanyak (KG)	1.000 KG	Provinsi	1.000				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi			Dukungan PD Terkait	Alasan	Keterangan
			Kabupaten/Kota	Rancangan Provinsi	Usulan Kabupaten/Kota			
	Jumlah APH yang Diperbanyak (Liter)	600 Liter	Provinsi	600				
	Jenis APH yang dikembangkan (Jenis)	2 Jenis	Provinsi	2				
Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	80%	Provinsi	80%				
<i>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</i>	<i>Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan</i>	<i>50.000 Benih</i>	<i>Provinsi</i>	<i>50.000</i>				
Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Jumlah Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar	30.000 Benih	Provinsi	30.000				
	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa sawit)	10.000 Benih		10.000				Lokasi KM 38 Loa Janan dan KM 29m Samboja Kab. Kukar
	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (karet)	10.000 Benih		10.000				Lokasi KM 41 Loa Janan Kab. Kukar
	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa)	0 Benih		-				
	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kakao)	0 Benih		-				
	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (aren)	10.000 Benih		10.000				Lokasi UPTD PBTP Karang Asam Samarinda
	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah	20.000 Benih	Provinsi	20.000				
	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (lada)	10.000 Benih		10.000				Lokasi KM 41 Loa Janan Kab. Kukar
	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (pala)	10.000 Benih		10.000				Lokasi UPTD PBTP Karang Asam Samarinda
	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (sereh wangi)	0 Benih		-				



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.T Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 736852 Kode Pos 75124
Website : <https://disbun.kaltimprov.go.id>, e-mail : <ppid@disbun.kaltimprov.go.id>
S A M A R I N D A

BERITA ACARA

Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 050/1686/Sekrt-2021

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Penyampaian Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 oleh Ir. Ujang Rachmad, M.Si Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Pemaparan materi Arah Kebijakan Pembangunan Kalimantan Timur pada RKPD 2022 disampaikan oleh Ir. Hj. Hidayanti Darma, M.P Kepala Sub Bidang Pertanian dan Perikanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan Perangkat Daerah Lainnya.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 24 Maret 2021

Jam : 17.00 Wita

Tempat : Golden Tulip Balikpapan Hotel and Suites

forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

MENYEPAKATI

- KESATU : Menyepakati program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan sub kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
- KEDUA : Menyepakati rancangan Renja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;

- KETIGA : Menyepakati daftar usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
- KEEMPAT : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur beserta seluruh Dinas yang menangani Perkebunan Kabupaten/Kota siap melaksanakan kegiatan pemulihan pasca pandemic Covid-19 yang akan berdampak pada social dan ekonomi, Penerapan masterplan kawasan perkebunan berbasis korporasi petani dan Manajemen kegiatan dari hulu hingga hilir yang diintegrasikan dalam program/ kegiatan pembangunan perkebunan;
- KELIMA : Mengusulkan kepada Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengakomodasi penganggaran untuk pelaksanaan RENJA Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
- KEENAM : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I, II, III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita cara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ini; dan
- KETUJUH : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun 2022.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 24 Maret 2021




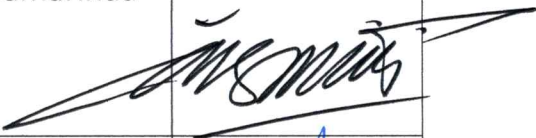


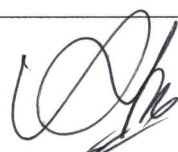

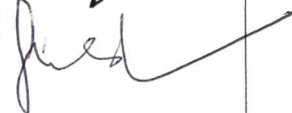
Pimpinan Sidang,
Kepala Dinas Perkebunan Prov.Kaltim




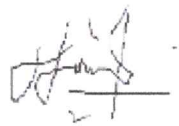









Ir. Ujang Rachmad, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19690120 199403 1 014

Menyetujui,
Wakil peserta FORUM Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah Provinsi/
Kabupaten/Kota

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan/ Alamat	Tanda Tangan
1.	Ir. Surya Dharma Herman, M.Si	Disbun Prov.Kaltim	Samarinda	
2.	Siti Wahyuni, SH, M.Adm KP	Disbun Prov.Kaltim	Samarinda	
3.	Ir. Asmirilda, MP	Disbun Prov.Kaltim	Samarinda	
4.	Taufiq Kurrahman, S.Hut, M.Si	Disbun Prov.Kaltim	Samarinda	
5.	Andi Siddik, SP, M.Ling	UPTD PBP Disbun Prov.Kaltim	Samarinda	
6.	Ir. Hj. Rr. Zuraida H. Hapsari, MP	UPTD P2TP Disbun Prov.Kaltim	Samarinda	
7.	Suluh Dewanto, SP	UPTD PBTP Disbun Prov.Kaltim	Samarinda	
8.	Abdul Halik, SP	Dinas Pertanian Kab. PPU	PPU	
9.	Dra. Sulastri	Dinas Pertanian dan Tan. Pangan Kota Samarinda	Samarinda	

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan/ Alamat	Tanda Tangan
10.	Mujito	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan	Balikpapan	
11.	Nurul Huda, SP, M.Si	Dinas Perkebunan Kab. Kukar	Tenggarong	
12.	Ir. H. Yus Alwi Rahman, M.Si	Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan	Samarinda	
13.	Amran Arief	Dinas Perkebunan Kab. Kutim	Sanggata	
14.	Akhmad Masnoorsyah	Dinas Kehutanan Prov.Kaltim	Samarinda	
15.	Fadli Sufiani	Dinas Peternakan dan Keswan Prov. Kaltim	Samarinda	
16.	Javelina Punuh	YKAN	Jakarta	
17.	Wembri Suska	BPS Prov.Kaltim	Samarinda	
18.	Bahrin, S.Hut	Earthworm	Samarinda	
19.	Panthom Priyandoko	KalFor- KLHK/UNDP	Samarinda	

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan/ Alamat	Tanda Tangan
20.	Sony Yuwono	Jellung Cons	Semarang	

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERKEBUNAN TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
	DINAS+3 UPTD				55.456.711.248	64.020.663.608
	DINAS PERKEBUNAN				46.508.261.898	53.311.076.228
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	89%	92%	25.220.470.898	28.387.000.228
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	72	74	1.289.172.000	1.675.924.000
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	10 Dokumen	10 Dokumen	552.771.000	718.603.000
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	4 Laporan	4 Laporan	736.401.000	957.321.000
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	16.462.909.298	18.099.516.228
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan	28 Dokumen	28 Dokumen	16.010.069.298	17.611.076.228
		Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan	12 Laporan	12 Laporan		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	452.840.000	488.440.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	20%	936.032.000	909.150.000
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas (Stell)	356 stell	135 stell	352.032.000	33.750.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	50 Orang	50 Orang	584.000.000	584.000.000
3.27.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian		1 Kegiatan		150.200.000
3.27.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian (Kegiatan)		1 Kegiatan		141.200.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	5 Unit	5 Unit	1.835.147.254	2.252.433.728
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	114 Unit	114 Unit	35.991.708	48.000.000
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	4 Unit	4 Unit	167.310.000	368.750.000
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	12 Bulan	352.514.181	295.000.000
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan		
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	47.240 Lembar	47.240 Lembar	69.731.365	121.683.728

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.500 Eksemplar	1.500 Eksemplar	9.600.000	24.000.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.200.000.000	1.395.000.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	9 Jenis	10 Jenis	888.487.500	1.282.400.000
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	34 Unit	34 Unit	888.487.500	1.282.400.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	3 Jenis	2.634.801.146	2.745.446.272
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	750 Lembar	750 Lembar	30.000.000	30.000.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	494.401.410	582.000.000
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	1 Unit	304.192.000	305.180.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	1.806.207.736	1.828.266.272
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	1.173.921.700	1.422.130.000
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	21 Unit	21 Unit	612.129.700	644.500.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2 Unit	2 Unit	349.932.000	567.630.000
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	9 Unit	9 Unit	211.860.000	210.000.000
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Produksi komoditas perkebunan (Ton)	18.126.490,20	18.313.874,25	7.600.000.000	8.000.000.000
		Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit)	18.020.894	18.197.504		
		Produksi Komoditi Perkebunan (karet)	81.651	90.000		
		Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa)	12.500	12.853		
		Produksi Komoditi Perkebunan (kakao)	4.368	5.000		
		Produksi Komoditi Perkebunan (lada)	7.077	8.517		
		Produksi Komoditi Perkebunan (pala)	0,20	0,25		
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	19,3 Ton/Ha	20,03 Ton/Ha	7.600.000.000	8.000.000.000
3.27.02.1.01.01	Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit)	21 Ton/Ha	22 Ton/Ha	7.600.000.000	8.000.000.000
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1,45 Ton/Ha	1,50 Ton/Ha		
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0,85 Ton/Ha	0,90 Ton/Ha		
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0,80 Ton/Ha	0,85 Ton/Ha		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (lada)	1,19 Ton/Ha	1,20 Ton/Ha		
		Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen		
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan (Kelompok Tani)	30	30	7.368.900.000	8.723.782.000
		Luas kebun yang dibangun (Ha)	1.462.645	1.500.674		
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang di perluas (Ha)	695 Ha	695 Ha	7.368.900.000	8.723.782.000
3.27.03.1.01.01	Perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	200 Ha	200 Ha	7.368.900.000	8.723.782.000
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)	100 Ha	100 Ha		
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)	20 Ha	20 Ha		
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)	100 Ha	100 Ha		
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet)	200 Ha	200 Ha		
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Pala)	50 Ha	50 Ha		
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Aren)	25 Ha	25 Ha		
3.27.05	Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,067 Ton CO2eq	4,044 Ton CO2eq	1.220.000.000	1.737.265.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi:	135	137	1.220.000.000	1.737.265.000
		a. Mitigasi GRK (pelaku usaha)	130	132		
		b. Penanganan Konflik usaha perkebunan (pelaku usaha)	5	5		
3.27.05.1.01.02	Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Pertanian, Hortikultura, dan perkebunan	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	1 PMS	1 PMS	650.000.000	965.000.000
		Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi	102.500 Ha	103.000 Ha		
3.27.05.1.01.03	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina	15 KTPA	15 KTPA	570.000.000	772.265.000
		Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani	5 Konflik	5 Konflik		
3.27.06	Program perizinan Usaha Pertanian	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	35 Perusahaan	950.000.000	1.290.066.000
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (perusahaan)	97 Perusahaan	107 Perusahaan	950.000.000	1.290.066.000
3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan izin usaha pertanian	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan	45 Lembaga Pekebun	55 Lembaga Pekebun	950.000.000	1.290.066.000
		Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina	52 Perusahaan	52 Perusahaan		
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (lembaga)	1 Lembaga	1 Lembaga	4.148.891.000	5.172.963.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
		Jumlah produk perkebunan yang bersertifikat SNI	1 Produk	1 Produk		
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petugas Lapangan dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya (Orang)	25 Orang	25 Orang	426.131.000	426.131.000
3.27.07.1.01.01	Pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	426.131.000	426.131.000
3.27.07.1.02	Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya (kelompok tani)	31 KT	31 KT	1.783.825.000	2.395.165.000
		Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan (Unit)	1 Unit	1 Unit		
		Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan	5 Unit	7 Unit		
3.27.07.1.02.01	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Jumlah jenis olahan produk perkebunan yang teradopsi dan disebarluaskan (produk)	5 produk	5 produk	1.250.000.000	1.861.340.000
		Jumlah jenis olahan hasil perkebunan	-	-		
		Jumlah promosi yang diikuti	-	-		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
		Jumlah produk olahan unggulan yang dipromosikan dan dipasarkan (Produk)	9 Produk	11 Produk		
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani	20 Pertemuan	20 Pertemuan	533.825.000	533.825.000
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk (Lembaga)	20 Lembaga	20 Lembaga	1.938.935.000	2.351.667.000
		Jumlah kelompok tani yang produhnya memenuhi SNI (kelompok tani)	4 KT	4 KT		
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk	28 Lembaga	32 Lembaga	552.475.000	552.475.000
3.27.07.1.03.02	Pendampingan manajemen korporasi petani	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina	5 Unit	7 Unit	850.000.000	1.121.976.000
		Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi kemitraan usaha atau jaringan pemasaran produk perkebunannya (pelaku usaha)	5 pelaku usaha	7 pelaku usaha		
3.27.07.1.03.03	Penilaian kelayakan dan standarisasi manajemen korporasi petani	Jumlah pengujian sampel produk hasil perkebunan yang diuji dengan pengujian laboratorium yang berstandar SNI	6 Kali	6 Kali	300.000.000	440.756.000
3.27.07.1.03.04	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani	Jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani	1 Pertemuan	1 Pertemuan	236.460.000	236.460.000
UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN					2.946.308.950	3.388.254.380

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	89%	92%	1.539.532.450	1.688.254.380
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	92.520.000	92.520.000
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	92.520.000	92.520.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	20%	158.990.000	183.450.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	18 Orang	18 Orang	158.990.000	183.450.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	294.022.117	409.034.048
3.27.01.1.06.01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Unit	12 Unit	4.500.000	6.500.000
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	4 Unit	4 Unit	24.980.000	35.000.000
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	12 Bulan	61.701.617	66.493.548
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan		
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	500 Lembar	500 Lembar	7.000.500	7.000.500

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	720 Eksemplar	720 Eksemplar	3.840.000	3.840.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	192.000.000	290.200.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6 Jenis	6 Jenis	413.900.000	360.000.000
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	15 Unit	15 Unit	413.900.000	360.000.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	3 Jenis	435.339.733	437.339.732
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	240 Lembar	240 Lembar	2.400.000	2.400.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	86.977.605	86.977.604
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4 Unit	4 Unit	188.750.000	190.750.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	157.212.128	157.212.128
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	144.760.600	205.910.600

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	2 Unit	35.910.600	35.910.600
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	4 Unit	4 Unit	90.000.000	145.000.000
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	4 Unit	4 Unit	18.850.000	25.000.000
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah benih yang beredar	6.000.000 Benih	6.000.000 Benih	1.406.776.500	1.700.000.000
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi	6.000.000 Benih	6.000.000 Benih	1.406.776.500	1.700.000.000
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih	Jumlah Benih yang Disertifikasi	3.000.000 Benih	3.000.000 Benih	654.782.900	750.000.000
3.27.02.1.02.04	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Persentase Peredaran Benih yang Illegitim	2,08%	1,58%	751.993.600	950.000.000
		Jumlah Benih yang Disertifikasi				
3.27.03	Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Kantor yang Tersedia	2 Unit	1 Unit	-	-
3.27.03.1.01	Pentaaan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian	2 Unit	1 Unit	-	-
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin gedung UPTD Pertanian serta sarana pendukungnya	Jumlah bangunan gedung dan Laboratorium yang direhab	2 Unit	1 Unit	-	-
UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN					3.500.333.000	4.021.333.000
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	89%	92%	2.055.904.600	2.450.333.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	92.520.000	92.520.000
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	92.520.000	92.520.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	20%	95.200.000	95.200.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	8 Orang	8 Orang	95.200.000	95.200.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	420.980.917	444.259.771
3.27.01.1.06.01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	75 Unit	75 Unit	10.699.946	10.699.946
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	1 Unit	17.600.000	17.600.000
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	12 Bulan	77.777.300	78.886.850
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan		
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	13.100 Lembar	13.100 Lembar	24.783.671	25.952.975
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8 Eksemplar	12 Eksemplar	5.120.000	5.120.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	285.000.000	306.000.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	9 Jenis	9 Jenis	367.934.800	766.532.346
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	21 Unit	21 Unit	367.934.800	766.532.346
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	3 Jenis	495.410.883	513.410.883
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	395 Lembar	395 Lembar	3.950.000	3.950.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	185.782.355	203.782.355
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	1 Unit	148.466.400	148.466.400
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	157.212.128	157.212.128
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	583.858.000	538.410.000
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	1 Unit	35.510.000	35.510.000
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Unit	1 Unit	509.328.000	459.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	4 Unit	4 Unit	39.020.000	43.900.000
3.27.05	ProgramPengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT	916.648.000	774.940.000	1.444.428.400	1.571.000.000
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas serangan berat OPT yang dikendalikan (Ha)	195 Ha	156 Ha	1.444.428.400	1.571.000.000
3.27.05.1.01.01	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah luas serangan OPT yang dikendalikan (Ha)	195 Ha	156 Ha	1.444.428.400	1.571.000.000
		Jumlah kelembagaan OPT yang dibina (Lembaga)	2 Lembaga	2 Lembaga		
		Jumlah APH yang Diperbanyak (KG)	1.000 KG	1.000 KG		
		Jumlah APH yang Diperbanyak (liter)	600 liter	600 liter		
		Jenis APH yang dikembangkan (Jenis)	2 Jenis	2 Jenis		
UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN					2.501.807.400	3.300.000.000
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	89%	92%	983.464.992	1.635.000.000
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	92.520.000	101.772.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	92.520.000	101.772.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	20%	95.360.000	104.896.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	12 Orang	12 Orang	95.360.000	104.896.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	268.815.973	381.197.570
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	33 Buah	30 Buah	2.703.273	2.973.600
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	3 Unit	3 Unit	2.475.000	2.722.500
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	12 Bulan	61.165.200	67.281.720
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan		
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3.000 Lembar	3.000 Lembar	5.552.500	6.107.750
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Eksemplar	12 Eksemplar	1.920.000	2.112.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	15 Kegiatan	15 Kegiatan	195.000.000	300.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	0 Jenis	2 Jenis	-	120.000.000
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	0 Unit	4 Unit	-	120.000.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	3 Jenis	407.984.019	525.604.617
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	300 Lembar	400 Lembar	3.000.000	4.000.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	92.987.659	102.286.425
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	1 Unit	129.231.200	200.000.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	182.765.160	219.318.192
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	118.785.000	401.529.813
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	2 Unit	36.510.000	40.161.000
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Unit	1 Unit	44.000.000	319.266.313
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	13 Unit	13 Unit	38.275.000	42.102.500

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	80%	85%	1.518.342.408	1.665.000.000
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan	50.000 Benih	50.000 Benih	1.518.342.408	1.665.000.000
3.27.02.1.02.04	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Jumlah Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar	30.000 Benih	30.000 Benih	1.518.342.408	1.665.000.000
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa sawit)	10.000 Benih	15.000 Benih		
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (karet)	10.000 Benih	0 Benih		
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa)	0 Benih	10.000 Benih		
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kakao)	0 Benih	5.000 Benih		
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (aren)	10.000 Benih	0 Benih		
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah	20.000 Benih	20.000 Benih		
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (lada)	10.000 Benih	10.000 Benih		
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (pala)	10.000 Benih	10.000 Benih		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
			0 Benih	0 Benih		
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (serih wangi)				

DAFTAR KEGIATAN LINTAS PERANGKAT DAERAH DAN LINTAS WILAYAH
 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 TAHUN 2022

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Sesuai Permendagri 90	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi			Dukungan PD Terkait	Alasan	Keterangan
				Kabupaten/Kota	Rancangan Provinsi	Usulan Kabupaten/Kota			
DINAS PERKEBUNAN									
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Produksi komoditas perkebunan (Ton)	18.126.490,20	Semua Kabupaten/Kota	18.126.490,20	11.691.736			
		Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit)	18.020.894		18.020.894	11.653.680			
				Kutai Kartanegara	3.378.872	3.378.872			
				Kutai Timur	7.802.225	7.802.225			
				Kutai Barat	1.101.352				
				Mahakam Hulu	2.330.418				
				Penajam Paser Utara	2.353.958	472.583			
				Paser	917.950				
				Berau	124.872				
				Samarinda	10.456				
				Balikpapan	460				
				Bontang	331				
		Produksi Komoditi Perkebunan (karet)	81.651		81.651	20.521			
				Kutai Kartanegara	15.443	15.443			
				Kutai Timur	1.484	1.484			
				Kutai Barat	43.106				
				Mahakam Hulu	208				
				Penajam Paser Utara	11.484	3.594			
				Paser	4.929				
				Berau	-				
				Samarinda	656				
				Balikpapan	4.341				
				Bontang	-				
		Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa)	12.500		12.500	8.660			
				Kutai Kartanegara	5.496	5.496			
				Kutai Timur	1.064	1.064			
				Kutai Barat	225				
				Mahakam Hulu	1.544				
				Penajam Paser Utara	1.117	2.100			
				Paser	2.296				
				Berau	6				
				Samarinda	199				

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Permendagri 90	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi			Dukungan PD Terkait	Alasan	Keterangan
				Kabupaten/Kota	Rancangan Provinsi	Usulan Kabupaten/Kota			
				Balikpapan	536				
				Bontang	17				
		Produksi Komoditi Perkebunan (kakao)	4.368		4.368	2.503			
				Kutai Kartanegara	95	95			
				Kutai Timur	2.404	2.404			
				Kutai Barat	32				
				Mahakam Hulu	1.278				
				Penajam Paser Utara	7	4			
				Paser	6				
				Berau	536				
				Samarinda	7				
				Balikpapan	3				
				Bontang	-				
		Produksi Komoditi Perkebunan (lada)	7.077		7.077	6.372			
				Kutai Kartanegara	4.293	4.293			
				Kutai Timur	134	134			
				Kutai Barat	6				
				Mahakam Hulu	1.297				
				Penajam Paser Utara	16				
				Paser	1.226	1.945			
				Berau	-				
				Samarinda	14				
				Balikpapan	91				
				Bontang	-				
		Produksi Komoditi Perkebunan (pala)	0,20		0,20	-			
				Kutai Kartanegara	-				
				Kutai Timur	-				
				Kutai Barat	-				
				Mahakam Hulu	-				
				Penajam Paser Utara	-				
				Paser	-				
				Berau	0,20				
				Samarinda	-				
				Balikpapan	-				
				Bontang	-				
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	19,3 Ton/Ha	Semua Kabupaten/Kota	19,30				
3.27.02.1.01.01	Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit)	21 Ton/Ha	Semua Kabupaten/Kota	21				
		- Intensifikasi Kelapa Sawit	200 Ha		61	200			
				Kutai Kartanegara	61	150			Usulan Kab. akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan teknis
				Kutai Timur	-				

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Permendagri 90	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi			Dukungan PD Terkait	Alasan	Keterangan
				Kabupaten/Kota	Rancangan Provinsi	Usulan Kabupaten/Kota			
				Kutai Barat	-				
				Mahakam Hulu	-				
				Penajam Paser Utara	-	50			Usulan Kab. akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan teknis
				Paser	-				
				Berau	-				
				Samarinda	-				
				Balikpapan	-				
				Bontang	-				
		Produktivitas komoditas Perkebunan (Karet)	1,45 Ton/Ha	Semua Kabupaten/Kota	1,45				
		- Intensifikasi Karet	200 Ha		280	100			Usulan Kab. akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan teknis
				Kutai Kartanegara	50	50			
				Kutai Timur	-				
				Kutai Barat	-				
				Mahakam Hulu	-				
				Penajam Paser Utara	-	50	APBN 200 Ha		Usulan Kab. akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan teknis
				Paser	200		APBN 200 Ha		
				Berau	-				
				Samarinda	30				
				Balikpapan	-				
				Bontang	-				
		- Peremajaan Karet	100 Ha		-	-			
				Kutai Kartanegara					
				Kutai Timur					
				Kutai Barat			APBN 400 Ha		
				Mahakam Hulu					
				Penajam Paser Utara					
				Paser			APBN 200 Ha		
				Berau					
				Samarinda					
				Balikpapan					
				Bontang					
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0,85 Ton/Ha	Semua Kabupaten/Kota	0,85				
		- Intensifikasi Kelapa	20 Ha		20	40			Usulan Kab. akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan teknis
				Kutai Kartanegara	-	20			
				Kutai Timur	-				
				Kutai Barat	-				
				Mahakam Hulu	-				
				Penajam Paser Utara	20	20			Usulan Kab. akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan teknis
				Paser	-				
				Berau	-				
				Samarinda	-				
				Balikpapan	-				

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Permendagri 90	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi			Dukungan PD Terkait	Alasan	Keterangan
				Kabupaten/Kota	Rancangan Provinsi	Usulan Kabupaten/Kota			
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0,80 Ton/Ha	Bontang Semua Kabupaten/Kota	- 0,80				
		- Intensifikasi Kakao	180 Ha		50	-			
				Kutai Kartanegara	-				
				Kutai Timur	-				
				Kutai Barat	-				
				Mahakam Hulu	-				
				Penajam Paser Utara	-				
				Paser	-				
				Berau	50				
				Samarinda	-				
				Baikpapan	-				
				Bontang	-				
		- Peremajaan Kakao	50 Ha		50	-			
				Kutai Kartanegara	-				
				Kutai Timur	-				
				Kutai Barat	-				
				Mahakam Hulu	-				
				Penajam Paser Utara	-				
				Paser	-				
				Berau	50				
				Samarinda	-				
				Baikpapan	-				
				Bontang	-				
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (lada)	1,19 Ton/Ha	Semua Kabupaten/Kota	1,19				
		- Intensifikasi lada	200 Ha		140	100			
				Kutai Kartanegara	40	40			Usulan Kab. akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan teknis
				Kutai Timur	-				
				Kutai Barat	-		APBN 100 Ha		
				Mahakam Hulu	-				
				Penajam Paser Utara	-	60			Usulan Kab. akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan teknis
				Paser	-				
				Berau	100		APBN 100 Ha		
				Samarinda	-				
				Baikpapan	-				
				Bontang	-				
		- Rehabilitasi Lada	50 Ha		-	-			
				Kutai Kartanegara			APBN 100 Ha		
				Kutai Timur					
				Kutai Barat					
				Mahakam Hulu					
				Penajam Paser Utara					
				Paser					
				Berau			APBN 100 Ha		
				Samarinda					
				Baikpapan					

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Permendagri 90	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi			Dukungan PD Terkait	Alasan	Keterangan
				Kabupaten/Kota	Rancangan Provinsi	Usulan Kabupaten/Kota			
3.27.05.1.01.02	Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Pertanian, Hortikultura, dan perkebunan	b.Penanganan Konflik usaha perkebunan (pelaku usaha)	5	Semua Kabupaten/Kota	5				
		Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	1 PMS		1	-			
				Kutai Kartanegara	-				
				Kutai Timur	-				
				Kutai Barat	1			PBS yang sudah Study Kelayakan	
				Mahakam Hulu	-				
				Penajam Paser Utara	-				
				Paser	-				
				Berau	-				
				Samarinda	-				
				Balikpapan	-				
				Bontang	-				
		Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi	102.500 Ha		102.500	35.100			
				Kutai Kartanegara	22.700	22.700	Disbun Kab dan mitrakerja		Kawasan ANKT
				Kutai Timur	42.000	10.000	Disbun Kab dan mitrakerja		Kawasan ANKT
				Kutai Barat	8.500		Disbun Kab dan mitrakerja		Kawasan ANKT
				Mahakam Hulu	1.000		Disbun Kab dan mitrakerja		Kawasan ANKT
				Penajam Paser Utara	2.400	2.400	Disbun Kab dan mitrakerja		Kawasan ANKT
				Paser	9.100		Disbun Kab dan mitrakerja		Kawasan ANKT
				Berau	16.800		Disbun Kab dan mitrakerja		Kawasan ANKT
				Samarinda	-				
				Balikpapan	-				
				Bontang	-				
3.27.05.1.01.03	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Kelompok Tani Perduhi Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina	15 KTPA		15	10			
				Kutai Kartanegara	2	2	Disbun Kab dan mitrakerja		Pembentukan dan kemitraan
				Kutai Timur	2	5	Disbun Kab dan mitrakerja		Pembentukan dan kemitraan
				Kutai Barat	2		Disbun Kab dan mitrakerja		Pembentukan dan kemitraan
				Mahakam Hulu	2		Disbun Kab dan mitrakerja		Pembentukan dan kemitraan
				Penajam Paser Utara	2	2	Disbun Kab dan mitrakerja		Pembentukan dan kemitraan

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Permendagri 90	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi			Dukungan PD Terkait	Alasan	Keterangan
				Paser	2		Disbun Kab dan mitrakerja		Pembentukan dan kemitraan
				Berau	2		Disbun Kab dan mitrakerja		Pembentukan dan kemitraan
				Samarinda	1		Disbun Kab dan mitrakerja		Pembentukan dan kemitraan (lokasi di Berambai)
				Balikpapan	-				
				Bontang	-				
		Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani	5 Konflik	Semua Kabupaten/kota	5				
3.27.06	Program perizinan Usaha Pertanian	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan		35	20			
				Kutai Kartanegara	5	5			
				Kutai Timur	10	10			
				Kutai Barat	3				
				Mahakam Hulu	-				
				Penajam Paser Utara	5	5			Pelaksanaan PUP 2021 Bulan Juni
				Paser	10				
				Berau	2				
				Samarinda					
				Balikpapan					
				Bontang					
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (perusahaan)	97 Perusahaan		97	46			
				Kutai Kartanegara	21	21			
				Kutai Timur	26	15			
				Kutai Barat	10				
				Mahakam Hulu	2				
				Penajam Paser Utara	10	10			
				Paser	16				
				Berau	12				
				Samarinda					
				Balikpapan					
				Bontang					
3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan izin usaha pertanian	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan	45 Lembaga Pekebun		45	16			
				Kutai Kartanegara	5	5			
				Kutai Timur	14	5			
				Kutai Barat	5				
				Mahakam Hulu					
				Penajam Paser Utara	6	6			
				Paser	11				

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Permendagri 90	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi			Dukungan PD Terkait	Alasan	Keterangan
				Kabupaten/Kota	Rancangan Provinsi	Usulan Kabupaten/Kota			
				Berau	4				
				Samarinda					
				Balikpapan					
				Bontang					
		Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina	52 Perusahaan		52	31			
				Kutai Kartanegara	10	10			
				Kutai Timur	16	15			
				Kutai Barat	5				
				Mahakam Hulu	1				
				Penajam Paser Utara	6	6			
				Paser	10				
				Berau	4				
				Samarinda					
				Balikpapan					
				Bontang					
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian		1 Lembaga		1	1			
		Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (lembaga)		Kutai Kartanegara	1	1			
				Kutai Timur	-				
				Kutai Barat	-				
				Mahakam Hulu	-				
				Penajam Paser Utara	-				
				Paser	-				
				Berau	-				
				Samarinda	-				
				Balikpapan	-				
				Bontang	-				
		Jumlah produk perkebunan yang bersertifikat SNI	1 Produk		1	1	Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota, Kernenkumham		
				Kutai Kartanegara	1	1			
				Kutai Timur	-				
				Kutai Barat	-				
				Mahakam Hulu	-				
				Penajam Paser Utara	-				
				Paser	-				
				Berau	-				
				Samarinda	-				
				Balikpapan	-				
				Bontang	-				

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Permendagri 90	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi			Dukungan PD Terkait	Alasan	Keterangan
				Kabupaten/Kota	Rancangan Provinsi	Usulan Kabupaten/Kota			
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petugas Lapangan dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya (Orang)	25 Orang		25	10			
				Kutai Kartanegara	4	4			
				Kutai Timur	4	4			
				Kutai Barat	2				
				Mahakam Hulu	2				
				Pendjam Paser Utara	2	2			
				Paser	3				
				Berau	4				
				Samarinda	3				
				Balikpapan	1				
				Bontang	-				
3.27.07.1.01.01	Pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	1 Kegiatan	Semua Kabupaten Kota	1				
3.27.07.1.02	Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya (kelompok tani)	31 KT		31	14			
				Kutai Kartanegara	7	7			
				Kutai Timur	5	5			
				Kutai Barat	6				
				Mahakam Hulu	-				
				Pendjam Paser Utara	2	2			
				Paser	4				
				Berau	5				
				Samarinda	2				
				Balikpapan	-				
				Bontang	-				
		Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan (Unit)	1 Unit		-	-			
				Kutai Kartanegara					
				Kutai Timur					
				Kutai Barat					
				Mahakam Hulu					
				Pendjam Paser Utara					
				Paser					
				Berau					
				Samarinda					
				Balikpapan					
				Bontang					
		Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan	5 Unit		-	2			
				Kutai Kartanegara					

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Permendagri 90	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi			Dukungan PD Terkait	Alasan	Keterangan
				Kabupaten/Kota	Rancangan Provinsi	Usulan Kabupaten/Kota			
3.27.07.1.02.01	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Jumlah jenis olahan produk perkebunan yang teradopsi dan disebarluaskan (produk)	5 produk	Kutai Timur			4 Bappeda, Disbun Kab./kota, Disperindagkop dan Koperasi Kab./kota, Diskes Kab./Kota		
				Kutai Barat					
				Mahakam Hulu					
				Penajam Paser Utara		2			
				Paser					
				Berau					
				Samarinda					
				Balikpapan					
				Bontang					
					5				
				Kutai Kartanegara	1	1			
				Kutai Timur	1	1			
				Kutai Barat	-	-			
				Mahakam Hulu	-	-			
				Penajam Paser Utara	1	2			
				Paser	1				
				Berau	-	-			
				Samarinda	-	-			
				Balikpapan	1				
				Bontang	-	-			
					13				
				Jumlah produk olahan unggulan yang dipromosikan dan dipasarkan (Produk)	9 Produk				
				Kutai Kartanegara	5	5			gula aren, lada bubuk, kopi jahe, lada jahe, gula semut, air nira, VCO, minyak kelapa, scrub kelapa, air sirup kelapa, es kelapa kopyor, kelapa serut, gula aren jahe merah
				Kutai Barat	2	2			gula aren, lada bubuk, kopi bubuk, gula semut, gula aren jahe merah
				Kutai Timur	2				coklat batangan, gula aren
				Kutai Barat	1				gula aren
				Mahakam Hulu	1				
				Penajam Paser Utara	8	4			lada bubuk, gula aren, kelapa serut, jahe lada, minyak kelapa, VCO, scrub kelapa, sirup air kelapa
				Paser	3				gula aren, kopi bubuk, jahe bubuk
				Berau	3				coklat batang, coklat bubuk, coklat liquor

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Permendagri 90	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi			Dukungan PD Terkait	Alasan	Keterangan
				Kabupaten/Kota	Rancangan Provinsi	Usulan Kabupaten/Kota			
				Samarinda	7				gula aren, air nira, gula semut, VCO, kopi jahe lada, jahe lada, es kelapa kopyor
				Balikpapan	1				lada bubuk putih
				Bontang	-				
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani	20 Pertemuan		20	5			
				Kutai Kartanegara	5	5			
				Kutai Timur	4				
				Kutai Barat	4				
				Mahakam Hulu	-				
				Penajam Paser Utara	1				
				Paser	2				
				Berau	2				
				Samarinda	2				
				Balikpapan	-				
				Bontang	-				
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk (lembaga)	20 Lembaga		20	4			
				Kutai Kartanegara	4	4			
				Kutai Timur	3				
				Kutai Barat	4				
				Mahakam Hulu	-				
				Penajam Paser Utara	2				
				Paser	3				
				Berau	3				
				Samarinda	1				
				Balikpapan	-				
				Bontang	-				
		Jumlah kelompok tani yang produknnya memenuhi SNI (kelompok tani)	4 KT		-	-			
				Kutai Kartanegara					
				Kutai Timur					
				Kutai Barat					
				Mahakam Hulu					
				Penajam Paser Utara					
				Paser					
				Berau					
				Samarinda					
				Balikpapan					
				Bontang					
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan penguatan kelembagaan koordinasi petani	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk	28 Lembaga		20	9			
				Kutai Kartanegara	4	4			
				Kutai Timur	3	3			
				Kutai Barat	4				

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Permendagri 90	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi			Dukungan PD Terkait	Alasan	Keterangan
				Kabupaten/Kota	Rancangan Provinsi	Usulan Kabupaten/Kota			
				Mahakam Hulu	-				
				Penajam Paser Utara	2	2			
				Paser	3				
				Berau	3				
				Samarinda	1				
				Balikpapan	-				
				Bontang	-				
3.27.07.1.03.02	Pendampingan manajemen koperasi petani	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemerasan Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina	5 Unit		5	2	Bappeda, Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota		
				Kutai Kartanegara	-				
				Kutai Timur	4	2			
				Kutai Barat	1				
				Mahakam Hulu	-				
				Penajam Paser Utara	-				
				Paser	-				
				Berau	-				
				Samarinda	-				
				Balikpapan	-				
				Bontang	-				
		Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi kemitraan usaha atau jaringan pemasaran produk perkebunannya (pelaku usaha)	5 pelaku usaha		8	3	Disperindagkop Prov & Kab/Kota, DPMPTSP Prov & Kab/Kota, Dinas Pariwisata Prov & Kab/Kota,Bappeda Prov & Kab/Kota		
				Kutai Kartanegara	1	1			
				Kutai Timur	1	1			
				Kutai Barat	1				
				Mahakam Hulu	-				
				Penajam Paser Utara	2	1			
				Paser	1				
				Berau	-				
				Samarinda	2				
				Balikpapan	-				
				Bontang	-				
3.27.07.1.03.03	Penilaian kelayakan dan standarisasi manajemen koperasi petani	Jumlah pengujian sampel produk hasil perkebunan yang diuji dengan pengujian laboratorium yang berstandar SNI	6 Kali		6	3	Bappeda, Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota		
				Kutai Kartanegara	2	2			
				Kutai Timur	3	1			
				Kutai Barat	-				
				Mahakam Hulu	-				
				Penajam Paser Utara	-				
				Mahakam Hulu	-				
				Penajam Paser Utara	-				

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Permendagri 90	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi			Dukungan PD Terkait	Alasan	Keterangan
				Kabupaten/Kota	Rancangan Provinsi	Usulan Kabupaten/Kota			
				Paser	-				
				Berau	1				
				Samarinda	-				
				Balikpapan	-				
				Bontang	-				
3.27.07.1.03.04	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani	Jumlah kegiatan Sekolah lapang Kelompok Tani	1 Pertemuan		1	2			
				Kutai Kartanegara	-				
				Kutai Timur	-	2			
				Kutai Barat	-				
				Mahakam Hulu	-				
				Penajam Paser Utara	-				
				Paser	-				
				Berau	1				
				Samarinda	-				
				Balikpapan	-				
				Bontang	-				
UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN									
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah benih yang beredar	6.000.000 Benih	Semua Kabupaten Kota	6.000.000				
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi	6.000.000 Benih	Semua Kabupaten/Kota	6.000.000		Dinas yang membidangi perkebunan di kab/kota Provinsi Kalimantan Timur, Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi Kalimantan Utara, KORWAS POLDA KALTIM	Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan	adanya laporan dari masyarakat dan draft MOU
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih	Jumlah Benih yang Disertifikasi	3.000.000 Benih	Semua Kabupaten/Kota	3.000.000		Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan	Draft MOU

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Permendagri 90	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi			Dukungan PD Terkait	Alasan	Keterangan
				Kabupaten/Kota	Rancangan Provinsi	Usulan Kabupaten/Kota			
3.27.02.1.02.04	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Persentase Peredaran Benih yang Illegitim	2,08%	Semua Kabupaten/Kota	2,08%		Dinas yang membidangi perkebunan di kab/kota Provinsi Kalimantan Timur, KORWAS POLDA KALTIM	Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan	Berdasarkan laporan dari masyarakat, draft MOU
UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN									
3.27.05	ProgramPengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT	916,648.000	Semua Kabupaten/kota	916,648.000				
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas serangan berat OPT yang dikendalikan (Ha)	195 Ha	Semua Kabupaten/Kota	195				
3.27.05.1.01.01	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah luas serangan OPT yang dikendalikan (Ha)	195 Ha		195	95			
				Kutai Kartanegara	35	35			Usulan penambahan petugas pengamat OPT
				Kutai Timur	15	15			
				Kutai Barat	22				
				Mahakam Hulu	13				
				Penajam Paser Utara	37	45			
				Paser	37				
				Berau	13				
				Samarinda	5				
				Balikpapan	13				
				Bontang	5				
		Jumlah kelembagaan OPT yang dibina (Lembaga)	2 Lembaga		2	2			
				Kutai Kartanegara	-	1			
				Kutai Timur	1	1			
				Kutai Barat	-				
				Mahakam Hulu	-				
				Penajam Paser Utara	1				
				Paser	-				
				Berau	-				
				Samarinda	-				
				Balikpapan	-				
				Bontang	-				
		Jumlah APH yang Diperbanyak (KG)	1.000 KG	Provinsi	1.000				
		Jumlah APH yang Diperbanyak (KG)							
		Jumlah APH yang Diperbanyak (liter)	600 liter	Provinsi	600				
		Jenis APH yang dibandingkan (jenis)	2 Jenis	Provinsi	2				

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Permendagri 90	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi			Dukungan PD Terkait	Alasan	Keterangan
				Kabupaten/Kota	Rancangan Provinsi	Usulan Kabupaten/Kota			
UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	80%	Provinsi	80%				
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan	50.000 Benih	Provinsi	50.000				
3.27.02.1.02.04	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Jumlah Benih Tanaman Tahunan dan Penyebar	30.000 Benih	Provinsi	30.000				
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyebar (kelapa sawit)	10.000 Benih		10.000				Lokasi KM 38 Loa Janan dan KM 29m Samboja Kab. Kukar
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyebar (karet)	10.000 Benih		10.000				Lokasi KM 41 Loa Janan Kab. Kukar
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyebar (kelapa)	0 Benih		-				
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyebar (kakao)	0 Benih		-				
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyebar (aren)	10.000 Benih		10.000				Lokasi UPTD PBTP Karang Asam Samarinda
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah	20.000 Benih	Provinsi	20.000				
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (lada)	10.000 Benih		10.000				Lokasi KM 41 Loa Janan Kab. Kukar
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (pala)	10.000 Benih		10.000				Lokasi UPTD PBTP Karang Asam Samarinda
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (serih wangi)	0 Benih		-				

TABEL TC.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kiner Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (TW III)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.03.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)	92 %	89,71	83	88,45	106,57			
3.03.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	60 Bulan	12	12	12	100,00			
3.03.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)	5 unit	5	5	5	100,00			
3.03.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	123 Unit	35	18	16	88,89			
3.03.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	60 Bulan	12	12	12	100,00			
3.03.01.08.05	Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan dan Sarana Pendukungnya (DAK)	Jumlah gedung di rehab sedang/berat	8 Unit	-	8	8	100,00			
3.03.01.08.06	Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dan Sarana Pendukungnya (DAK)	Jumlah gedung di rehab sedang/berat	8 unit	0	6	0	-			
3.03.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan pemerintah daerah (%)	100 %	74	20	20	100,00			
3.03.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	20 Kegiatan	4	4	4	100,00			
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)	20 Kegiatan	-	20	20	100,00			
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	60 Bulan	-	12	12	100,00			
3.03.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	250 Orang	36	50	4	8,00			
		Jumlah pakaian dinas (Stell)	1.380 Stell	460		-				

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kiner Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (TW III)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.03.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah (%)	80 %	69,93	68	72,63	106,81			
3.03.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	50 Dokumen	10	10	10	100,00			
3.03.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	20 Dokumen	4	4	4	100,00			
3.03.01.58	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi komoditas perkebunan (Ton)	18.313.874 Ton	14.145.414	16.812.938	16.809.560	99,98			
		a. Kelapa Sawit (Ton TBS)	18.197.504 Ton	14.067.789	16.717.254	16.717.254	100,00			
		b. Karet (Ton)	90.000,00 Ton	59.917	74.060	70.682	95,44			
		c. Kelapa (Ton)	12.853,00 Ton	8.591	12.468	12.468	100,00			
		d. Kakao (Ton)	5.000,00 Ton	2.360	3.307	3.307	100,00			
		e. Lada (Ton)	8.517,00 Ton	6.757	5.849	5.849	100,00			
3.03.01.58.04	Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Produktivitas komoditas perkebunan (ton/ha)								
		a. Kelapa Sawit (Ton/Ha)	22 Ton/ha	16,9	19,5	20,70	106,15			
		b. Karet (Ton/Ha)	1,50 Ton/ha	1,3	1,4	1,44	106,67			
		c. Kelapa (Ton/Ha)	0,90 Ton/ha	0,6	0,8	0,75	93,75			
		d. Kakao (Ton/Ha)	0,85 Ton/ha	0,5	0,7	0,74	105,71			
		e. Lada (Ton/Ha)	1,20 Ton/ha	1,1	1,2	0,92	80,00			
3.03.01.58.05	Perluasan Komoditas Perkebunan Rakyat	Jumlah luas kebun (ha)	3.150 Ha	570	460	460	100,00			
		a. Kelapa Sawit (ha)	850 Ha	100	100	100	100,00			
		b. Karet (ha)	1.100 Ha	300	135	135	100,00			
		c. Kelapa (ha)	100 Ha	20	20	20	100,00			
		d. Kakao (ha)	550 Ha	100	80	80	100,00			
		e. Lada (ha)	550 Ha	50	125	125	100,00			
	Pengembangan Kelembagaan Pekebun	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk (unit)	104 unit		20	20	100,00			
3.03.01.76	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,04 Juta Ton CO2eq	4	4,080	2,916	71,47			
3.03.01.76.01	Pengembangan energi baru terbarukan di sektor perkebunan	Jumlah Perusahaan yang memanfaatkan limbah POME (Perusahaan)	1 Perusahaan	1						

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kiner Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (TW III)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.03.01.76.03	Penanaman pada wilayah cadangan karbon rendah	Luas area yang ditanami (Ha)	50.000 ha	50.487						
3.03.01.76.04	Pengembangan energi baru terbarukan di sektor perkebunan	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bio energi (PMS)	11 PMS		1	1	100,00			
3.03.01.76.05	Perlindungan lahan konservasi di areal perkebunan	luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi (ha)	103.000,00 ha		101.500	106.000	104,43			
3.03.01.76.06	Pengendalian kebakaran lahan perkebunan	Jumlah KTPA (Kelompok Tani Peduli Api) yang dibentuk dan dibina (KTPA)	60 KTPA		5	6	120,00			
3.03.01.93	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk)	10 produk		2	1	50,00			
3.03.01.93.01	Pembinaan Pasca Panen Perkebunan	Jumlah kelompok tani yang produknnya memenuhi SNI (kelompok tani)	16 KT		3	4	133,33			
3.03.01.93.02	Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah Jenis Olahan Hasil Perkebunan (produk)	12 Produk		2	2	100,00			
3.03.01.93.03	Kegiatan Promosi Produksi Perkebunan	Jumlah promosi yang diikuti (event)	40 event		1	-	-			
3.03.01.80	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) (Perusahaan)	140 Perusahaan	30	35	18	51,43			
3.03.01.80.01	Pengembangan Database Usaha Perkebunan	Jumlah database dan data spasial (Database)	2 Database	2						
3.03.01.80.02	Pelayanan adminitrasi Perijinan	Jumlah perusahaan yang memperoleh IUP (Perusahaan)	10 Perusahaan	10						
3.03.01.80.03	Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan	Jumlah usaha perkebunan yang diawasi (Perusahaan)	20 Perusahaan	20						
3.03.01.80.04	Peningkatan Kemitraan Usaha Perkebunan	Jumlah lembaga pekebun yang dimitrakan (Koperasi)	60 Koperasi		30	25	83,33			
3.03.01.80.05	Penanganan Konflik Usaha Perkebunan	Jumlah konflik perkebunan yang terselesaikan (konflik)	20 Konflik		5	6	120,00			
3.03.01.80.06	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan	Jumlah pelaku usaha yang dibina (Perusahaan)	208 Perusahaan		52	21	40,38			
3.03.01.94	Program Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih	Jumlah benih yang beredar (benih)	11.860.704 benih		2.905.176	6.749.812	232,34			
3.03.01.94.01	Pengendalian dan pengawasan peredaran benih	Persentase peredaran benih yang illegitim (%)	1,58 %		3,08	3,07	99,68			
3.03.01.94.02	Pengujian dan Sertifikasi Benih	Jumlah benih yang disertifikasi (benih)	8.000.000 benih		2.000.000	3.034.162	151,71			
3.03.01.95	Program Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Jumlah taksasi kerugian akibat serangan OPT (Rupiah)	2.136.364.888 Rupiah		1.087.534.440	996.352.513	91,62			
3.03.01.95.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Luas lahan yang dikendalikan (Ha)	156 ha		229	209,8	91,62			
3.03.01.95.02	Perbanyakan Agens Pengendali Hayati (APH) dan Bio Pestisida (BP)	Jumlah produksi Agens Pengendali Hayati (APH)								
		- APH Padat	20.000 kg		5.000		-			

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kiner Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (TW III)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		- APH Cair	2.000 liter		500	500	100,00			
3.03.01.88	Program Penyediaan Bahan Tanaman	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	100 %		85	85	100,00			
3.03.01.88.03	Penyediaan benih tanaman tahunan dan penyegar	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar	529.000		132.000	65.000	49,24			
		a. Kelapa Sawit (benih)	200.000 benih		50.000	25.000	50,00			
		b. Karet (benih)	200.000 benih		50.000	15.000	30,00			
		c. Kelapa (benih)	9.000 benih		2.000	25.000	1.250,00			
		d. Kakao (benih)	80.000 benih		20.000	-	-			
		e. Aren (benih)	40.000 benih		10.000	-	-			
3.03.01.88.04	Penyediaan benih tanaman semusim dan rempah	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah	180.000		45.000	31.223	69,38			
		a. Lada (benih)	100.000 benih		25.000	13723	54,89			
		b. Pala (benih)	40.000 benih		10.000	10000	100,00			
		c. Sereh wangi ((benih)	40.000 benih		10.000	7500	75,00			
3.03.01.60	Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	Persentase konflik yang ditangani (%)	20 %	20						
3.03.01.60.04	Penanganan konflik usaha perkebunan	Persentase konflik yang ditangani (%)	20 %	20						
3.03.01.61	Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	Persentase Produk yang bersertifikat (%)	30 %	30						
3.03.01.61.01	Pembinaan pasca panen	Jumlah kelompok tani yang dibina (Kel. Tani)	3 KT	25						
3.03.01.61.04	Standarisasi mutu hasil perkebunan	Jumlah produk olahan yang disertifikasi (produk)	2 Produk	2						
3.03.01.62	Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	Jumlah komoditi produk olahan hasil perkebunan (Komoditi)	5 komoditi	5						
3.03.01.62.04	Penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan (Jenis)	2 jenis	4						
3.03.01.62.05	Pengolahan hasil perkebunan	Jumlah produk olahan hasil perkebunan (Produk)	11 produk	11						
3.03.01.65	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Jumlah komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui kegiatan pameran dagang (Komoditi)	5 komoditi	5						
3.03.01.65.05	Promosi produksi perkebunan	Jumlah transaksi (Transaksi)	50 transaksi	50						
3.03.01.65.06	Pengelolaan Informasi pasar	Jumlah data Informasi produk dan pasar (Informasi)	2 informasi	2						

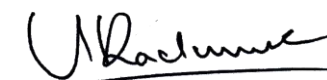
Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kiner Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (TW III)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.03.01.68	Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	Jumlah kelompok tani yang dapat melaksanakan pengendalian hama terpadu (Kel. Tani)	2 KT	2						
3.03.01.68.02	Pelatihan Petani SL-PHT	Jumlah orang terlatih (Orang)	25 orang	50						
3.03.01.77	Program Konservasi Lahan dan Air	Persentase sumber air dan HCV yang terlindungi (%)	50 %	50						
3.03.01.77.01	Perlindungan lahan perkebunan	Jumlah perusahaan yang memiliki kawasan HCV (PBS)	60 PBS	60						
3.03.01.77.02	Perlindungan sumber air di areal perkebunan	Jumlah sumber air yang dilindungi (Unit)	130 Unit	130						
3.03.01.78	Program Pemberdayaan Tenaga Pendamping Perkebunan Rakyat	Jumlah SDM Petani, petugas Lapang dan teknis Perkebunan (Orang)	25 orang	25						
3.03.01.78.01	Pelatihan Petugas Lapang (Fasda) dan Teknis Perkebunan	Jumlah fasilitator daerah dan pemandu lapang (Orang)	25 orang	25						
3.03.01.79	Program Peningkatan Kemandirian dan Kelembagaan Kelompok Tani	Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	5 gapoktan	5						
3.03.01.79.01	Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani (Kel. Tani)	30 KT	30						
3.03.01.81	Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan	Jumlah lembaga pekebun yang bermitra (Kelompok)	20 kelompok	20						
3.03.01.81.01	Pembinaan dan pengawasan kebun kemitraan	Jumlah kemitraan usaha perkebunan (Kelompok)	20 kelompok	20						
3.03.01.82	Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan	Jumlah olahan produk hasil perkebunan (Komoditi)	5 komoditi	5						
3.03.01.82.01	Pembinaan pengolahan produk perkebunan	Jumlah kelompok tani yang dibina (Kel. Tani)	5 KT	10						
3.03.01.82.02	Pemanfaatan alat-alat pengolahan hasil perkebunan	Persentase peningkatan produksi (%)	15 %	15						
3.03.01.83	Program Pengendalian Kebakaran Kebun	Presentase kebakaran kebun yang dikendalikan (%)	40 %	80						
3.03.01.83.01	Pengendalian kebakaran kebun dan dampak perubahan iklim	Luas kebakaran kebun (ha)	99 ha	50						

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kiner Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (TW III)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.03.01.84	Program Pengawasan Peredaran benih perkebunan	Jumlah penanganan kasus peredaran benih illegal (Kasus)	2 kasus	2						
3.03.01.84.01	Identifikasi sumber benih	Jumlah sumber benih yang legal (Sumber Benih)	2 sumber benih	3						
3.03.01.84.02	Pengawasan peredaran benih	Jumlah benih yang diawasi (Benih)	2.000.000 benih	2.486.546						
3.03.01.85	Program pengujian dan sertifikasi benih	Jumlah benih yang disertifikasi (Benih)	2.000.000 benih	2.486.546						
3.03.01.85.01	Pengujian benih	Jumlah jenis benih yang diuji di laboratorium (Karet, Aren, Lada, Kakao, Kelapa) (Jenis)	1 jenis	1						
3.03.01.85.02	Sertifikasi benih	jumlah benih tersertifikasi dan berlabel (benih)	2.000.000 benih	2.486.546						
3.03.01.86	Program Pengendalian OPT	Jumlah kelompok tani dan brigade proteksi yang mengendalikan OPT (Kelompok)	25 kelompok	25						
3.03.01.86.01	Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	Jumlah kelompok tani OPT (Kelompok Tani)	25 KT	25						
3.03.01.87	Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	Jumlah Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH) (Kg)	5.000 kg	5.000						
3.03.01.87.01	Pengembangan dan Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH)	Jumlah APH/BP (Kg/liter)	5.000 kg	5.000						
3.03.01.88	Program penyediaan bahan tanaman	Presentase pemenuhan bibit unggul perkebunan secara mandiri (%)	75 %	100						
3.03.01.88.01	Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan	Jumlah benih komoditas perkebunan (benih)	25.000 Orang	24.812						
	Pengelolaan Kebun Induk/Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT)	Jumlah kebun induk/koleksi dan BPT yang dipelihara(Ha)	12 ha	12						
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap pelayanan urusan bidang perkebunan	92 %					86	84,83	92,21
3.27.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	74 nilai					70	72,63	98,15
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	36 bulan					12	9	45,00
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %					20	7	35,00
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	5 unit					5	5	22,73

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kiner Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (TW III)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	22 jenis					8	8	36,36
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 jenis					3	3	100,00
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 jenis					3	3	100,00
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan (Ton)	18.313.874 ton					17.136.849	17.792.792	97,15
3.27.002.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	20,03 ton/ha					18,4	16,18	80,78
3.27.003	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun	1.500.674 ha					1.425.580	1.540.488	102,65
		Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan	90 Kelompok Tani					30	34	37,78
3.27.003.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang diperluas	1.910 ha					670	670	35,08
3.27.005	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4,04 ton CO2Eq					4,079	6,02	4,56
3.27.005.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi Mitigasi GRK	132 pelaku usaha					128	106	80,30
		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi penanganan konflik usaha perkebunan	15 pelaku usaha					5	5	33,33
3.27.006	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan					35	10	28,57
3.27.006.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	107 Perusahaan					87	81	75,70
3.27.007	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	3 lembaga					1	-	-
3.27.007.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya	75 orang					25	25	33,33
3.27.007.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya	93 Kelompok Tani					31	12	12,90
		Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan	3 unit					1	1	33,33
3.27.007.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk	60 lembaga					20	14	23,33

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kiner Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (TW III)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI	12 kelompok tani					4	2	16,67
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih yang beredar	6.000.000 benih					6.000.000	5.627.144	93,79
3.27.002.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih tanaman perkebunan yang diawasi	6.000.000 benih					6.000.000	1.297.566	21,63
3.27.005	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT	774.940.000 Juta					1.047.138.860	942.424.900	82,23
3.27.005.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas serangan berat OPT yang dikendalikan	156 ha					220	198	78,79
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	85 %					75%	-	-
3.27.002.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan	155.000 benih					55.000	55.000	35,48

Samarinda, 2021
KEPALA,



Ir. UJANG RACHMAD, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690120 199403 1 014

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

III. 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan pertanian lima tahun ke depan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya sehingga permasalahan yang dihadapi semakin kompleks di antaranya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta alih fungsi lahan pertanian yang semakin bertambah. Permasalahan di sektor pertanian dan pangan bisa di kategorikan sebagai berikut :

1. Pemenuhan pangan dan kecukupan gizi;
2. Defisit perdagangan subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan;
3. Status dan luas kepemilikan lahan;
4. Pendidikan dan usia petani;
5. Kemiskinan pedesaan;
6. Dampak disrupsi revolusi industri 4.0;
7. Dampak perubahan iklim (DPI); dan
8. Keterbatasan akses pembiayaan bagi petani.

Sedangkan dalam pembangunan perkebunan tantangan yang harus dihadapi antara lain:

1. Liberalisasi perdagangan global (implikasi pertemuan WTO, APEC, G20 dan kerjasama bilateral/multilateral/regional lainnya);
2. Kondisi perekonomian global yang menimbulkan gejolak harga dunia (implikasi negatif era pasar bebas ASEAN/AEC 2015);
3. Tuntutan terhadap atribut mutu/kualitas produk (implikasi dari tuntutan daya saing komoditas);
4. Perubahan iklim akibat pemanasan global (implikasi terhadap munculnya bencana alam dan peningkatan serangan OPT);
5. Dukungan terhadap optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup (implikasi terhadap pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan);
6. Tingginya tingkat permintaan akibat ledakan jumlah penduduk dan urbanisasi (implikasi terhadap ketersediaan bahan baku); dan

7. Aspek distribusi/pengangkutan dan pemasaran (implikasi dari globalisasi produksi dan pasar).

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, maka visi Kementerian Pertanian adalah: ***“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***.

Dalam rangka mendukung visi pembangunan pertanian tahun 2020-2024, maka Visi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah ***"Perkebunan Indonesia yang Produktif, Bernilai Tambah dan Berdaya Saing dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong untuk Mendukung Tercapainya Visi Presiden Republik Indonesia"***.

Visi Presiden di atas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua sebagai bentuk percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I. Adapun sembilan misi tersebut adalah :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menetapkan 7 misi pembangunan nasional di antaranya adalah :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020 – 2024, terdapat 5 (lima) arah kebijakan yang menjadi koridor perumusan strategi Kementerian Pertanian sebagai berikut.

- a) Arah kebijakan 1: Terjaganya ketahanan pangan nasional Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Upaya menjaga ketahanan pangan nasional dilaksanakan melalui strategi: a) Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas pangan strategis; b) Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional; c) Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan; d) Pengembangan dan Penguatan Sistem Perbenihan; e) Perlindungan Tanaman dari OPT dan DPI; f) Memperpendek rantai pasok; g) Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan; h) Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya genetik pertanian; dan i) Inovasi pertanian bioindustry.
- b) Arah kebijakan 2: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian Nilai tambah pertanian menggambarkan kemampuan industri pertanian untuk menciptakan pendapatan baik bagi pelaku usaha pertanian, pendapatan wilayah maupun pendapatan nasional. Peningkatan nilai tambah pertanian diharapkan juga dapat mendongkrak daya saing pertanian Indonesia.

Peningkatan daya saing pertanian menunjukkan peningkatan inovasi pertanian guna menciptakan keunggulan komoditas pertanian Indonesia terhadap komoditas pertanian negara lain. Upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing dilaksanakan melalui strategi: a) Peningkatan pemasaran dan investasi; b) Penerapan standarisasi dan mutu hasil; c) Penerapan teknologi pascapanen dan pengolahan; d) Peningkatan Nilai Tambah produk pertanian; e) Penguatan sistem perkarantina; f) Digitalisasi dan percepatan perikanan; dan g) Pengembangan industri pertanian berbasis kawasan.

- c) Arah kebijakan 3: Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian Keberlanjutan merupakan isu internasional yang secara serentak di implementasikan di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. Keberlanjutan sumber daya pertanian yaitu menjamin ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan pertanian hingga masa mendatang dan memastikan generasi selanjutnya masih dapat menyelenggarakan pertanian. Kebutuhan penyelenggaraan pertanian didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana pertanian sebagai kebutuhan dasar infrastruktur pertanian, meliputi air, lahan, pupuk dan pestisida, pembiayaan, serta alat dan mesin pertanian. Kebutuhan dasar tersebut menjadi enabler dalam mencapai target produksi komoditas strategis nasional. Upaya menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian, serta menjaga ketersediaan prasarana dan sarana pertanian dilaksanakan melalui strategi: a) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan; b) Pengelolaan air untuk pertanian secara berkesinambungan; c) Pengembangan Mekanisasi Pertanian; d) Meningkatkan akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian; e) Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida untuk meningkatkan produktivitas pertanian; dan f) Penerapan teknologi untuk pengembangan sumber daya lahan.
- d) Arah kebijakan 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian Sumber daya manusia pertanian adalah salah satu modal utama penyelenggaraan pertanian. Peningkatan kualitas bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM pertanian. Peningkatan kompetensi SDM pertanian diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja sektor pertanian. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian dilaksanakan melalui strategi: a) Standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian; b) Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian; c) Penyuluhan pertanian berbasis teknologi

informasi dan komunikasi; d) Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional; e) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi; dan f) Penguatan kelembagaan petani.

e) Arah kebijakan 5: Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima Implementasi Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 bertema “Pemerintahan Berkelas Dunia” dimana diharapkan penyelenggaraan birokrasi di Indonesia akan lebih akuntabel, profesional dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Implementasi Reformasi Birokrasi merupakan tanggung jawab kolektif dari setiap individu yang menjadi bagian dari Kementerian Pertanian. Upaya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, dilaksanakan melalui strategi: a) Mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN; b) Meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan c) Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi.

Sedangkan strategi Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Gambar III.1 Kerangka Strategi Pembangunan Perkebunan Nasional



Berdasarkan arahan strategis Direktur Jenderal Perkebunan, maka dirumuskan sejumlah kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024. Kegiatan merupakan upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mendukung Kementerian Pertanian dalam mencapai visi dan misi Presiden pada sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan, dimana

kegiatan yang disusun harus selaras dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024:

- a) Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas tanaman;
- b) Efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan;
- c) Efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan;
- d) Optimasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT serta antisipasi risiko DPI;
- e) Peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan; dan
- f) Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai roadmap reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Renja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan integrasi dari dokumen perencanaan pembangunan di tingkat pusat maupun regional sektor pertanian. Renja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur inilah yang akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

III.2.1. Tujuan

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dari Renja tahun 2022 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama 1 (satu) tahun kedepan berdasarkan tugas dan fungsinya adalah merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan serta sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan berdasarkan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023 adalah meningkatkan peran Perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan Perkebunan yang berkelanjutan.

III.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan

strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik kualitatif maupun kuantitatif sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu.

Sebagaimana dalam Rencana Strategi (Renstra) 2019-2023 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2019 - 2023 berdasarkan misi yang telah terbentuk adalah sebagai berikut :

1. Misi Pertama adalah meningkatkan daya saing hasil perkebunan untuk memenuhi bahan baku industri dan menunjang ekspor nasional yang mempunyai strategi/kebijakan sebagai berikut :
 - a. Mengutamakan peningkatan produktivitas dari pada perluasan areal perkebunan
 - Peningkatan produksi komoditi perkebunan
 - b. Peningkatan nilai tambah dan perbaikan harga komoditi Perkebunan rakyat
 - Peningkatan produk primer menjadi beberapa produk turunan lainnya
 - Peningkatan mutu dan nilai tambah produk perkebunan
 - Peningkatan pemasaran produk perkebunan dengan standarisasi tinggi dan berorientasi ekspor
 - Membangun outlet-outlet pemasaran produk olahan Perkebunan
2. Misi Kedua adalah memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembangunan sektor perkebunan yang berkelanjutan yang mempunyai strategi/kebijakan sebagai berikut :
 - a. Memprioritaskan pengembangan komoditas unggulan non sawit (diversifikasi komoditas unggulan)
 - Mendorong peningkatan luas komoditas non sawit
 - b. Perluasan kebun di arahkan pada pengembangan kebun rakyat dan dilakukan pada lahan yang memiliki cadangan karbon rendah
 - Peningkatan luasan lahan pada perkebunan rakyat
 - c. Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan
 - Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana penunjang
 - d. Pengelolaan dan penyediaan data perkebunan berbasis spasial yang transparan dan valid
 - Peningkatan pengelolaan data dan informasi perkebunan

- e. Mempercepat realisasi pembangunan kebun untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan melalui penataan dan penertiban perijinan di sektor perkebunan
 - Peningkatan efektivitas pengawasan usaha perkebunan yang berkelanjutan
 - Melakukan penataan dan penertiban perijinan usaha Perkebunan
- f. Melindungi area cadangan karbon tinggi pada areal perkebunan
 - Penanganan hama dan penyakit
 - Efektivitas Mitigasi Emisi GRK
 - Penanganan lahan berkonservasi tinggi dan pengendalian kebakaran
- g. Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan antara pekebun dan perusahaan
 - Peningkatan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dan kebun kemitraan
 - Penanganan konflik perkebunan
- h. Peningkatan nilai tambah dan perbaikan harga komoditi Perkebunan rakyat
 - Memperpendek mata rantai pemasaran produk pekebunan rakyat

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan serta sampai lima tahun mendatang. Dari tujuan Renstra Dinas Perkebunan dapat ditarik sasaran dalam lima tahun. Sasaran yang efektif dinyatakan dengan baik secara spesifik dan dapat diukur. Sasaran yang ingin di capai pada periode 2019-2023 sebagai berikut :

a. Meningkatnya nilai produk sub sektor perkebunan, dengan indikator :

- Nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan (miliar rupiah, atas dasar angka konstan)

b. Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan, dengan indikator :

- Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) (Perusahaan)

c. Meningkatkan kesejahteraan pekebun, dengan indikator :

- NTP Perkebunan Rakyat (%)

III.3. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

A. Program

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur diimplementasikan ke dalam 2 (dua) kelompok program, yaitu program yang terkait dengan pelayanan administratif perkantoran / pelayanan publik dan program yang terkait dengan pembangunan langsung kepada masyarakat pekebun.

Program pembangunan perkebunan adalah program strategis yang diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur khususnya pembangunan perkebunan selama 5 tahun ke depan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program Dinas Perkebunan pada tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administratif

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

2. Program Pembangunan Perkebunan

- a. Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian;
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- c. Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- d. Program perizinan Usaha Pertanian; dan
- e. Program Penyuluhan Pertanian.

B. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan pada visi dan misi, tujuan dan sasaran serta program yang akan dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 serta mengacu pada RKPD 2022, dapat dijabarkan ke dalam aktivitas atau kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan yang terkait dengan pelayanan administrasi

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dan
- b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan, meliputi sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya; dan
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- 4) Administasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - f) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
 - d) Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:
 - a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 - b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
 - c) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

2. Kegiatan yang terkait dengan pembangunan

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, meliputi kegiatan :

- 1) Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pengawasan sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian.
- 2) Pengawasan Mutu, penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih; dan
 - b) Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, meliputi kegiatan :

- 1) Penataan Prasarana Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - a) Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian.

c. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, meliputi kegiatan:

- 1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; dan
 - c) Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

d. Program Perizinan Usaha Pertanian, meliputi kegiatan :

- 1) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.

e. Program Penyuluhan Pertanian, meliputi kegiatan :

- 1) Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN.
- 2) Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - a) Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian; dan
 - b) Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani.
- 3) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani;

- b) Pendampingan Manajemen Koorporasi petani;
- c) Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani; dan
- d) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani.

Adapun total anggaran indikatif kebutuhan anggaran pada Tahun 2022 untuk Dinas Perkebunan dan 3 (Tiga) UPTD adalah sebesar **Rp. 50.000.000.000,-** (*Lima Puluh Miliar Rupiah*). Total anggaran dinas sebesar Rp. 41.904.550.650,- UPTD PBP sebesar Rp. 2.496.308.950,- UPTD P2TP sebesar Rp. 3.197.333.000,- dan UPTD PBTP sebesar Rp. 2.401.807.400,- (Tabel TC. 33)

Tabel. T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Dinas Perkebunan				41.904.550.650			43.904.550.650
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)		89%	23.170.339.650	APBD	92%	23.611.237.650
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD		72	1.274.925.300		74	1.774.925.300
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)</i>	<i>Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim</i>	<i>10 Dokumen</i>	<i>552.771.000</i>		<i>10 Dokumen</i>	<i>802.771.000</i>
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun</i>	<i>Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>722.154.300</i>		<i>4 Laporan</i>	<i>972.154.300</i>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah		12 Bulan	15.359.114.750		12 Bulan	15.359.114.750
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan</i>	<i>Samarinda</i>	<i>28 Dokumen</i>	<i>14.906.274.750</i>		<i>28 Dokumen</i>	<i>14.906.274.750</i>
	<i>Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan</i>		<i>12 Laporan</i>			<i>12 Laporan</i>	
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksaasn tugas ASN</i>	<i>Samarinda</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>452.840.000</i>		<i>12 Bulan</i>	<i>452.840.000</i>
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi		20%	936.032.000		20%	936.032.000
<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut</i>	<i>Jumlah pakaian dinas (Stell)</i>	<i>Samarinda</i>	<i>356 stell</i>	<i>352.032.000</i>		<i>135 stell</i>	<i>352.032.000</i>
<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah pendidikan dan pelatihan formal</i>	<i>Samarinda</i>	<i>50 Orang</i>	<i>584.000.000</i>		<i>50 Orang</i>	<i>584.000.000</i>

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu		5 Unit	1.716.947.254		5 Unit	1.716.947.254
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor</i>	<i>Samarinda</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>35.991.708</i>		<i>12 Bulan</i>	<i>35.991.708</i>
<i>Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor</i>	<i>Jumlah bulan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor</i>	<i>Samarinda</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>167.310.000</i>		<i>12 Bulan</i>	<i>167.310.000</i>
<i>Penyediaan bahan logistik kantor</i>	<i>Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat</i>	<i>Samarinda</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>352.514.181</i>		<i>12 Bulan</i>	<i>352.514.181</i>
	<i>Jumlah bulan penyediaan alat tulis</i>		<i>12 Bulan</i>			<i>12 Bulan</i>	
<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	<i>Jumlah barang cetakan dan penggandaan</i>	<i>Samarinda</i>	<i>47.240 Lembar</i>	<i>69.731.365</i>		<i>47.240 Lembar</i>	<i>69.731.365</i>
<i>Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan</i>	<i>Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	<i>Samarinda</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>9.600.000</i>		<i>12 Bulan</i>	<i>9.600.000</i>
<i>Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah</i>	<i>Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>1.081.800.000</i>		<i>12 Bulan</i>	<i>1.081.800.000</i>
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah		8 Jenis	286.509.500		6 Jenis	227.407.500
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya</i>	<i>Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia</i>	<i>Samarinda</i>	<i>15 Unit</i>	<i>286.509.500</i>		<i>9Unit</i>	<i>227.407.500</i>
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah		3 Jenis	2.634.801.146		3 Jenis	2.634.801.146
<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	<i>Jumlah surat yang diadministrasikan</i>	<i>Samarinda</i>	<i>3.000 Lembar</i>	<i>30.000.000</i>		<i>3.000 Lembar</i>	<i>30.000.000</i>
<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	<i>Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	<i>Samarinda</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>494.401.410</i>		<i>12 Bulan</i>	<i>494.401.410</i>
<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>Samarinda</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>304.192.000</i>		<i>12 Bulan</i>	<i>304.192.000</i>
<i>Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</i>	<i>Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran</i>	<i>Samarinda</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>1.806.207.736</i>		<i>12 Bulan</i>	<i>1.806.207.736</i>
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara		3 Jenis	962.009.700		3 Jenis	962.009.700

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
<i>Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan</i>	<i>Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	<i>Samarinda</i>	<i>18 Unit</i>	<i>400.217.700</i>		<i>18 Unit</i>	<i>400.217.700</i>
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</i>	<i>Samarinda</i>	<i>2 Unit</i>	<i>349.932.000</i>		<i>2 Unit</i>	<i>349.932.000</i>
<i>Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya</i>	<i>Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor</i>	<i>Samarinda</i>	<i>21 Unit</i>	<i>211.860.000</i>		<i>21 Unit</i>	<i>211.860.000</i>
Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Produksi komoditas perkebunan (Ton)		18.126.490,20	6.465.557.600	APBD	18.313.874,25	6.965.557.600
	Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit)		18.020.894			18.197.504	
	Produksi Komoditi Perkebunan (karet)		81.651			90.000	
	Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa)		12.500			12.853	
	Produksi Komoditi Perkebunan (kakao)		4.368			5.000	
	Produksi Komoditi Perkebunan (lada)		7.077			8.517	
	Produksi Komoditi Perkebunan (pala)		0,20			0,25	
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis		19,3 Ton/Ha	6.465.557.600		20,03 Ton/Ha	6.965.557.600
<i>Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian</i>	<i>Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit)</i>	<i>Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan</i>	<i>21 Ton/Ha</i>	<i>6.465.557.600</i>		<i>22 Ton/Ha</i>	<i>6.965.557.600</i>
	<i>Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)</i>		<i>1,45 Ton/Ha</i>			<i>1,50 Ton/Ha</i>	
	<i>Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)</i>		<i>0,85 Ton/Ha</i>			<i>0,90 Ton/Ha</i>	
	<i>Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)</i>		<i>0,80 Ton/Ha</i>			<i>0,85 Ton/Ha</i>	
	<i>Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)</i>		<i>1,19 Ton/Ha</i>			<i>1,20 Ton/Ha</i>	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	<i>Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian</i>		1 Dokumen			1 Dokumen	
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan (Kelompok Tani)		30	6.722.948.500	APBD	30	7.222.948.500
	Luas kebun yang dibangun (Ha)		1.462.645			1.500.674	
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang di perluas (Ha)		595 Ha	6.722.948.500		645 Ha	7.222.948.500
<i>Perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian</i>	<i>Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)</i>	<i>Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan</i>	150 Ha	6.722.948.500		150 Ha	7.222.948.500
	<i>Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)</i>		100 Ha			100 Ha	
	<i>Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)</i>		20 Ha			20 Ha	
	<i>Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)</i>		100 Ha			100 Ha	
	<i>Jumlah luas kebun yang di perluas (Kacang)</i>		150 Ha			200 Ha	
	<i>Jumlah luas kebun yang di perluas (Pala)</i>		50 Ha			50 Ha	
	<i>Jumlah luas kebun yang di perluas (Aren)</i>		25 Ha			25 Ha	
Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)		4,067 Ton CO2Eq	1.080.500.000	APBD	4,044 Ton CO2Eq	1.120.000.000
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi:		135	1.080.500.000		137	1.120.000.000
	a. Mitigasi GRK (pelaku usaha)		130			132	
	b. Penanganan Konflik usaha perkebunan (pelaku usaha)		5			5	
<i>Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Pertanian, Hortikultura, dan perkebunan</i>	<i>Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi</i>	<i>Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim</i>	1 PMS	546.160.000		1 PMS	585.660.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	<i>Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi</i>		102.500 Ha			103.000 Ha	
<i>Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</i>	<i>Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina</i>	<i>Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim</i>	15 KTPA	534.340.000		15 KTPA	534.340.000
	<i>Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani</i>		5 Konflik			5 Konflik	
Program perizinan Usaha Pertanian	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)		35 Perusahaan	750.000.000	APBD	35 Perusahaan	750.000.000
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (perusahaan)</i>	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	97 Perusahaan	750.000.000		107 Perusahaan	750.000.000
<i>Pembinaan dan Pengawasan Penerapan izin usaha pertanian</i>	<i>Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan</i>	<i>Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim</i>	45 Lembaga Pekebun	750.000.000		55 Lembaga Pekebun	750.000.000
	<i>Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina</i>		52 Perusahaan			52 Perusahaan	
Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (lembaga)		1 Lembaga	3.715.204.900	APBD	1 Lembaga	4.234.806.900
	Jumlah produk perkebunan yang bersertifikat SNI		1 Produk			1 Produk	
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya (Orang)		25 Orang	296.476.900		25 Orang	312.046.900
<i>Pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN</i>	<i>Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>	<i>Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan</i>	1 Kegiatan	296.476.900		1 Kegiatan	312.046.900

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya (kelompok tani)		31 KT	1.627.575.000		31 KT	1.877.575.000
	Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan (Unit)		1 Unit			1 Unit	
	Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan		5 Unit			7 Unit	
Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Jumlah jenis olahan produk perkebunan yang teradopsi dan disebarluaskan (produk)	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	5 produk	1.093.750.000		5 produk	1.343.750.000
	Jumlah produk olahan unggulan yang dipromosikan dan dipasarkan (Produk)		9 Produk			11 Produk	
Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	20 Pertemuan	533.825.000		20 Pertemuan	533.825.000
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk (Lembaga)		20 Lembaga	1.791.153.000		20 Lembaga	2.045.185.000
	Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI (kelompok tani)		4 KT			4 KT	
Pembentukan dan penguatan kelembagaan koorporasi petani	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	28 Lembaga	552.475.000		32 Lembaga	552.475.000
Pendampingan manajemen koorporasi petani	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	5 Unit	739.718.000		7 Unit	993.750.000
	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi kemitraan usaha atau jaringan pemasaran produk perkebunannya (pelaku usaha)		5 pelaku usaha			7 pelaku usaha	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Penilaian kelayakan dan standarisasi manajemen koorporasi petani	Jumlah pengujian sampel produk hasil perkebunan yang diuji dengan pengujian laboratorium yang berstandar SNI	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	6 Kali	262.500.000		6 Kali	262.500.000
Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani	Jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	1 Pertemuan	236.460.000		1 Pertemuan	236.460.000
UPTD Pengawasan Benih Perkebunan				2.496.308.950			2.496.308.950
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)		89%	1.460.138.650	APBD & DAK	92%	1.460.138.650
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah		12 Bulan	92.520.000		12 Bulan	92.520.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksaasn tugas ASN	Samarinda	12 Bulan	92.520.000		12 Bulan	92.520.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi		20%	158.990.000		20%	158.990.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	13 Orang	158.990.000		13 Orang	158.990.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu		3 Unit	294.022.117		3 Unit	294.022.117
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Samarinda	12 Bulan	4.500.000		12 Bulan	4.500.000
Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	12 Bulan	24.980.000		12 Bulan	24.980.000
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	Samarinda	12 Bulan	61.701.617		12 Bulan	61.701.617
	Jumlah bulan penyediaan alat tulis		12 Bulan			12 Bulan	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	500 Lembar	7.000.500		500 Lembar	7.000.500
Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Samarinda	12 Bulan	3.840.000		12 Bulan	3.840.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kutub, Mahulu dan	12 Bulan	192.000.000		12 Bulan	192.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah		6 Jenis	334.506.200		6 Jenis	334.506.200
Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	Samarinda	15 Unit	334.506.200		15 Unit	334.506.200
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah		3 Jenis	435.339.733		3 Jenis	435.339.733
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	Samarinda	240 Lembar	2.400.000		240 Lembar	2.400.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	12 Bulan	86.977.605		12 Bulan	86.977.605
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	12 Bulan	188.750.000		12 Bulan	188.750.000
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Samarinda	12 Bulan	157.212.128		12 Bulan	157.212.128
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara		3 Jenis	144.760.600		3 Jenis	144.760.600
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Samarinda	2 Unit	35.910.600		2 Unit	35.910.600
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Samarinda	4 Unit	90.000.000		4 Unit	90.000.000
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	Samarinda	13 Unit	18.850.000		13 Unit	18.850.000
Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah benih yang beredar		6.000.000 Benih	1.036.170.300	APBD	6.000.000 Benih	1.036.170.300
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi		6.000.000 Benih	1.036.170.300		6.000.000 Benih	1.036.170.300

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih	Jumlah Benih yang Disertifikasi	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	3.000.000 Benih	461.297.250		3.000.000 Benih	461.297.250
Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Jumlah peredaran benih ilegal yang diawasi	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	47.000 Benih	574.873.050		47.000 Benih	574.873.050
UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan				3.197.333.000			3.197.333.000
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)		89%	1.944.904.600	APBD	92%	1.944.904.600
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah		12 Bulan	92.520.000		12 Bulan	92.520.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Samarinda	12 Bulan	92.520.000		12 Bulan	92.520.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi		20%	95.200.000		20%	95.200.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	8 Orang	95.200.000		8 Orang	95.200.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu		3 Unit	309.980.917		3 Unit	309.980.917
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Samarinda	12 Bulan	10.699.946		12 Bulan	10.699.946
Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	12 Bulan	17.600.000		12 Bulan	17.600.000
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	Samarinda	12 Bulan	77.777.300		12 Bulan	77.777.300
	Jumlah bulan penyediaan alat tulis		12 Bulan			12 Bulan	

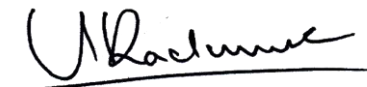
Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	13.100 Lembar	24.783.671		13.100 Lembar	24.783.671
Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Samarinda	12 Bulan	5.120.000		12 Bulan	5.120.000
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kutubaya, Mahakudung	12 Bulan	174.000.000		12 Bulan	174.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah		5 Jenis	367.934.800		5 Jenis	367.934.800
Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	Samarinda	17 Unit	367.934.800		17 Unit	367.934.800
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah		3 Jenis	495.410.883		3 Jenis	495.410.883
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	Samarinda	395 Lembar	3.950.000		395 Lembar	3.950.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	12 Bulan	185.782.355		12 Bulan	185.782.355
Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	12 Bulan	148.466.400		12 Bulan	148.466.400
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Samarinda	12 Bulan	157.212.128		12 Bulan	157.212.128
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara		3 Jenis	583.858.000		3 Jenis	583.858.000
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Samarinda	1 Unit	35.510.000		1 Unit	35.510.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Samarinda	1 Unit	509.328.000		1 Unit	509.328.000
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	Samarinda	10 Unit	39.020.000		10 Unit	39.020.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT (Rp)		916.648.000	1.252.428.400	APBD	774.940.000	1.252.428.400
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas serangan berat OPT yang dikendalikan (Ha)		195 Ha	1.252.428.400		156 Ha	1.252.428.400
Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah luas serangan OPT yang dikendalikan (Ha)	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	195 Ha	1.252.428.400		156 Ha	1.252.428.400
	Jumlah kelembagaan OPT yang dibina (Lembaga)		2 Lembaga			2 Lembaga	
	Jumlah APH yang Diperbanyak (KG)		1.000 KG			1.000 KG	
	Jumlah APH yang Diperbanyak (Liter)		600 Liter			600 Liter	
	Jenis APH yang dikembangkan (Jenis)		2 Jenis			2 Jenis	
UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan				2.401.807.400			2.401.807.400
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)		89%	983.464.992	APBD	92%	983.464.992
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah		12 Bulan	92.520.000		12 Bulan	92.520.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksaan tugas ASN	Samarinda	12 Bulan	92.520.000		12 Bulan	92.520.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi		20%	95.360.000		0	95.360.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	10 Orang	95.360.000		10 Orang	95.360.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu		3 Unit	268.815.973		3 Unit	268.815.973
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Samarinda	12 Bulan	2.703.273		12 Bulan	2.703.273
Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	12 Bulan	2.475.000		12 Bulan	2.475.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	Samarinda	12 Bulan	61.165.200		12 Bulan	61.165.200
	Jumlah bulan penyediaan alat tulis		12 Bulan			12 Bulan	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	3.000 Lembar	5.552.500		3.000 Lembar	5.552.500
Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Samarinda	12 Bulan	1.920.000		12 Bulan	1.920.000
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kutubang, A.Medana dan	12 Bulan	195.000.000		12 Bulan	195.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah		3 Jenis	407.984.019		3 Jenis	407.984.019
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	Samarinda	300 Lembar	3.000.000		300 Lembar	3.000.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	12 Bulan	92.987.659		12 Bulan	92.987.659
Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	12 Bulan	129.231.200		12 Bulan	129.231.200
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Samarinda	12 Bulan	182.765.160		12 Bulan	182.765.160
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara		3 Jenis	118.785.000		3 Jenis	118.785.000
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Samarinda	2 Unit	36.510.000		2 Unit	36.510.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Samarinda	1 Unit	44.000.000		1 Unit	44.000.000
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	Samarinda	13 Unit	38.275.000		13 Unit	38.275.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat		80%	1.418.342.408	APBD	85%	1.418.342.408
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan		50.000 Benih	1.418.342.408		50.000 Benih	1.418.342.408
Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Jumlah Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar	Samarinda, Kukar, Kubar, Kutim	30.000 Benih	1.418.342.408		30.000 Benih	1.418.342.408
	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa sawit)		10.000 Benih			15.000 Benih	
	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (karet)		10.000 Benih			0 Benih	
	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa)		0 Benih			10.000 Benih	
	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kakao)		0 Benih			5.000 Benih	
	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (aren)		10.000 Benih			0 Benih	
	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah		20.000 Benih			20.000 Benih	
	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (lada)		10.000 Benih			10.000 Benih	
	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (pala)		10.000 Benih			10.000 Benih	
	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (sereh wangi)		0 Benih			0 Benih	
				50.000.000.000			52.000.000.000

Samarinda, 2021
KEPALA,



Ir. UJANG RACHMAD, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690120 199403 1 014

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pelaksanaan kebijakan dan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD tahun 2022 dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2022, pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun 2022, serta kesepakatan Pemerintah dan DPRD dalam seluruh pembahasan APBD Tahun 2022. Namun, sejalan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi, politik baik daerah maupun nasional, evaluasi kinerja Renja Perangkat Daerah, Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat serta kenaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2021, maka diperlukan berbagai langkah respon dan antisipasi terhadap berbagai kondisi tersebut. Langkah-langkah antisipasi tersebut utamanya adalah merubah arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. Hal tersebut berdampak pada diperlukannya perubahan terhadap struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam RKPD 2022.

4.1. Pagu Indikatif Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Secara garis besar, belanja pemerintah daerah dialokasikan melalui Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Kode	Organisasi	RKPD 2022 (Rp)
3..27.3.27.0.0.0.06	Dinas perkebunan	Rp. 50.000.000.000,-
3..27.3.27.0.0.0.06	Dinas perkebunan	Rp. 41.904.550.650,-
3..27.3.27.0.0.0.06.01	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	Rp. 2.496.308.950,-
3..27.3.27.0.0.0.06.02	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Rp. 3.197.333.000,-
3..27.3.27.0.0.0.06.03	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	Rp. 2.401.807.400,-

4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Disesuaikan

Secara garis besar, pemerintah daerah telah berupaya optimal menekan adanya SiLPA pada tahun sebelumnya. Namun pada beberapa Perangkat Daerah memerlukan strategi yang relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah yang pada akhirnya bermuara pada pengoptimalan capaian positif kinerja pembangunan di tahun berkenaan.

Program/kegiatan yang merupakan penjabaran pagu Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dituangkan pada tabel dibawah.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2022
Provinsi Kalimantan Timur

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
DINAS PERKEBUNAN					46.508.261.898					
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	89%	25.220.470.898	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	89%	23.170.339.650
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	72	1.289.172.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	72	1.274.925.300
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	10 Dokumen	552.771.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	10 Dokumen	552.771.000
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	4 Laporan	736.401.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	4 Laporan	722.154.300
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	16.462.909.298	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	15.359.114.750
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan	28 Dokumen	16.010.069.298	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan	28 Dokumen	14.906.274.750
			Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan	12 Laporan				Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan	12 Laporan	
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	452.840.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	452.840.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	936.032.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	936.032.000
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah pakaian dinas (Stell)	356 stell	352.032.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah pakaian dinas (Stell)	356 stell	352.032.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	50 Orang	584.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	50 Orang	584.000.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	5 Unit	1.835.147.254	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	5 Unit	1.716.947.254
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 Bulan	35.991.708	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 Bulan	35.991.708
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 Bulan	167.310.000	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 Bulan	167.310.000
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	352.514.181	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	352.514.181
			Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan				Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	47.240 Lembar	69.731.365	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	47.240 Lembar	69.731.365

Kode	RANCANGAN AWAL RPKD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	9.600.000	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	9.600.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	1.200.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	1.081.800.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	8 Jenis	888.487.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	8 Jenis	286.509.500
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	15 Unit	888.487.500	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	15 Unit	286.509.500
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	2.634.801.146	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	2.634.801.146
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah surat yang diadministrasikan	3.000 Lembar	30.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah surat yang diadministrasikan	3.000 Lembar	30.000.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	494.401.410	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	494.401.410
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	304.192.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	304.192.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	1.806.207.736	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	1.806.207.736
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	1.173.921.700	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	962.009.700
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	18 Unit	612.129.700	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	18 Unit	400.217.700
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2 Unit	349.932.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2 Unit	349.932.000
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	21 Unit	211.860.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	21 Unit	211.860.000
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Produksi komoditas perkebunan (Ton)	18.126.490,20	7.600.000.000	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Produksi komoditas perkebunan (Ton)	18.126.490,20	6.465.557.600
			Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit)	18.020.894				Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit)	18.020.894	
			Produksi Komoditi Perkebunan (karet)	81.651				Produksi Komoditi Perkebunan (karet)	81.651	
			Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa)	12.500				Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa)	12.500	
			Produksi Komoditi Perkebunan (kakao)	4.368				Produksi Komoditi Perkebunan (kakao)	4.368	
			Produksi Komoditi Perkebunan (lada)	7.077				Produksi Komoditi Perkebunan (lada)	7.077	
			Produksi Komoditi Perkebunan (pala)	0,20				Produksi Komoditi Perkebunan (pala)	0,20	
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Produktivitas komoditas perkebunan strategis	19,3 Ton/Ha	7.600.000.000	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Produktivitas komoditas perkebunan strategis	19,3 Ton/Ha	6.465.557.600

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.02.1.01.01	Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit)	21 Ton/Ha	7.600.000.000	Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit)	21 Ton/Ha	6.465.557.600
			Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1,45 Ton/Ha				Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1,45 Ton/Ha	
			Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0,85 Ton/Ha				Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0,85 Ton/Ha	
			Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0,80 Ton/Ha				Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0,80 Ton/Ha	
			Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1,19 Ton/Ha				Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1,19 Ton/Ha	
			Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Dokumen				Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Dokumen	
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan (Kelompok Tani)	30	7.368.900.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan (Kelompok Tani)	30	6.722.948.500
			Luas kebun yang dibangun (Ha)	1.462.645				Luas kebun yang dibangun (Ha)	1.462.645	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah luas kebun yang di perluas (Ha)	595 Ha	7.368.900.000	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah luas kebun yang di perluas (Ha)	595 Ha	6.722.948.500
3.27.03.1.01.01	Perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	150 Ha	7.368.900.000	Perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	150 Ha	6.722.948.500
			Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)	100 Ha				Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)	100 Ha	
			Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)	20 Ha				Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)	20 Ha	
			Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)	100 Ha				Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)	100 Ha	
			Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet)	150 Ha				Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet)	150 Ha	
			Jumlah luas kebun yang di perluas (Pala)	50 Ha				Jumlah luas kebun yang di perluas (Pala)	50 Ha	
			Jumlah luas kebun yang di perluas (Aren)	25 Ha				Jumlah luas kebun yang di perluas (Aren)	25 Ha	
3.27.05	Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,067 Ton CO2Eq	1.220.000.000	Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,067 Ton CO2Eq	1.080.500.000
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi:	135	1.220.000.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi:	135	1.080.500.000
			a. Mitigasi GRK (pelaku usaha)	130				a. Mitigasi GRK (pelaku usaha)	130	
			b. Penanganan Konflik usaha perkebunan (pelaku usaha)	5				b. Penanganan Konflik usaha perkebunan (pelaku usaha)	5	
3.27.05.1.01.02	Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Pertanian, Hortikultura, dan perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	1 PMS	650.000.000	Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Pertanian, Hortikultura, dan perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	1 PMS	546.160.000
			Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi	102.500 Ha				Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi	102.500 Ha	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.05.1.01.03	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina	15 KTPA	570.000.000	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina	15 KTPA	534.340.000
			Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani	5 Konflik				Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani	5 Konflik	
3.27.06	Program perizinan Usaha Pertanian		Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	950.000.000	Program perizinan Usaha Pertanian		Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	750.000.000
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (perusahaan)	97 Perusahaan	950.000.000	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (perusahaan)	97 Perusahaan	750.000.000
3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan izin usaha pertanian	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan	45 Lembaga Pekebun	950.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan izin usaha pertanian	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan	45 Lembaga Pekebun	750.000.000
			Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina	52 Perusahaan				Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina	52 Perusahaan	
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian		Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (lembaga)	1 Lembaga	4.148.891.000	Program Penyuluhan Pertanian		Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (lembaga)	1 Lembaga	3.715.204.900
			Jumlah produk perkebunan yang bersertifikat SNI	1 Produk				Jumlah produk perkebunan yang bersertifikat SNI	1 Produk	
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya (Orang)	25 Orang	426.131.000	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya (Orang)	25 Orang	296.476.900
3.27.07.1.01.01	Pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	1 Kegiatan	426.131.000	Pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	1 Kegiatan	296.476.900
3.27.07.1.02	Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian		Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya (kelompok tani)	31 KT	1.783.825.000	Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian		Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya (kelompok tani)	31 KT	1.627.575.000
			Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan (Unit)	1 Unit				Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan (Unit)	1 Unit	
			Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan	5 Unit				Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan	5 Unit	
3.27.07.1.02.01	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah jenis olahan produk perkebunan yang teradopsi dan disebarluaskan (produk)	5 produk	1.250.000.000	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah jenis olahan produk perkebunan yang teradopsi dan disebarluaskan (produk)	5 produk	1.093.750.000
			Jumlah produk olahan unggulan yang dipromosikan dan dipasarkan (Produk)	9 Produk				Jumlah produk olahan unggulan yang dipromosikan dan dipasarkan (Produk)	9 Produk	
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani	20 Pertemuan	533.825.000	Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani	20 Pertemuan	533.825.000

Kode	RANCANGAN AWAL RPKD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk (Lembaga)	20 Lembaga	1.938.935.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk (Lembaga)	20 Lembaga	1.791.153.000
			Jumlah kelompok tani yang produhnya memenuhi SNI (kelompok tani)	4 KT				Jumlah kelompok tani yang produhnya memenuhi SNI (kelompok tani)	4 KT	
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan penguatan kelembagaan koorporasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk	28 Lembaga	552.475.000	Pembentukan dan penguatan kelembagaan koorporasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk	28 Lembaga	552.475.000
3.27.07.1.03.02	Pendampingan manajemen koorporasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina	5 Unit	850.000.000	Pendampingan manajemen koorporasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina	5 Unit	739.718.000
			Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi kemitraan usaha atau jaringan pemasaran produk perkebunannya (pelaku usaha)	5 pelaku usaha				Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi kemitraan usaha atau jaringan pemasaran produk perkebunannya (pelaku usaha)	5 pelaku usaha	
3.27.07.1.03.03	Penilaian kelayakan dan standarisasi manajemen koorporasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah pengujian sampel produk hasil perkebunan yang diuji dengan pengujian laboratorium yang berstandar SNI	6 Kali	300.000.000	Penilaian kelayakan dan standarisasi manajemen koorporasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah pengujian sampel produk hasil perkebunan yang diuji dengan pengujian laboratorium yang berstandar SNI	6 Kali	262.500.000
3.27.07.1.03.04	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani	1 Pertemuan	236.460.000	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani	1 Pertemuan	236.460.000
UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN					2.946.308.950					
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	89%	1.539.532.450	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	89%	1.460.138.650
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	92.520.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	92.520.000
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	92.520.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	92.520.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	158.990.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	158.990.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	13 Orang	158.990.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	13 Orang	158.990.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	294.022.117	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	294.022.117
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 Bulan	4.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 Bulan	4.500.000
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 Bulan	24.980.000	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 Bulan	24.980.000
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	61.701.617	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	61.701.617
			Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan				Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	500 Lembar	7.000.500	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	500 Lembar	7.000.500
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	3.840.000	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	3.840.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	192.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	192.000.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6 Jenis	413.900.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6 Jenis	334.506.200
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	15 Unit	413.900.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	15 Unit	334.506.200
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	435.339.733	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	435.339.733
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah surat yang diadministrasikan	240 Lembar	2.400.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah surat yang diadministrasikan	240 Lembar	2.400.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	86.977.605	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	86.977.605
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	188.750.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	188.750.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	157.212.128	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	157.212.128
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	144.760.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	144.760.600
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	35.910.600	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	35.910.600
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	4 Unit	90.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	4 Unit	90.000.000
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	13 Unit	18.850.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	13 Unit	18.850.000
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Jumlah benih yang beredar	6.000.000 Benih	1.406.776.500	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Jumlah benih yang beredar	6.000.000 Benih	1.036.170.300
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi	6.000.000 Benih	1.406.776.500	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi	6.000.000 Benih	1.036.170.300
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Benih yang Disertifikasi	3.000.000 Benih	654.782.900	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Benih yang Disertifikasi	3.000.000 Benih	461.297.250

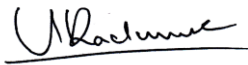
Kode	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.02.1.02.04	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah peredaran benih ilegal yang diawasi	47.000 Benih	751.993.600	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah peredaran benih ilegal yang diawasi	47.000 Benih	574.873.050
UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN					3.500.333.000					3.197.333.000
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	89%	2.055.904.600	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	89%	1.944.904.600
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	92.520.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	92.520.000
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	92.520.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	92.520.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	95.200.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	95.200.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	8 Orang	95.200.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	8 Orang	95.200.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	420.980.917	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	309.980.917
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 Bulan	10.699.946	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 Bulan	10.699.946
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 Bulan	17.600.000	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 Bulan	17.600.000
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	77.777.300	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	77.777.300
			Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan				Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	13.100 Lembar	24.783.671	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	13.100 Lembar	24.783.671
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5.120.000	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5.120.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	285.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	174.000.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	5 Jenis	367.934.800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	5 Jenis	367.934.800
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	17 Unit	367.934.800	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	17 Unit	367.934.800
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	495.410.883	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	495.410.883
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah surat yang diadministrasikan	395 Lembar	3.950.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah surat yang diadministrasikan	395 Lembar	3.950.000

Kode	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	185.782.355	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	185.782.355
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	148.466.400	Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	148.466.400
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	157.212.128	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	157.212.128
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	583.858.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	583.858.000
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	35.510.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	35.510.000
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Unit	509.328.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Unit	509.328.000
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	10 Unit	39.020.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	10 Unit	39.020.000
3.27.05	ProgramPengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT (Rp)	916.648.000	1.444.428.400	ProgramPengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT (Rp)	916.648.000	1.252.428.400
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Luas serangan berat OPT yang dikendalikan (Ha)	195 Ha	1.444.428.400	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Luas serangan berat OPT yang dikendalikan (Ha)	195 Ha	1.252.428.400
3.27.05.1.01.01	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah luas serangan OPT yang dikendalikan (Ha)	195 Ha	1.444.428.400	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah luas serangan OPT yang dikendalikan (Ha)	195 Ha	1.252.428.400
			Jumlah kelembagaan OPT yang dibina (Lembaga)	2 Lembaga				Jumlah kelembagaan OPT yang dibina (Lembaga)	2 Lembaga	
			Jumlah APH yang Diperbanyak (KG)	1.000 KG				Jumlah APH yang Diperbanyak (KG)	1.000 KG	
			Jumlah APH yang Diperbanyak (Liter)	600 Liter				Jumlah APH yang Diperbanyak (Liter)	600 Liter	
			Jenis APH yang dikembangkan (Jenis)	2 Jenis				Jenis APH yang dikembangkan (Jenis)	2 Jenis	
UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN					2.501.807.400					2.401.807.400
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	89%	983.464.992	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	89%	983.464.992
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	92.520.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	92.520.000
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	92.520.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	92.520.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	95.360.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	95.360.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang	95.360.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang	95.360.000

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	268.815.973	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	268.815.973
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 Bulan	2.703.273	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 Bulan	2.703.273
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 Bulan	2.475.000	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 Bulan	2.475.000
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	61.165.200	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	61.165.200
			Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan				Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3.000 Lembar	5.552.500	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3.000 Lembar	5.552.500
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	1.920.000	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	1.920.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	195.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	195.000.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	407.984.019	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	407.984.019
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah surat yang diadministrasikan	300 Lembar	3.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah surat yang diadministrasikan	300 Lembar	3.000.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	92.987.659	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	92.987.659
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	129.231.200	Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	129.231.200

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	182.765.160	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	182.765.160
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	118.785.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	118.785.000
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	36.510.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	36.510.000
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Unit	44.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Unit	44.000.000
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	13 Unit	38.275.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	13 Unit	38.275.000
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	80%	1.518.342.408	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	80%	1.418.342.408
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan	50.000 Benih	1.518.342.408	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan	50.000 Benih	1.418.342.408
3.27.02.1.02.04	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Samarinda, Kukar, Kutim	Jumlah Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar	30.000 Benih	1.518.342.408	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Samarinda, Kukar, Kutim	Jumlah Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar	30.000 Benih	1.418.342.408
			Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa sawit)	10.000 Benih				Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa sawit)	10.000 Benih	
			Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (karet)	10.000 Benih				Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (karet)	10.000 Benih	
			Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa)	0 Benih				Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa)	0 Benih	
			Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kakao)	0 Benih				Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kakao)	0 Benih	
			Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (aren)	10.000 Benih				Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (aren)	10.000 Benih	
			Jumlah benih tanaman semusim dan rempah	20.000 Benih				Jumlah benih tanaman semusim dan rempah	20.000 Benih	
			Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (lada)	10.000 Benih				Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (lada)	10.000 Benih	
			Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (pala)	10.000 Benih				Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (pala)	10.000 Benih	
			Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (sereh wangi)	0 Benih				Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (sereh wangi)	0 Benih	
TOTAL					55.456.711.248					50.000.000.000

Samarinda, 2021
KEPALA,


Ir. UJANG RACHMAD, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690120 199403 1 014

Bab V. Penutup

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 ini merupakan rancangan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Renstra Tahun 2019-2023 dan RKPD Tahun 2022. Renja 2022 disusun sebagai rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Rencana Kerja memuat evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra dalam rangka pencapaian tujuan, sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya manusia yang dimiliki dinas, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tantangan yang berorientasi pada kebijakan program dengan menerapkan konsep pembangunan sistem dan usaha perkebunan berkelanjutan berbasis sumberdaya yang terbarukan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023: ***“Terwujudnya Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan untuk Mensejahterakan Masyarakat”*** (*The realization of sustainable plantation development for community welfare*).



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERKEBUNAN
Jl. M.T Haryono Telp. (0541) 736852, 748660 Fax. (0541) 748382 Kode Pos 75124
Website : <http://disbun.kaltimprov.go.id>, e-mail : <admin@disbun.kaltimprov.go.id>
S A M A R I N D A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 188.4/056/Kpts-Disbun/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memantapkan program pembangunan perkebunan, maka dipandang perlu untuk menyusun rencana kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu ditetapkan Tim Penyusun melalui Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa petugas yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk selaku Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. DPA-SKPD Disbun Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 3.27.01.1.01 tanggal 4 Januari 2021.

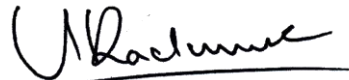
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menunjuk dan menetapkan nama-nama Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana tersebut pada diktum pertama bertugas dalam pengumpulan dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor : 3.27.01.1.01 tanggal 4 Januari 2021;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan selesainya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 21 Januari 2021

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



Ir. UJANG RACHMAD, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690120 199403 1 014

Tembusan :

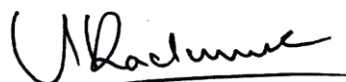
1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Kepala BPKAD Prov. Kaltim di Samarinda

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 188.4/056/Kpts-Disbun/2021
Tanggal : 21 Januari 2021

**PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2022**

No.	Nama / NIP	Jabatan Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Ir. Ujang Rachmad, M.Si NIP. 19690120 199403 1 014	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Ir. Henny Herdiyanto, MP NIP. 19630425 199103 1 004	Sekretaris	Penanggung jawab
3.	Nanang Hayani, S.Hut., M.Env.Mgmt NIP. 19761105 199603 1 006	Kasubbag Perencanaan Program	Ketua
4.	Atkhan, SE, M.Si NIP. 19660502 198601 1 001	Kasubbag Keuangan dan Aset	Anggota
5.	Edy Bardianto, SE NIP. 196810171989021001	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
6.	Muhammad Reza Pahlevi, S.Hut NIP. 19790903 200701 1 007	Pelaksana	Anggota
7.	Santy Marlina, SE NIP. 19731206 200801 2 010	Pelaksana	Anggota
8.	Mega Bharahmawaty NIP. 19800715 200801 2 026	Pelaksana	Anggota
9.	Arni Hartanti, S.Si	Pelaksana	Anggota
10.	Kiki Purwanti, S.Kom	Pelaksana	Anggota
11.	Muhammad Fachrozi, ST	Pelaksana	Anggota

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



Ir. UJANG RACHMAD, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690120 199403 1 014